

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu prioritas utama pembangunan bidang pendidikan di Jawa Barat periode 2005-2009 adalah penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun bagi anak usia 13-15 tahun. Program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun merupakan salah satu komponen penting dalam mencapai target IPM (Indek Pembangunan Manusia) 8.0 yang ingin dicapai pada tahun 2008. Berbagai strategi telah dan sedang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat untuk akselerasi penuntasan program wajar dikdas 9 tahun ini, antara lain: program KBBS (Kartu Bebas Biaya Sekolah) untuk siswa tidak mampu, program BAGUS (Bantuan Gubernur untuk Siswa), dan program pendidikan berbasis masyarakat.

Program pendidikan berbasis masyarakat merupakan adopsi dari konsep "Community-Based Education (CBE)" yang telah dikembangkan di berbagai negara maju dan negara berkembang di Asia dan Afrika. Konsep CBE adalah suatu pendekatan yang mendorong masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses penentuan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan anak, baik yang terkait dengan peningkatan akses kesempatan mengikuti pendidikan maupun peningkatan kualitas pendidikan anak-anak. Masyarakat diajak dan dilibatkan secara aktif melalui berbagai wahana untuk bersama-sama pemerintah meningkatkan layanan pendidikan bagi generasi muda sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat yang ada di setiap daerah.

Pada tahun 2006 telah dilakukan berbagai kajian yang terkait dengan strategi pelaksanaan pendekatan pendidikan berbasis masyarakat dalam kerangka penuntasan program wajar dikdas 9 tahun di Provinsi Jawa Barat. Kajian tersebut terkait dengan 5 (lima) strategi pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat, yaitu: 1) kajian strategi pendidikan berbasis kewilayahan, 2) kajian strategi pendidikan berbasis ekonomi keluarga, 3) kajian strategi pendidikan berbasis agama, 4) kajian strategi pendidikan berbasis bahasa daerah, dan 5) kajian strategi pendidikan berbasis tradisi. Kajian-kajian tersebut telah menghasilkan landasan konsep dan pola pikir yang dapat dijadikan masukan dalam penyusunan pedoman pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat untuk

mendukung akselerasi penuntasan program wajar dikdas 9 tahun di Provinsi Jawa Barat.

Untuk memfasilitasi penyusunan pedoman pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat seperti dimaksud di atas, perlu ditetapkan panduan teknis yang dapat dijadikan rujukan tim penyusun. Kerangka Acuan Kerja (KAK) merupakan rambu-rambu penyusunan pedoman pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat untuk provinsi Jawa Barat tahun 2007.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Ssistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Stratejik Pembangunan Provinsi;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
9. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 243-5/Disdik Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran bahasa dan sastra Sunda;
10. DIPA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2007;
11. Rekomendasi UNESCO tahun 1999 tentang pemeliharaan bahasa-bahasa ibu;

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan yang hendak dicapai dalam kegiatan ini adalah tersusunnya pedoman pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat untuk dijadikan rujukan bagi penyelenggara pendidikan dalam rangka perluasan akses, peningkatan mutu pendidikan dasar dan akselerasi penuntasan Wajib Dikdas sembilan tahun di Provinsi Jawa Barat.

2. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan yang hendak dicapai dengan kegiatan penyusunan pedoman pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat ini adalah :

- a. mengkaji kembali hasil kajian strategi pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat tahun 2006 untuk dijadikan masukan dalam penyusunan pedoman teknis pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat untuk mendukung akselerasi program wajar dikdas 9 tahun di Provinsi Jawa Barat; dan
- b. menyusun pedoman teknis pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat melalui strategi pendidikan berbasis kewilayahan, ekonomi keluarga, agama, bahasa daerah, serta budaya dan tradisi yang sesuai dengan potensi masyarakat Provinsi Jawa Barat.

D. Hasil yang Dicapai

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan 1 (satu) dokumen Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat yang komprehensif untuk dijadikan panduan oleh semua pihak yang terlibat dalam perluasan akses dan mutu pendidikan dasar serta akselerasi penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Provinsi Jawa Barat.

E. Prosedur Kegiatan

1. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Penyusunan Pedoman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam DIPA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2007.
2. Penetapan Tim Penyusun Pedoman yang memenuhi kriteria keahlian yang ditetapkan dalam KAK.

3. Pertemuan awal Tim Penyusun untuk menetapkan program kerja penyusunan pedoman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam KAK.
4. Presentasi program kerja tim Penyusun Pedoman.
5. Penyusunan draf awal pedoman oleh tim penyusun sesuai dengan outline yang disepakati.
6. Presentasi draf awal pedoman yang telah disusun oleh tim untuk mendapatkan masukan dari pihak yang terkait.
7. Revisi pedoman oleh tim penyusun berdasarkan masukan yang diperoleh dalam presentasi draf awal.
8. Presentasi draf akhir.
9. Finalisasi draf pedoman oleh tim penyusun.
10. Penyerahan pedoman yang telah final kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
11. Pencetakan dan penggandaan pedoman.

F. Tim Penyusun Pedoman

Tim Penyusun Pedoman terdiri dari para pakar pendidikan dari PT yang telah terlibat dalam pelaksanaan pengkajian strategi pendidikan berbasis masyarakat tahun 2006 yang dikoordinasikan oleh Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UPI. Susunan Tim Penyusun Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat di Provinsi Jawa Barat tahun 2007 adalah:

- Koordinator : Prof. Dr. H. Enceng Mulyana, M.Pd (Ketua LPM UPI)
- Tim Ahli : H. Udin S. Saud, Ph.D
- Anggota : H. Udin S. Saud, Ph.D. (Strategi Lakdikmas Berbasis Kewilayahan)
 Dr. Hj. Ihat Hatimah, M.Pd. (Strategi Lakdikmas Berbasis Ekonomi Keluarga)
 Dr. H. Asep S. Muhtadi, MA. (Strategi Lakdikmas Berbasis Agama)
 Drs. Usep Kuswari, M.Pd. (Strategi Lakdikmas Berbasis Bahasa Daerah)
 Drs. Yadi Ruyadi, M.Si. (Strategi Lakdikmas Berbasis Budaya dan Tradisi)
- Tim Teknis : Drs. H. Ade Sadikin Akhyadi, M.Si.
 Dra. Katiah, M.Pd.

G. Ruang lingkup

Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Masyarakat ini memuat konsep, prinsip, mekanisme, dan strategi:

1. Pelaksanaan pendidikan masyarakat berbasis kewilayahan
2. Pelaksanaan pendidikan masyarakat berbasis ekonomi keluarga
3. Pelaksanaan pendidikan masyarakat berbasis agama
4. Pelaksanaan pendidikan masyarakat berbasis bahasa daerah
5. Pelaksanaan pendidikan masyarakat berbasis budaya dan tradisi

H. Waktu Kegiatan

Penyusunan pedoman ini dilaksanakan dalam waktu 60 (enampuluh) hari kerja, mulai Mei sampai dengan Juni 2007

I. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan penyusunan pedoman ini seluruhnya dibebankan kepada pos DIPA Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2007.

BAB II

STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN

A. Rasional

Salah satu strategi pembangunan pendidikan di Provinsi Jawa Barat dalam rangka akselerasi penuntasan wajar dikdas 9 tahun dan sekaligus peningkatan mutu pendidikan adalah mengikuti azas keragaman dalam potensi yang dimiliki daerah. Setiap daerah kabupaten/kota dapat mengembangkan program pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusianya sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah, dan sekaligus dapat menunjang peningkatan pembangunan pendidikan regional Jawa Barat. Pengembangan program pendidikan seperti tersebut dikenal dengan pendekatan *Community-Based Education* (CBE), yaitu suatu gagasan yang menempatkan orientasi penyelenggaraan pendidikan pada lingkungan kontekstual (ciri, kondisi dan kebutuhan masyarakat) dimana lembaga pendidikan atau persekolahan itu berada. Orientasi pengembangan program sekolah/madrasah hendaknya merefleksikan ciri, sifat, dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian titik pokoknya adalah bagaimana penyelenggaraan pendidikan di sekolah/madrasah dapat memenuhi kebutuhan sebagaimana besar masyarakat pengguna, dengan memperhatikan ciri, sifat dan kebutuhan masyarakatnya, sementara pengelolaan sekolah mampu mengakomodasi kepentingan tersebut dengan cara melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah/lembaga pendidikan lainnya yang direfleksikan dalam visi, misi dan program-program strategis sekolah.

Pendidikan berbasis kewilayahan merupakan salah satu strategi pelaksanaan pendidikan berbasis masyarakat yang dikembangkan berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing wilayah pengembangan daerah dengan tetap mematu azas dan arah pembangunan regional dan nasional. Dengan demikian, maka pendidikan berbasis kewilayahan yang dapat diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Barat harus mengikuti aturan nasional dan aturan regional yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat.

Penerapan strategi pendidikan berbasis kewilayahan diasumsikan akan memberikan keleluasaan bagi daerah kabupaten/kota untuk menyesuaikan antara potensi daerah yang dimiliki dengan kebutuhan manusia pengelola

potensi tersebut, sehingga menjadi keunggulan yang dapat meningkatkan citra daerah dan juga mempertahankan nilai-nilai budaya daerah. Selain itu, strategi pendidikan berbasis kewilayahan diprediksi akan dapat mendorong peningkatan akses masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sebagai salah satu indikator penting mencapai target IPM 8.0 untuk regional Jawa Barat.

B. Konsep Dasar

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang berada dalam masa reformasi menuju ke arah perbaikan di berbagai bidang, serta menata kembali berbagai bidang kehidupan agar tata kehidupan bangsa bisa sejajar dengan bangsa lain yang lebih maju. Perkembangan sumber daya manusia merupakan hal yang tak bisa dielakan untuk mendapat perhatian lebih, sesuai dengan amanat RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) dan dalam proses perkembangannya – pendidikan memainkan peranan yang sangat penting.

“Pendidikan adalah kehidupan”. Dalam pengertian luas, pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi pertumbuhan individu (*Mudyahardjo Redja, 2001:3*).

Visi pendidikan nasional adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berdasarkan hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin (*Renstra pendidikan nasional 2000-2004, 2001:6*).

Memperhatikan betapa besarnya pendidikan mempengaruhi dan mewarnai tiap individu dalam kehidupannya, maka tiap individu haruslah mendapat pendidikan yang bisa mengantarkan pada kehidupan yang lebih baik – mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial tiap individu, maka dalam pengertian sempit menurut *Mudyahardjo Redja (2001:3)*; “Pendidikan adalah sekolah”. Pendidikan adalah pengajaran yang diselenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal.

1. Pendidikan sebagai Proses

Pendidikan, seperti sifat sarannya yaitu manusia, mengandung banyak aspek dan sifatnya sangat kompleks. Karena sifatnya yang kompleks itu, maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Batasan tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah yang melandasinya.

Di bawah ini dikemukakan beberapa batasan pendidikan yang berbeda berdasarkan fungsinya.

a. Pendidikan sebagai Proses Transformasi Budaya

Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Seperti bayi lahir sudah berada di dalam suatu lingkungan budaya tertentu. Di dalam lingkungan masyarakat di mana seorang bayi dilahirkan telah terdapat kebiasaan-kebiasaan tertentu, larangan-larangan dan anjuran, dan ajakan tertentu seperti yang dikehendaki oleh masyarakat. Hal-hal tersebut mengenai banyak hal seperti bahasa, cara menerima tamu, makanan, istirahat, bekerja, perkawinan, bercocok tanam, dan seterusnya.

Nilai-nilai kebudayaan tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi muda. Ada tiga bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok diteruskan misalnya kejujuran, rasa tanggung jawab dan lain-lain, yang kurang cocok diperbaiki, misalnya tata cara pesta perkawinan, dan yang tidak cocok diganti misalnya pendidikan seks yang dahulu ditabukan diganti dengan pendidikan seks melalui pendidikan formal.

Di sini tampak bahwa proses pewarisan budaya tidak semata-mata mengelakan budaya secara estafet. Pendidikan justru mempunyai tugas menyiapkan peserta didik untuk hari esok. Suatu masa dengan pendidikan yang menuntut banyak persyaratan baru yang tidak pernah diduga sebelumnya, dan malah sebagian besar masih berupa teka-teki. Dengan menyadari bahwa sistem pendidikan itu merupakan sub sistem dari sistem pembangunan nasional maka misi pendidikan sebagai transformasi budaya harus sinkron dengan beberapa

pernyataan GBHN yang memberikan tekanan pada upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan, yaitu sebagai berikut (BP. 7. Pusat, 1990: 109-110).

- 1) Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, rasa, karsa bangsa Indonesia.
- 2) Kebudayaan nasional yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa terus dipelihara, dibina, dan dikembangkan sehingga mampu menjadi penggerak bagi perwujudan cita-cita bangsa di masa depan.
- 3) Perlu ditumbuhkan kemampuan masyarakat untuk mengangkat nilai-nilai sosial budaya daerah yang luhur serta menyerap nilai-nilai luar yang positif dan yang diperlukan bagi pembaruan dalam proses pembangunan.
- 4) Perlu terus diciptakan suasana yang mendorong tumbuh dan berkembangnya disiplin nasional serta sikap budaya yang mampu menjawab tantangan pembangunan dengan dikembangkan pranata sosial yang dapat mendukung proses pemantapan budaya bangsa.
- 5) Usaha pembaruan bangsa perlu dilanjutkan di segala bidang kehidupan bidang ekonomi, ekonomi, dan sosial budaya.

b. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi

Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya kepribadian peserta didik.

Sistematis oleh karena proses pendidikan berlangsung melalui tahap-tahap berkesinambungan (prosedural) dan sistemik oleh karena berlangsung dalam semua situasi kondisi, di semua lingkungan yang saling mengisi (lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat).

Proses pembentukan pribadi meliputi dua sasaran yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka yang sudah dewasa, dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri. Yang terakhir ini disebut pendidikan diri sendiri (*zelf vorming*). Kedua-duanya bersifat alamiah dan menjadi keharusan. Bayi yang baru lahir kepribadian belum terbentuk, belum mempunyai warna dan corak kepribadian yang tertentu. Ia baru merupakan individu, belum suatu pribadi. Untuk menjadi suatu pribadi perlu mendapat bimbingan, latihan-latihan, dan pengalaman melalui bergaul dengan lingkungannya, khususnya dengan lingkungan pendidikan.

Bagi mereka yang sudah dewasa tetap dituntut adanya pengembangan diri agar kualitas kepribadina meningkat serempak dengan meningkatnya tantangan hidup yang selalu berubah. Dalam hubungan ini dikenal apa yang disebut *pendidikan sepanjang hidup*. Pembentukan pribadi mencakup pembentukan cipta, rasa, dan karsa (kognitif, afektif, dan psikomotor) yang sejalan dengan pengembangan fisik.

Dalam posisi manusia sebagai makhluk serba terhubung, pembentukan pribadi meliputi pengembangan penyesuaian diri terhadap lingkungan, terhadap diri sendiri, dan terhadap Tuhan.

c. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warga Negara

Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara diartikan sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Tentu saja istilah baik di sini bersifat relatif, tergantung kepada tujuan nasional dari masing-masing bangsa, oleh karena masing-masing bangsa mempunyai falsafah hidup yang berbeda-beda.

Bagi kita warga negara yang baik diartikan selaku pribadi yang tahu hak dan kewajiban sebagai warga negara, hal ini ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 yang menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

d. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Tenaga Kerja

Pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan kerja pada calon luaran. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia. Bekerja menjadi penopang hidup seseorang dan keluarga sehingga tidak bergantung dan mengganggu orang lain. Melalui kegiatan bekerja seseorang mendapat kepuasan bukan saja karena menerima imbalan melainkan juga karena seseorang dapat memberikan sesuatu kepada orang lain (jasa ataupun benda), bergaul, berkreasi, dan bersibuk diri. Kebenaran hal tersebut menjadi jelas bila kita melihat hal yang sebaliknya, yaitu mengganggu adalah musuh kehidupan.

2. Komponen-Komponen dalam Pembangunan Pendidikan

a. Komponen Filosofi

1) *Visi*

Visi adalah *statement* mengenai nilai, aspirasi dan tujuan yang paling fundamental dalam organisasi. Di mana visi merupakan gambaran nyata dan penuntun secara filosofis untuk masa depan. Ketika pendidikan mencari sesuatu yang baik untuk mencapai efektifitas tujuan, hal ini harus dapat menciptakan iklim dan budaya yang memuat komitmen untuk menterjemahkan nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi ke dalam pemahaman dan sumber daya yang dimiliki.

Visi *Pendidikan* Nasional sejalan dengan Visi Pembangunan Nasional.

Visi *Pendidikan* memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pembinaan dan pengembangan dalam pembangunan khususnya sumber daya manusia sebagai pelaksana pembangunan Indonesia.

Visi *Pendidikan* Nasional : Terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berakhlak, berkeahlian, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin.

2) *Misi*

Misi adalah tugas yang harus diemban oleh intitusi berkaitan dengan visi. Misi dalam pendidikan memperhatikan dan menterjemahkan setiap komponen dalam penyelenggaraan Pendidikan Nasional. Misi dalam pendidikan memberikan jaminan bagi pelaksanaan pembangunan dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang purna.

Misi Pendidikan Nasional :

- Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan berkualitas.
- Mewujudkan kehidupan sosial yang berkepribadian, dinamis, kretatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh negatif globalisasi.

- Meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang produktif, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

3) Tujuan

Tujuan berupa hasil akhir yang hendak dicapai berupa bentukan, ciptaan, kegiatan, melalui kegiatan yang terencanakan, terlaksanakan, dan terawasi dan bertanggungjawabkan. Tujuan menempatkan *what is dan what should be (das sollen dan das sein)* dengan memperkecil sisi kesenjangan.

b. Komponen Policy

Kebijakan merupakan strategi dasar dalam mewujudkan tujuan. Kebijakan yang diambil merupakan hasil proses yang berupaya memperkecil dampak-dampak kemungkinan yang negatif. Dalam tatanan decision maker, kebijakan politik pendidikan :

- 1) *Political Awareness* (Kesadaran politik)
Political Commitmen (Komitmen/Tekad)
 - a) Political Will (Kemauan – Action)

2) *Komponen Manajemen*

Sebagai komponen bagaimana pengelolaan kegiatan-kegiatan pendidikan yang teratur dan rapi dengan mengikuti proses yang dimulai dari kegiatan perencanaan sampai pada tingkat pertanggungjawaban dari setiap langkah kegiatan yang dilaksanakan. Dalam manajemen pendidikan terakumulasikan hal-hal : tepat sasaran, efisien, ekonomis, memadai, zero defect (tanpa kesalahan/memperkecil kemungkinan salah)

3. Pendidikan Berbasis Kewilayahan

Pendidikan di Indonesia mengalami perubahan-perubahan dalam perjalanan kiprahnya mencerdaskan bangsa, mempersiapkan sumber daya manusia, mensukseskan pembangunan bangsa, meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan-perubahan baik pada level makro maupun pada level mikro sebagai ujung tombak operasional pelaksanaan

pendidikan adalah sebagai upaya untuk semakin meningkatkan kualitas dan relevansi dari proses pendidikan itu sendiri. Berbagai inovasi coba diterapkan guna mencari model, strategi dan pendekatan yang dapat mengakomodasikan kepentingan-kepentingan bangsa dan masyarakat pada umumnya dalam hidup dan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta kiprahnya pada tingkat internasional.

Dewasa ini sejumlah inovasi dalam penyelenggaraan pendidikan mengedepan sebagai sebuah bentuk kepedulian pada tingkat pemerintahan pusat maupun seiring dengan perubahan pada penyelenggaraan system pemerintahan (desentralisasi). Sehingga pada tingkat pemerintah daerahpun memiliki kesempatan untuk mencari dan meentukan sebuah model pendekatan yang dapat mengakomodasi potensi, kepentingan dan pembangunan daerah setempat. Ada beberapa pendekatan/model yang mencoba menggali dan memaksimalkan potensi daerah dan kebutuhan daerah setempat melalui penyelenggaraan pendidikan diantaranya adalah *Broad Based Education* (BBE), *Community Based Education* (CBE), dan lain-lain.

Broad Based Education (Pendidikan Berbasis Luas) dan *Life Skill* (keterampilan untuk hidup dan penghidupan), merupakan dua istilah yang digunakan dalam upaya menanggulangi problema kualitas dan relevansi hasil dari proses pendidikan.

Broad Based Education (BBE), menurut Tim BBE Depdiknas (Buku I, 2001: 7) diartikan sebagai suatu pendekatan dalam pengelolaan lembaga pendidikan yang bertujuan bukan hanya sekedar mengaktualisasikan potensi peserta didik, sehingga dapat digunakan untuk memecahkan problema yang dihadapi, juga memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip Pendidikan Berbasis Luas, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*). Prinsip BBE berorientasi pada pendidikan yang tidak hanya ditujukan pada bidang akademik atau *vocational* semata, tetapi juga memberikan bekal *Learning How To Learn* yang sekaligus *Learning To Unlearn*, tidak hanya belajar teori, tetapi juga mempraktekkannya untuk memecahkan problema kehidupan sehari-hari. Sejalan dengan pemikiran di atas dikatan bahwa BBE dalam *Community Based Learning: A Foundation for Maningful Education Reform*

(Thomas R. Owen : 1996) : "...a broad frame work that includes service-learning, experiential learning, school-to-work, youth apprenticeship, lifelong learning and others types.

Sedangkan untuk istilah *Life Skill* (Kecakapan Hidup), Tim BBE Depdiknas (Buku I, 2001: 9) mengartikan sebagai kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi, sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Dimensi-dimensi yang terkandung dalam *Life Skill* merujuk pula pada aspek-aspek yang dikemukakan Tim BBE Depdiknas, yaitu berkenaan dengan:

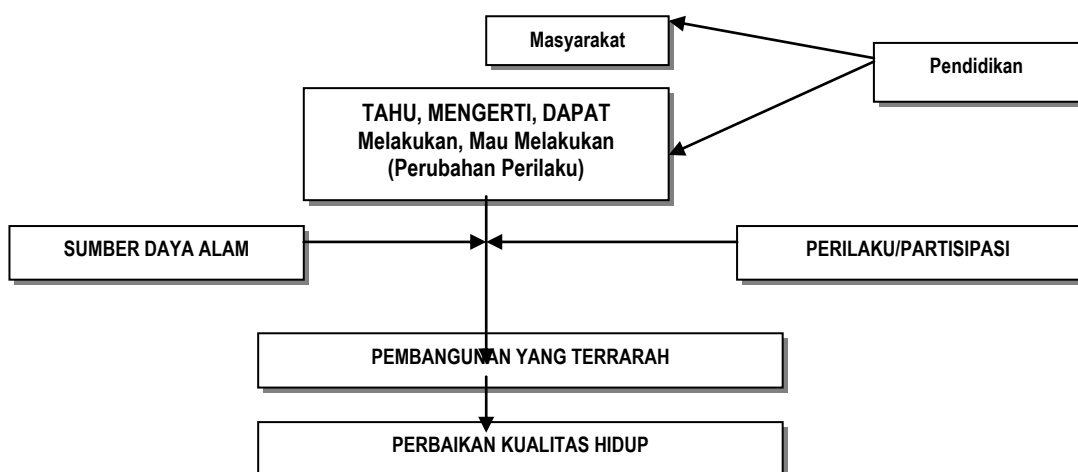
- a. Kecakapan mengenal diri (*self awarness*), atau sering juga disebut kemampuan personal (*personal skill*). Variabel-variabel yang termasuk dalam kecakapan ini, mencakup: (1) penghayatan diri sebagai makhluk Tuhan YME, anggota masyarakat dan warganegara, (2) menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya.
- b. Kecakapan berpikir rasional (*thinking skill*). Variabel-variabel yang termasuk dalam kecakapan ini mencakup: (1) kecakapan menggali dan menemukan informasi (*information searching skill*), (2) kecakapan mengolah informasi dan membuat keputusan (*information processing and decision making skill*), (3) kecakapan memecahkan permasalahan secara aktif dan kreatif (*creative problem solving skill*).
- c. Kecakapan sosial (*social skill*). Variabel-variabel yang termasuk ke dalam kecakapan ini mencakup: (1) kecakapan berkomunikasi atau berhubungan dengan orang lain secara empati dan penuh pengertian (*communication skill*), dan (2) kecakapan bekerja sama (*collaboration skill*).
- d. Kecakapan akademik (*academic skill*), sering juga disebut kemampuan berpikir ilmiah (*scientific method*). Variabel-variabel yang termasuk dalam kecakapan ini mencakup: (1) identifikasi variabel, (2) merumuskan hipotesis, dan (c) melaksanakan penelitian.
- e. Kecakapan vocational (*vocational skill*), sering juga disebut dengan keterampilan kejuruan, artinya keterampilan yang dikaitkan dengan bidak

pekerjaan tertentu dan bersifat spesifik (*specific life skill*) atau keterampilan teknis (*technical skill*) yang terdapat di masyarakat.

Pendidikan Berbasis Kewilayahan menempatkan keterlibatan masyarakat (pemberdayaan masyarakat) dalam pelaksanaannya, United Nations seperti dikutip Mangatas Tampubolon (9:2003) mengemukakan proses-proses pemberdayaan masyarakat lebih mengarah kepada hal-hal berikut ini :

- 1) Getting to know local community
- 2) Gathering knowledge about the local community
- 3) Identifying the local leaders
- 4) Stimulating the community to realize that it has problems
- 5) Helping people to discuss their problem
- 6) Helping people to identify their most pressing problems
- 7) Fostering self-confidence
- 8) Deciding on a program action
- 9) Recognition of strengths and resources
- 10) Helping people to continue to work on solving their problems
- 11) Increasing peoples ability for self-helf

Pemberdayaan masyarakat dalam kontek Broad Based Education lebih kepada bagaimana mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri atau membantu masyarakat agar mampu membantu diri mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan ini factor peningkatan kualitas Sumber daya Manusia melalui pendidikan formal maupun non formal perlu mendapat prioritas. Pendidikan dengan upaya pemberdayaan masyarakat dapat digambarkan (Mangatas Tampubolon : 2003) seperti gambar berikut ini :



Gambar 1: Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat

4. Model-model Keterlibatan Masyarakat dalam Sekolah

Kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah semua bentuk kegiatan bersama yang langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi kedua belah pihak. Dengan pengertian ini, semua bentuk dukungan masyarakat termasuk dukungan orang tua siswa adalah wujud kerjasama. Demikian juga semua kegiatan di sekolah, termasuk proses belajar mengajar yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat, adalah wujud kerjasama yang perlu ditingkatkan.

Unsur-unsur di dalam masyarakat yang dapat diajak bekerja sama adalah: orang tua siswa, warga dan lembaga masyarakat sekitar sekolah, tokoh masyarakat, lembaga agama, organisasi kemasyarakatan, pemerintah setempat, petugas keamanan dan ketertiban, sesama sekolah, serta kalangan pengusaha, pedagang dan industri yang masih dalam jangkauan sekolah. Begitu banyak dan luas unsur masyarakat yang mungkin dapat membantu eksistensi serta pengembangan sekolah, namun tidak semua dapat memberikan sumbangan secara nyata kepada sekolah, itu sebabnya pengelola sekolah perlu berupaya dengan sungguh-sungguh dan sistematis agar kerjasama dengan masyarakat dapat diwujudkan dan dikembangkan.

Di bawah ini sebuah contoh dari kegiatan keterlibatan masyarakat dalam sekolah yang sudah dikelola dengan baik, sehingga dapat dengan jelas kita melihat bentuk dan kewenangan dari masyarakat di dalam sekolah, sebagai berikut:

In Illinois some Schools now use the PTA standards which were designed to guide families, educators and communities through the process of involving parents in their children's education. These Illinois PTA standards, similar to Joyce Epstein's, include: (1) communicating – communication between home and school is regular, two-way and meaning full, (2) parenting – parenting skills are promoted and supported, (3) student learning – parent play at integral role in assisting student learning, (4) volunteering – parents are welcome in the school, and their support and assistance are sought, (5) School Decision – making and advocacy – parents are full partners in the decisions that affect children and families, (6) collaborating with community – community resources are used to strengthen schools, families, and student learning. These types of involvement can make family partnership programs more successful and meaningful. Some "real word" examples of family involvement in Illinois demonstrate ways these different types of involvement can help schools and raise student achievement. (Lindsay Warner, 2001 ; 5, Family Involvement: A Key Component of Student and School Success, Voices for Illinois Children, WWW.Voices4kids.org)

Pengelola di dalam sekolah yang dapat merencanakan atau melaksanakan kerjasama dengan masyarakat adalah: (1) kepala sekolah, (2) wakil kepala sekolah, (3) koordinator-kegiatan, (4) wali kelas, serta (5) guru atau petugas yang ditunjuk kepala sekolah.

Pengelola di luar sekolah yang besar perannya dalam menciptakan dan mengatur kerja sama sekolah dengan masyarakat adalah: (1) Kepala Kantor Dinas tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, (2) Camat, Bupati, Walikota, Gubernur, dan pejabat yang terkait dalam bidang pendidikan, (3) Pengurus yayasan sekolah bersangkutan, dan (4) Lembaga/organisasi khusus yang dibentuk untuk membantu penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

Kepala sekolah adalah perencana, pelaksana, dan penentu kebijakan hampir semua bentuk kerjasama sekolah dengan masyarakat. Oleh sebab itu kepala sekolah sangat menentukan proses dan hasil kerjasama itu. Pengelola di luar sekolah bersifat menunjang baik berupa kebijakan, peraturan, finansial, materi, pemikiran, maupun koordinasi.

Ada tiga azas yang mendasari kerjasama, yakni: (1) azas manfaat, (2) azas gotong-royong, dan (3) birokrasi. Kerjasama yang didasarkan pada azas manfaat, pada hakekatnya merupakan kegiatan bersama yang harus menguntungkan semua pihak yang terlibat dalam kerjasama itu bila salah satu pihak merasa kurang memperoleh manfaat, maka ia dengan serentak atau berangsur-angsur akan keluar dari kerja sama itu. Azas ini realitas dan sesuai dengan masyarakat yang cenderung materialistik berdasar azas ini, sekolah harus bekerja keras menunjukkan kepada masyarakat yang membantu (baik orang tua siswa maupun unsur masyarakat lainnya), bahwa sekolah langsung atau tidak langsung bermanfaat bagi masyarakat bersangkutan. Sekolah unggul dan sekolah favorit tidak mengalami kesulitan dalam menerapkan azas ini, maka fasilitas dan bantuan dari masyarakat untuk mengembangkan sekolah akan diperoleh lebih mudah. Sebaliknya, sekolah yang 'lemah' atau 'baru berkembang' akan sulit menerapkan azas ini, dengan azas ini sekolah yang sudah maju cenderung makin maju, dan sekolah yang tertinggal cenderung makin jauh tertinggal.

Stakeholders di atas mengacu kepada orang-orang yang berpengaruh terhadap kemajuan pendidikan, baik proses maupun lulusannya. Dalam analisis industri ini, tugas kita menghubungkan hal yang patut untuk dicontoh

disesuaikan dengan realita dan situasi dan kondisi yang ada, dilakukan penambahan /modifikasi disesuaikan dengan lingkungan yang ada.

Dalam persaingan sekolah, kita harus memperhatikan beberapa hal, yaitu:

- 1) Perkembangan teknologi belajar;
- 2) Perubahan masyarakat;
- 3) Kemampuan yang disediakan stakeholders;
- 4) Kemampuan konsumen stakeholders;
- 5) Perubahan kebijakan pemerintah;
- 6) Penyediaan pendidikan yang baru.

Untuk mengembangkan sekolah agar dapat berkompetisi dengan sekolah lain maka harus melibatkan orang tua, pimpinan masyarakat, pemuda, lembaga pendidikan, kelompok masyarakat, dll. Dalam hal ini timbul pertanyaan apakah perkembangan sikap dan kebiasaan kelompok berpengaruh langsung pada pelaksanaan pendidikan di sekolah dan apa yang akan terjadi di masa depan?

Di dalam pertanyaan pertama lebih menitikberatkan pada perkembangan dan yang kedua lebih terfokus pada strategi. Beberapa perubahan yang besar mempengaruhi pendidikan terlihat sebagai berikut:

1) Orang tua

- ❑ Meningkatkan permintaan dari orang tua untuk mengutamakan sekolah dibanding pada kesehatan dan kesejahteraan;
- ❑ Meningkatnya permintaan dari orang tua untuk menjamin dari buta huruf, buta angka dan keterampilan dalam sosialisasi;
- ❑ Meningkatnya perhatian terhadap perlengkapan pendidikan bagi anak-anak mereka untuk pembangunan;
- ❑ Meningkatnya keinginan orang tua untuk dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang berhubungan dengan sekolah dan perkembangan kurikulum;
- ❑ Meningkatnya perhatian terhadap pendidikan dengan menerima masukan berupa saran, ide dari orang tua;
- ❑ Meningkatkannya akan pemahaman orang tua terhadap ketidakpastian nilai pendidikan dan biaya pendidikan;
- ❑ Meningkatnya permintaan bahwa persekolahan seharusnya mempersiapkan untuk pekerjaan dan perkembangan karier;

- Rasa ingin memiliki hak perlindungan.

2) Anak Didik

- Meningkatnya rata-rata putus sekolah dari sistem sekolah;
- Kemunduran penampilan peserta didik dalam beberapa ujian menunjukkan bahwa sistem telah membentuk penampilan yang lemah;
- Meningkatkan penggunaan akan pelayanan masyarakat, kesehatan, olahraga, bimbingan, latihan organisasi oleh peserta didik;
- Perhatian melebihi jarak pilihan subjek dan pilihan lebih fleksibel;
- Perhatian untuk menyesuaikan sekolah dengan karier.

3) Pengusaha

- Menumbuhkan perhatian terhadap kualitas pelayanan pendidikan dengan syarat-syarat babas buta huruf, buta angka dan memiliki keterampilan;
- Meningkatnya keterlibatan dalam strategi dan sumber pertanyaan dalam pendidikan melalui kemitraan industri, *joint venturing*, proyek pengembangan kurikulum;
- Meningkatnya dalam usaha dari pengusaha untuk menjamin perubahan kebijakan dari pemerintah;
- Khususnya dalam hubungan pada sekolah dengan menghilangkan buta huruf, menghilangkan buta angka dan keterampilan masyarakat ini terlihat sebagai dukungan terhadap kegagalan sekolah;
- Pengakuan bahwa investasi dalam latihan adalah elemen kunci dalam strategi kompetitif.

4) Lembaga kedua

- Merubah dalam perekrutan untuk masuk karena permintaan untuk tepat melebihi kebutuhan;
- Perhatian melebihi dasar akademik dari kurikulum sekolah sehingga mempengaruhi dalam ketentuan masuk universitas;
- Perhatian yang kurang dari penyatuan terhadap kemampuan akan teknologi (tidak terkecuali informasi teknologi di dalam kurikulum sekolah);
- Perkembangan yang menarik dari pemuda terhadap pengetahuan sepanjang hayat.

5) Kelompok masyarakat

- Memperhatikan diantara para wajib pajak yang tidak mempunyai anak usia sekolah yang memerlukan biaya;
- Pembelaan masyarakat meningkat yang memandang sekolah sebagai roda untuk mempromosikan masalah sosial, seperti AIDS, pencemaran lingkungan, minimnya hak suara dalam status sekolah;
- Situasi politik dalam pengawasan kurikulum oleh beberapa orang;
- Agama, etika, moral sebagai monitoring terhadap kurikulum;
- Tingginya permintaan terhadap penerimaan fasilitas fisik dan perlengkapan (terutama teknologi informasi) dari kelompok masyarakat.

Pada dasarnya semua perhatian tertuju pada kelompok *stakeholders* adalah pertanyaan tentang penampilan, relevansi dan hak terutama dalam pembuatan pemilihan strategi dalam memperhatikan saran *stakeholders* diantaranya:

- Keefektifan, kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan sebagai ukuran standar penampilan.
- Efisiensi, kemampuan sekolah dalam mempertemukan dugaan dalam memperlihatkan cara efektif. Para *stakeholders* yang berpagang teguh terhadap konsep nilai untuk uang, seperti pandangan kita antara pembukuan dan persepsi elemen tersebut. Mereka menginginkan demonstrasi itu yang secara objektif diterima tanpa adanya pemborosan dalam bentuk seperti apa keefektifan biaya itu dan harapan apa yang akan diwujudkan.
- Hak perorangan, tingkatan kesadaran kerja sekolah dan penghormatan terhadap hak dengan memperhatikan diri individu.
- Kesamaan kesempatan, sementara program kurikulum dapat dibedakan dari satu sekolah dengan sekolah lain, semuanya harus mempunyai kesamaan hak dalam hal program, mencakup perbedaan jender, perlombaan, kelas atau orientasi seksual.

Partisipasi orang dalam organisasi sekolah dirasakan menjadi hal pendukung yang terpenting dalam pencapaian tujuan organisasi, karena bagaimanapun bentuk perilaku orang dalam kegiatan organisasi adalah modal bagi organisasi. Hal yang perlu dilakukan adalah bagaimana orang bisa berpartisipasi dengan baik dan tinggi dalam setiap kegiatan organisasi. Partisipasi yang dilakukan orang tidak hanya sebatas melakukan pekerjaan yang menjadi

tanggungjawabnya, akan tetapi partisipasi yang kreatif yang lebih mengarah kepada bentuk-bentuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam pekerjaan yang rutin dan ide-ide serta gagasan-gagasan yang mengarah kepada usaha-usaha perbaikan dan penyempurnaan setiap pekerjaan yang dilakukannya.

Dalam upaya partisipasi orang dalam pekerjaan hal ini dimulai dari keterbatasan mental dan emosional orang-orang dalam situasi berkelompok yang mendorong mereka ikut untuk membantu, mencapai tujuan kelompok dengan membagi tanggungjawab. Adapun yang terkandung dalam kegiatan partisipatif orang dalam organisasi adalah : (1) keterlibatan mental dan emosional; (2) memberi kesempatan berinisiatif dan kreatif; (3) kesediaan menerima tanggungjawab; (4) meningkatkan kekuatan dan pengaruh. Dalam penyelenggaraan pendidikan, masyarakat, pemerintah dan keluarga memegang peranan yang sentral dan strategis. Peranan tersebut mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan, baik pada level Tujuan Pendidikan Nasional, pada level Regional dan Institusional. Untuk memaksimalkan peranannya masing-masing diperlukan pola kerjasama yang memberikan kesempatan dan peluang keduanya berkiprah secara proporsional.

5. Model-model Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Kewilayahan

Pendidikan berbasis kewilayahan diarahkan untuk dapat memfasilitasi kebutuhan daerah akan lulusan lembaga persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dan arah pengembangan wilayah yang bersangkutan. Kebutuhan-kebutuhan tersebut secara spesifik menyangkut kebutuhan akan tenaga kerja daerah setempat, kebutuhan akan pembukaan lapangan kerja baru, kebutuhan akan pengembangan kehidupan sosial kemasyarakatan dan keagamaan, kebutuhan akan peningkatan kualitas hidup wilayah setempat.

Untuk dapat memenuhi kebutuahn-kebutuhan tersebut maka daerah setempat dimungkinkan untuk dapat memenuhinya dengan kegiatan penyelenggaraan pendidikan yang orrientasinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan daerah setempat sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Permasalahan yang sering muncul dalam pemenuhan kebutuhan tersebut adalah dimana daerah tersebut tidak memiliki sumber daya yang cocok atau ketika adapun orang yang sesuai biasanya mereka enggan untuk meneruskan pekerjaan orang tuanya atau masyarakat lainnya dikarenakan mencari

penghidupan yang baru dan kelihatannya memberikan baillkan finansial yang lebih memadai. Kendala lainnya adalah perubahan sikap dan pemahaman tentang orientasi setelah menyelesaikan pendidikan dan dunia pekerjaan yang harus diraihnya dengan proses dan harapan-harapan yang dimunculkan selama mengikuti pendidikan.

Beberapa contoh program dalam pelaksanaan Community Based Education seperti dikemukakan oleh Thomas R. Owens dalam tulisannya yang berjudul *Community Based Learning: A Foundation for Maningful Education Reform* seperti :

- a) *Service Learning* ; metode dalam proses belajar mengajar dimana pertama; anak-anak belajar dan bekerja dengan partisipasi aktif dengan memeberikan pengalaman yang menemukan kebutuhan di masyarakat yang dikoordinasikan oleh sekolah dan masyarakatnya, kedua ; secara terintegrasi dalam kurikulum akademis atau menyediakan sejumlah waktu yang terstruktur untuk anak guna berfikir, berkata, atau menuliskan apa yang ditemuka selama beraktivitas dalam lingkungannya, ketiga ; menyediakan waktu untuk anak untuk digunakan sesuai dengan tuntutan akademik dan pengetahuan dalam situasi yang sebenarnya di lingkungannya, keempat ; memperbesar kesempatan yang diperoleh di sekolah dan dimasyarakatnya untuk di sebarakan kepada siswa lainnya.
- b) *Experience Based Career Education* ; di desain guna menjembatani kesenjangan antara teori dan pengalaman juga antara sekolah dan masyarakatnya.
- c) *Cooperative Education* ; Kerjasama antara sekolah dengan masyarakatnya melalui program-program yang diselenggarakan di sekolah dan program-program yang diselenggarakan oleh masyarakat sekitarnya.
- d) *Tech Prep* ; penyiapan untuk bekerja dengan focus kepada teknologi yang dikembangkan.
- e) *School-to-Work* ; mempersiapkan peserta didik sesuai dengan minatnya masing-masing melalaui pelatihan pekerjaan dengan mempertemukan antara guru, pelatih, pekerja dan lain-lainnya secara langsung.
- f) *Youth Apprenticeship* ; model penyelenggaraan melalaui pelatihan yang diberikan secara langsung dengan bekerja sama dengan lembaga terkait seperti departemen keuangan dan lain-lainnya.

Dengan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi di Indonesia maka model-model yang dikemukakan di atas dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan sepanjang sisi regulasi dan kesiapan berbagai komponen lainnya dipersiapkan dengan baik. Karena pada dasarnya model-model tersebut diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan yang berkembang.

Tujuannya akhirnya (outcomes) yang diharapkan dari model-model kegiatan tersebut adalah mengarah kepada peningkatan dari sisi akademik, penyiapan karier dan pekerjaan peserta didik, pengembangan kemampuan personal dan sosial peserta didik, memberikan nilai-nilai dalam pelayanan pekerjaan bukan hanya siap bekerja, dan memahami serta dapat memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada dilingkungannya. Seperti di kemukakan oleh Thomas R. Owens hasil yang diperoleh berupa tiga ranah pengembangan yaitu ; 1) Personal Growth and development, 2) intellectual development and academic learning, 3) social growth and development.

C. Prinsip-Prinsip Pelaksanaan Pendidikan Berbasis Kewilayahan

Implementasi pendidikan berbasis kewilayahan di Propinsi Jawa Barat perlu diperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pengembangan pendidikan berbasis kewilayahan merefleksikan ciri, sifat dan kebutuhan dari masyarakat setempat.
2. Pendidikan disetiap Kabupaten/Kota selain memunculkan masing-masing kekhasan wilayah, juga merupakan bagian terintegrasi ke dalam Pendidikan Kewilayahan Propinsi Jawa Barat.
3. Adanya keseimbangan antara berbagai kepentingan serta adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara pusat dan daerah, serta keserasian pembagian antar sektor dalam rangka penyusunan pengembangan pendidikan.
4. Kebutuhan Pengembangan Pendidikan di Propinsi Jawa Barat selain mengarah kepada peningkatan efektivitas dan efisiensi program *Life Skill* juga mengembangkan muatan lokal yang berbasis budaya lokal.
5. Kompetensi lulusan dari lembaga persekolahan yang diselenggarakan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah baik pada tingkat

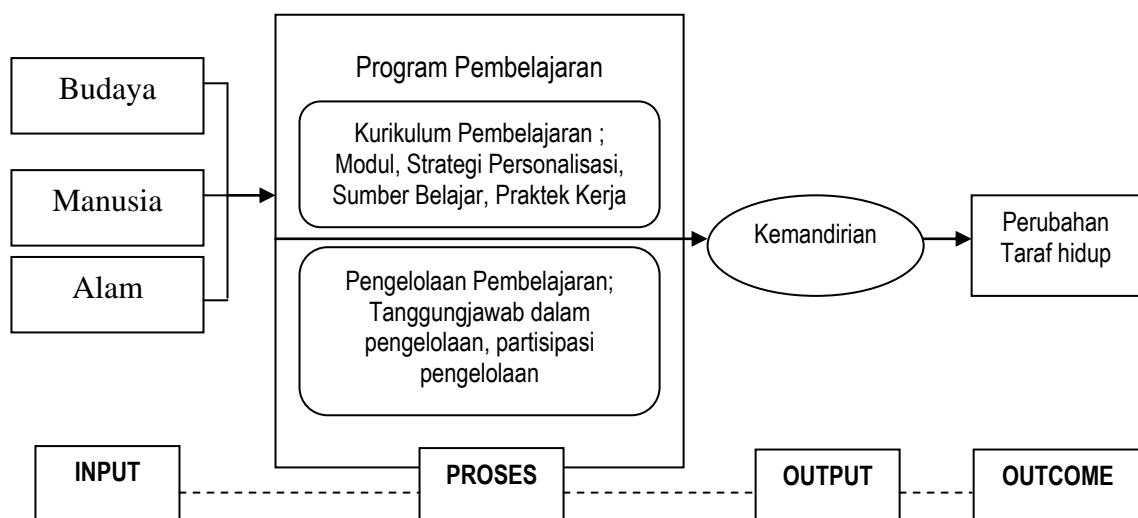
pendidikan dasar dan juga tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.

6. Keberhasilan pelaksanaan Pendidikan Berbasis Kewilayahan bergantung kepada sinergitas diantara pihak-pihak terkait dimulai dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Tingkat kabupaten melalui Dinas-dinas terkait dengan Pemerintah Daerah Setempat dalam hal ini Desa, Kecamatan dan Masyarakat Setempat.
7. Pengendalian program-program pembangunan pendidikan daerah harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan.

D. Mekanisme Pelaksanaan

1. Perencanaan

- a. Dinas Pendidikan sebagai leading dalam bidang pendidikan bekerjasama dengan Dinas lainnya di lingkungan Pemerintahan, juga dengan unsur masyarakat (perusahaan/perorangan) untuk mengelola pendidikan.
- b. Dengan pola kemitraan sejajar menempatkan lembaga lainnya ikut bertanggungjawab dalam mengelola pendidikan yang diselenggarakan bersama.
- c. Pengembangan model pendidikan berbasis kewilayahan memerlukan kajian mendalam berdasarkan ciri, potensi, dan keunggulan daerah masing-masing;



2. Pelaksanaan

b. Kurikulum

- 1) Kurikulum Pendidikan Dasar, Menengah Umum, Menengah Kejuruan, Pendidikan Luar Sekolah, dan Pendidikan Tinggi adalah Kurikulum Nasional yang diberlakukan.
- 2) Kurikulum tambahan sebagai suplemen yaitu kurikulum muatan lokal yang membekali anak dengan keterampilan-keterampilan yang menjadi ciri khas daerah setempat.
- 3) Kurikulum pendidikan tinggi mengacu kepada kurikulum nasional penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.
- 4) Kurikulum Pendidikan Luar Sekolah sesuai dengan kurikulum yang diberlakukan untuk berbagai jenis kegiatan pendidikan luar sekolah nasional.

c. Ketenagaan

- 1) Tenaga Pendidik adalah guru-guru pada sekolah yang bersangkutan sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- 2) Tenaga instruktur untuk pendidikan luar sekolah adalah tenaga yang ada dan pengangkatan baru sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Tenaga Pendidik di Perguruan Tinggi adalah Tenaga Dosen yang diangkat oleh Pemerintah Pusat dan daerah Serta Dosen Luar Biasa yang diperbantukan.
- 4) Pemerintah daerah mengangkat atau membantukan sumber daya manusia setempat yang potensial setempat untuk menjadi tenaga pengajar dalam bidang yang dikuasainya pada Pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Tenaga non kependidikan disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan kebutuhan.

d. Peserta Didik

- 1) Peserta didik pada setiap tingkatan/jenjang pendidikan adalah masyarakat setempat dan sekitar wilayah pengembangan yang memiliki potensi pengembangan yang sama dengan wilayah percontohan.

- 2) Peserta didik pada tingkat menengah diseleksi secara khusus yang memiliki ketertarikan/minat dalam pekerjaan yang sesuai dengan minat dan potensi daerah.
- 3) Peserta didik tingkat tinggi adalah hasil seleksi dan program-program kerjasama dengan lembaga pemerintahan.
- 4) Peserta didik/warga belajar pada pendidikan luar sekolah warga masyarakat yang tidak tertampung pada pendidikan formal atau program khusus untuk kepentingan pekerjaan dan melanjutkan seperti persamaan.

e. Pembiayaan

- 1) Pemerintah pusat dan daerah sebagai penanggungjawab dalam penyediaan dana untuk penyelenggaraan pendidikan.
- 2) Pemerintah daerah melalui dinas terkait seperti dinas perindustrian perdagangan dan penanaman modal, dinas kesehatan dan dinas pariwisata ikut bertanggungjawab.
- 3) Pemerintah setempat dengan masyarakat sebagai partisipan dan memberikan kontribusi dalam pembiayaan kegiatan pendidikan.

f. Fasilitas

- 1) Fasilitas pembelajaran ; pemerintah pusat melalui pemerintah daerah setempat menyediakan gedung yang memenuhi persyaratan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah.
- 2) Fasilitas pembelajaran ; pemerintah daerah setempat memanfaatkan fasilitas yang dimiliki untuk dijadikan sebagai tempat kegiatan belajar mengajar.
- 3) Fasilitas pendukung ; pemerintah daerah setempat dan dinas-dinas terkait (Kesehatan, Perindustrian Perdagangan dan penanaman modal, pariwisata) menjalin kerjasama dengan masyarakat dalam memanfaatkan sumber-sumber belajar yang ada di masyarakat.

g. Model Kerjasama

- 1) Kerjasama dalam pengelolaan ; secara horizontal melalui dinas pendidikan kabupaten/kota sebagai penanggungjawab yang melakukan koordinasi dengan dinas lainnya seperti tenaga kerja,

kesehatan, perindustrian perdagangan dan penanaman modal dalam pengelolaan pendidikan yang mencakup bidang garapan tentang kurikulum ,kesiswaan, ketenagaan, pembiayaan, fasilitas dan pengembangan hubungan dengan masyarakat, dan vertical melalaui dinas terkait kepada dinas pendidikan propinsi.

- 2) Kerjasama dalam ketenagaan dengan lembaga terkait seperti dinas perindustrian perdagangan dan penanaman modal, dinas tenaga kerja, dinas kesehatan, dinas pariwisata, dinas pertanian, dan lain-lain dapat berupa penyediaan tenaga ahli yang dimiliki oleh lembaga tersebut untuk ditugaskan di sekolah.
- 3) Kerjasama dalam pemanfaatan output ; kerjasama dilakukan dengan pelaku dalam bidang dunia usaha dan industri, pertanian, perdagangan dan lain-lain dalam menyalurkan lulusan.
- 4) Kerjasama yang dilakukan dengan masyarakat luas secara perorangan terutama dalam pemanfaatan sumber-sumber dimasyarakat yang dimiliki secara perorangan yang dapat dipergunakan untuk kegiatan pendidikan baik yang dipinjamkan ataupun dalam bentuk hibah.
- 5) Kerjasama dalam menjaga kelanggengan kegiatan pendidikan melalui penanaman kepercayaan untuk menyekolahkan anak-anaknya.

h. Model Pertanggungjawaban

- 1) Pertanggungjawaban internal

Secara periodik pertanggungjawaban secara internal diantara pihak-pihak penyelenggara pendidikan secara horizontal dan vertical kepada lembaga terkait yang berada di tingkat propinsi

- 2) Pertanggungjawaban eksternal

Pertanggungjawaban juga diberikan kepada publik dalam bentuk laporan-laporan periodik yang dapat diakses oleh masyarakat umum dengan memanfaatkan media tulisan dan media elektronik umum.

3. Monitoring dan Evaluasi

a. Tujuan

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi bertujuan untuk memastikan bahwa dana telah disalurkan tepat sasaran, diterima sesuai dengan jumlah

bantuan yang disalurkan, serta dimanfaatkan sesuai petunjuk pelaksanaan, dan proses pelaksanaan program penyelenggaraan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi adalah:

- 1) mengetahui apakah kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan
- 2) mengetahui apakah ada masalah-masalah yang berkaitan dengan manajemen kegiatan
- 3) dapat memberikan rekomendasi cara-cara penyelesaian masalah
- 4) memberikan masukan untuk perbaikan program

b. Pelaksana

Pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi adalah Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dengan melibatkan unsur lembaga *independent professional* dan kredibel seperti Lembaga Pendidikan Tinggi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota yang diberikan kewewenangan untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.

c. Jadwal pelaksanaan

Monitoring dilakukan mengikuti alur pemikiran system yaitu pada input, proses dan output.

d. Evaluasi

Kegiatan monitoring memberikan informasi bagi pengambilan keputusan. Hasil monitoring dianalisis, diinterpretasikan dan dibandingkan dengan standar atau kriteria pencapaian suatu program.

Evaluasi terhadap program dilakukan oleh masing-masing unsur terkait mencakup evaluasi terhadap persiapan, proses pelaksanaan dan produk dari implementasi program.

Hasil evaluasi memberikan informasi tentang perancangan, pelaksanaan dan produk kegiatan itu sudah berjalan dengan benar, akurat dan berguna. Hal ini menjadi masukan bagi pengambilan tindak lanjut kegiatan apakah harus direvisi, dihentikan atau dilanjutkan.

BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KELUARGA

A. Rasional

Pendidikan mempunyai peran sentral dan strategis dalam peningkatan sumberdaya manusia, sebab kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai manusia secara individu maupun kelompok dibentuk melalui pendidikan. Melalui pendidikan diharapkan dapat membekali manusia menjadi cerdas, terampil, dan bertanggung jawab. Karakteristik sumber daya manusia yang diperlukan adalah: integritas, inisiatif, intelegensia, keterampilan sosial, penuh daya, imajinasi, keluwesan, antusiasme, rasa kepentingan, dan pandangan yang mendunia (Hery Simaora:1995).

Mengacu pada UUSPN No 20 tahun 2003 pasal 13 ayat 1, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal, yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Rujukan tersebut memberi keyakinan pentingnya posisi pendidikan luar sekolah, yang diharapkan dapat bersama-sama dengan pendidikan sekolah dalam menangani berbagai persoalan bangsa, terutama dalam menyiapkan sumber daya manusia yang handal.

Strategi penanganan berbagai program PLS diupayakan melalui *Empowering* dengan *Community Based Education*. Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya dirancang oleh masyarakat untuk membelajarkan masyarakat, sehingga mereka berdaya, dalam arti memiliki kekuatan untuk membangun dirinya sendiri melalui interaksi dengan lingkungannya. Berdasarkan hal tersebut, konsep pendidikan berbasis masyarakat menjadi: "dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat". Dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, diupayakan dapat memanfaatkan sarana, prasarana dan potensi yang ada di sekitar lingkungan masyarakat, sehingga masyarakat diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Secara empirik, penduduk Jawa Barat menurut Suseda Tahun 2004 sebesar 39.140.812 orang, dengan presentase pendidikan SD ke bawah sebesar 64,73%, tamat SMP 16,77%, tamat SMA/SMK 15,30%, dan 3,20% tamat Perguruan Tinggi. Berdasarkan pendataan Keluarga tahun 2003, jumlah Keluarga

Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I alasan ekonomi, tercatat 2.664.478 aau 27,81% dari seluruh keluarga (9.580.388 KK).

Pendidikan berbasis masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi keluarga merupakan upaya mengakselerasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat dalam bidang ekonomi (daya beli). Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Jawa Barat 2003-2008, antara lain: a) memobilisasi sumber daya untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan, b) mengembangkan ekonomi daerah melalui pengembangan *core business* berdasarkan potensi lokal untuk mengurangi diparitas kesejahteraan antar wilayah dan antar golongan, c) memanfaatkan infrastruktur wilayah dalam rangka mendukung pemerataan dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, d) mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui keseimbangan penduduk dan lingkungan dalam kesatuan ruang, e) meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta apresiasi terhadap budaya daerah, f) menguatkan tatanan masyarakat dan lingkungan sosial untuk mendukung terpeliharanya ketrtiban umum.

B. Konsep Dasar

1. Pendidikan Berbasis Potensi Lokal

a. Potensi Lokal

Potensi lokal pada intinya merupakan sumber daya yang ada dalam suatu wilayah tertentu. Potensi lokal berkembang dari tradisi kearifan yang dimiliki oleh suatu masyarakat yang bersahaja sebagai bagian dari kebudayaannya. Potensi lokal adalah semua jenis sumber daya yang ada pada suatu lingkungan masyarakat, yang bermanfaat untuk meningkatkan taraf kehidupan. Potensi lokal adalah faktor-faktor dominan atau potensi yang dimiliki atau ditemukan pada suatu daerah tertentu yang tidak atau kurang dimiliki oleh daerah lainnya.

Potensi lokal dapat menjadi kekuatan yang memberikan otoritas pada anggota masyarakat untuk memanfaatkan dalam kehidupannya. Potensi lokal dapat menjadi daya dukung bagi aktivitas manusia. Dalam memanfaatkan potensi lokal tergantung pada kemampuan sumber daya manusianya, karena sumber daya manusia memegang peranan penting dalam memelihara keberlangsungan sumber daya yang dimilikinya.

Potensi lokal dapat dijadikan alat untuk mempertahankan diri, baik secara sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun spiritual.

Melalui potensi lokal dapat mempertahankan diri dalam bidang sosial dan budaya. Hal ini mengandung makna bahwa dengan memanfaatkan potensi lokal dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat yang lemah posisinya, serta meningkatkan upaya bagi masyarakat yang memiliki ketidakberdayaan. Hal ini memerlukan adanya kelembagaan jaminan sosial bagi masyarakat, yang dapat dilakukan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha.

Dalam bidang ekonomi, melalui potensi lokal dapat membangun kelembagaan sosial ekonomi yang mampu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapat lapangan kerja dan pendapatan yang layak, martabat dan eksistensi pribadi. Melalui pemanfaatan lokal, diharapkan dapat memperbaiki kegiatan ekonomi riil yang kondusif. Dalam hal ini dapat menjamin kegiatan usaha ekonomi masyarakat lebih kompetitif dan menguntungkan, yang diawali dengan pemberdayaan ekonomi keluarga.

Dalam bidang politik, melalui potensi lokal dapat menciptakan iklim politik yang terbuka dan demokratis. Melalui potensi lokal yang dimiliki, diharapkan dapat meningkatkan rasionalitas dan kemandirian masyarakat kecil terhadap kehidupan politik. Hal ini dapat diwujudkan dalam: melindungi masyarakat kecil terhadap penetrasi politik, pematangan kesadaran politik, serta mengembangkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat. Masyarakat tidak lagi merasa takut dan aneh apabila dilibatkan dalam politik, sebab politik merupakan salah satu bagian dari kehidupannya.

Pengembangan spiritual merupakan suatu hal yang sangat esensial dan fundamental dalam rangka mengemban misi untuk: menyiapkan kerangka landasan bagi pembina akhlak mulia, dan menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas. Spritual dapat merupakan landasan bagi seseorang untuk berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Ciri-ciri Potensi Lokal

Potensi lokal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Potensi lokal yang ada pada lingkungan suatu masyarakat, keberadaannya tidak tertulis. Hal ini mengandung makna bahwa potensi lokal yang ada di

masyarakat tidak terbentuk dalam tulisan, tetapi masyarakat merasakan keberadaannya.

- 2) Masyarakat merasa memiliki potensi lokal. Hal ini berdasarkan pada pemikiran bahwa masyarakat merupakan bagian yang menyatu dengan lingkungan dimana mereka hidup. Dengan adanya rasa memiliki, masyarakat dituntut mampu memanfaatkan potensi lokal dengan penuh tanggung jawab.
- 3) Potensi lokal secara mendalam bersatu dengan alam. Hal ini mengandung makna bahwa potensi lokal yang dimiliki oleh daerah tertentu tidak terlepas dari alam lingkungannya.
- 4) Memiliki sifat universal. Hal ini mengandung makna bahwa setiap daerah pada prinsipnya mempunyai potensi lokal secara umum, yang terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, tetapi dalam wujudnya masing-masing daerah memiliki kekhasan dari potensi lokal yang dimilikinya.
- 5) Lebih bersifat praktis. Hal ini mengandung makna bahwa potensi lokal sifatnya lebih praktis yang dapat dirasakan oleh masyarakat untuk dimanfaatkan dalam kehidupannya
- 6) Mudah difahami dengan menggunakan *common sense*. Berbagai jenis potensi lokal yang tersedia mudah difahami keberadaannya sehingga setiap orang dapat merasakan keberadaannya tanpa melalui penelitian ilmiah.
- 7) Merupakan warisan turun temurun. Potensi lokal dapat dirasakan keberadaannya oleh masyarakat secara turun temurun berdasarkan peradaban umat manusia.

Menurut Sudjana (2000), sumber daya lokal sebagai masukan lingkungan merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan program PLS apabila ditinjau dari pendekatan sistem. Hal ini terjadi, karena masukan lingkungan mempunyai kontribusi yang mendukung untuk berlangsungnya proses pendidikan.

c. Jenis Potensi Lokal

Sudjana (2000), menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sangat membantu dalam proses pembelajaran. Sumber-sumber tersebut meliputi: (1) sumber daya manusia, (2) sumber daya alam, (3) sumber daya budaya, (4) sumber daya teknologi.

Sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya yang dapat mempengaruhi terhadap berlangsungnya proses pembelajaran secara maksimal. Sumber daya manusia adalah aset yang penting untuk memanfaatkan sumber daya lainnya dalam kegiatan pembelajaran.

Mengacu kepada pendapat Sudjana (2000), sumber daya alam mencakup sumber daya hayati, sumber daya non hayati, dan sumber daya buatan. Sumber daya hayati yaitu flora dan fauna, sumber daya non hayati yaitu tanah, air, udara, energi, mineral. Sumber daya buatan yaitu sumber daya alam yang telah diolah oleh sumber daya manusia untuk kepentingan kehidupan, seperti: waduk, jalan, pasar, panti pendidikan dan pemukiman.

Dengan keanekaragaman budaya yang ada di masyarakat, dapat merupakan potensi yang dapat digali untuk dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran. Budaya lokal harus dijadikan modal dasar untuk pembelajaran bagi masyarakat setempat, sehingga warga belajar dapat mengenal akar budayanya sendiri.

Untuk menjadi masyarakat maju, teknologi sebagai hasil budaya manusia dapat digunakan untuk mempermudah dalam menyerap berbagai informasi. Teknologi berkaitan erat dengan alat dan sistem yang dapat digunakan oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pemilihan dan penggunaan teknologi, baik berupa alat atau sistem untuk pembelajaran, yang paling tepat harus disesuaikan situasi dan kondisi. Dengan penggunaan teknologi diharapkan dapat mempermudah berlangsungnya proses pembelajaran, hal ini sesuai dengan pengertian teknologi itu sendiri, yaitu merupakan cara untuk mempermudah pencapaian tujuan.

Senada dengan pendapat Sudjana, BP-PLSP Regional II (2004), mengembangkan tentang jenis sumber daya lokal, yaitu: (1) potensi alam, (2) potensi manusia, (3) potensi budaya, (4) potensi teknologi, (5) potensi pasar, (6) potensi lembaga keuangan, (7) potensi kemitraan.

Keberadaan sumber daya alam yang menyangkut kondisi geografis dapat dimanfaatkan sesuai dengan perkembangan budaya manusia.

Manusia sebagai kunci utama dalam mengolah dan mengendalikan sumber daya atau potensi, agar keberadaannya menjadi seimbang, meningkat, lebih bermutu dan optimal. Hal tersebut memerlukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang sesuai, memadai, dan terus menerus diberdayakan.

Nilai-nilai budaya luhur dapat dijadikan kontribusi positif dalam pembelajaran, diantaranya disiplin, gotong royong, pantang menyerah.

Teknologi merupakan keunggulan untuk mempengaruhi percepatan dan mutu hasil yang diperoleh dari suatu proses.

Sumber daya yang berkaitan dengan pemasaran, yaitu produk yang paling banyak diminati atau dikonsumsi.

Potensi lembaga keuangan berkaitan erat dengan pendanaan atau permodalan dari jenis usaha yang ditekuni. Contohnya adalah keberadaan bank, koperasi.

Potensi kemitraan adalah jalinan kerjasama antara satu pihak atau lembaga lain yang saling menguntungkan. Keberadaan potensi ini akan mempengaruhi kelancaran hasil usaha.

2. Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Pemberdayaan adalah berkaitan dengan upaya pengembangan diri, yakni pengendalian internal dan praktik pemecahan masalah secara bebas. Proses pemberdayaan tidak hanya meliputi pemberdayaan individu saja, melainkan juga upaya untuk memberdayakan orang lain.

Pemberdayaan mengandung makna sebagai suatu proses mendukung masyarakat untuk membangun makna baru dan melatih kebebasan untuk memilih. Kindervatter (1979) menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan perolehan pemahaman dan pengendalian kekuatan sosial, ekonomi, dan/atau politik untuk memperbaiki keberadaannya di masyarakat. Memperbaiki keberadaan individu di masyarakat berarti mendorong individu untuk menilai sendiri perolehan sosial dalam bidang: (a) akses, (b) pengungkitan, (c) pilihan, (d) status, (e) kemampuan refleksi kritis, (f) legitimasi, (g) disiplin, (h) persepsi kreatif. *Akses*, berkaitan dengan adanya peluang yang lebih besar di dalam memperoleh sumber daya. *Pengungkitan* berkaitan dengan peningkatan kekuatan tawar menawar secara kolektif. *Pilihan* berkaitan dengan kemampuan dan peluang untuk memilih diantara berbagai pilihan. *Status* berkaitan dengan upaya memperbaiki citra diri, harga diri, dan rasa identitas kultural yang positif. *Kemampuan refleksi kritis* berkaitan dengan penggunaan pengalaman untuk mengakses secara akurat keuntungan potensial atas pilihan pemecahan masalah. *Legitimasi* berkaitan dengan tuntutan masyarakat kepada pemerintah secara adil

dan rasional. *Disiplin* berkaitan dengan standar penentuan diri untuk bekerja bersama dengan orang lain secara produktif. *Persepsi kreatif* berkaitan dengan pandangan tentang hubungan seseorang dengan lingkungannya secara lebih positif.

Pemberdayaan merupakan upaya menumbuhkan keinginan pada seseorang untuk mengaktualisasikan diri, melakukan mobilitas ke atas, dan memberikan pengalaman psikologis yang membuat seseorang berdaya. Keinginan untuk mengubah keadaan yang datang dari dalam diri seseorang itu dapat muncul jika dia merasa berada di dalam situasi tertekan dan kemudian menyadari atau mengetahui tekanan tersebut. Produk akhir dari proses pemberdayaan yaitu masyarakat memperoleh pemahaman dan mampu mengontrol daya-daya sosial, ekonomi, dan politik, agar bisa meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat.

Peningkatan kedudukan di masyarakat tersebut oleh Kindervatter (1979) dimaksudkan meliputi keadaan-keadaan sebagai berikut:

- a. Akses (*accesses*), memiliki peluang yang cukup besar untuk mendapatkan sumber-sumber daya
- b. Daya pengungkit (*leverage*), meningkat dalam hal daya tawar kolektifnya
- c. Pilihan-pilihan (*choices*), mampu dan memiliki peluang memilih berbagai pilihan
- d. Status (*status*), meningkat citra diri, kepuasan diri, dan memiliki perasaan yang positif atas identitas budayanya
- e. Kemampuan refleksi kritis (*critical reflection capability*), menggunakan pengalaman untuk mengukur potensi keunggulannya atas berbagai peluang pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah
- f. Legitimasi (*legitimation*), ada pertimbangan ahli yang menjadi justifikasi atau yang membenarkan terhadap alasan-alasan nasional atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat
- g. Disiplin (*discipline*), menetapkan sendiri standar mutu pekerjaan yang dilakukannya untuk orang lain
- h. Persepsi kreatif (*creative perceptions*), sebuah pandangan yang lebih positif dan inovatif terhadap antar hubungan dirinya dengan lingkungannya

Selanjutnya Kindervatter (1997) menyatakan bahwa proses pemberdayaan berlangsung dalam tiga tahapan. *Pertama*, individu

mengembangkan kesadaran awal untuk mengambil tindakan dalam rangka memperbaiki kehidupannya dan memperoleh pelbagai keterampilan yang mungkin dapat dilakukan. *Kedua*, melalui tindakan yang diambil, keberdayaan dan kepercayaannya semakin meningkat. *Ketiga*, karena keterampilan dan kepercayaannya semakin terus berkembang, individu mampu bekerja sama untuk melaksanakan keputusan dan memperoleh sumber daya yang mempengaruhi kesejahteraannya. Lebih jauh Kindervatter menguraikan delapan langkah PLS sebagai pemberdayaan, yaitu:

Langkah Pertama, menyusun kelompok kecil sebagai penerima awal atas rencana program pemberdayaan. Untuk memulai suatu program PLS, agen perubahan harus menemukan terlebih dahulu dua sampai tiga orang sebagai perencana. Para calon perencana harus: (a) memiliki tanggung jawab terhadap perencanaan program dan implementasinya, (b) tertarik terhadap model pendekatan, bahwa pelibatan warga belajar dalam pemecahan masalah adalah penting.

Langkah kedua, mengidentifikasi/membangun kelompok peserta belajar tingkat wilayah. Pemecahan masalah secara kolektif merupakan dasar proses pemberdayaan, sehingga pengorganisasian kelompok peserta belajar harus diciptakan dengan fungsi utama tersebut.

Langkah ketiga, memilih dan melatih fasilitator kelompok. Fasilitator menciptakan potensi untuk proses pemberdayaan, sehingga perlu dipilih dan dilatih secara hati-hati. Fasilitator diupayakan berasal dari komunitas yang sama dengan warga belajar, serta menerima ide tentang cara membantu masyarakat dalam mengerjakan sesuatu oleh mereka sendiri.

Langkah keempat, pengaktifan kelompok. Kelompok belajar dilibatkan dalam merumuskan masalah dan minat, memulai mengidentifikasi sumber-sumber belajar, dan menyusun perencanaan kegiatan awal kelompok.

Langkah kelima, menyelenggarakan pertemuan-pertemuan fasilitator. Dalam pertemuan tersebut harus mampu menciptakan tukar menukar informasi di antara mereka, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, dan mengelola tujuan-tujuan atau kebutuhan yang mereka rasakan bersama.

Langkah keenam, mendukung aktivitas kelompok yang telah berjalan. Dalam tahap awal, aktivitas para peserta mulai memutuskan apa dan bagaimana mereka belajar, berbasis pada karakteristik minat dan masalah mereka sendiri.

Langkah ketujuh, mengembangkan hubungan di antara kelompok. Beberapa masalah yang dipilih anggota kelompok untuk diselesaikan, mungkin akan sangat besar peluangnya untuk diselesaikan apabila beberapa kelompok membentuk koalisi.

Langkah kedelapan, menyelenggarakan sebuah lokakarya untuk mengawasi. Hal ini perlu dilaksanakan yaitu untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, serta untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan berikutnya.

Dihubungkan dengan ekonomi keluarga, diharapkan masyarakat memiliki kesadaran bahwa dirinya memiliki kemampuan yang dapat terus diasah melalui pendidikan, sehingga akhirnya memiliki keterampilan tertentu yang dapat dijadikan modal berwirausaha, sehingga dapat menambah penghasilan keluarganya.

3. Pendidikan Berbasis Potensi Lokal sebagai Proses Pemberdayaan dalam Konteks Kewirausahaan

Pemberdayaan perlu lebih difokuskan pada upaya membantu masyarakat, sehingga mereka senantiasa mau dan mampu belajar. Belajar dalam hal ini bukan hanya sekedar untuk mengetahui sesuatu, melainkan belajar untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan. Belajar masyarakat yang perlu ditumbuhkan yaitu pada kebiasaan belajar baru untuk mengantisipasi dan berbuat secara bersama ke arah kemajuan kehidupan di masa depan.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan perlu didasari niat ibadah, memiliki minat dan kepedulian terhadap kemanusiaan, masyarakat, pembangunan dan permasalahannya. Kemudian bersedia membantu secara ikhlas dan sukarela supaya masyarakat mau belajar untuk kemajuan dirinya. Para pelaksana hendaknya tidak mengerjakan sendiri untuk masyarakat, tetapi bekerja sama dan berpartisipasi dengan masyarakat dalam membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dalam meningkatkan kemampuan mereka untuk memajukan kualitas hidup dan kehidupannya melalui wirausaha.

Program pemberdayaan yang berorientasi pada pembangunan masyarakat, para pelaksana tidak memaksakan kehendaknya kepada masyarakat, tetapi mampu membangkitkan minat dan kebutuhan mereka untuk berkeinginan terhadap adanya perubahan ke arah yang lebih baik.

Para pelaksana pemberdayaan yang menjadi khalayak sasaran, berusaha untuk mencapai perubahan ke arah tujuan yang mereka sepakati bersama. Keputusan tentang perubahan yang diinginkan tersebut, harus ditentukan dan diputuskan oleh masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar mereka bersedia melaksanakannya, dan diharapkan akan berpartisipasi dalam wujud buah fikiran, tenaga, dan harta benda yang mereka miliki.

Sikap hidup seseorang yang menjadi nilai atau ciri kepribadiannya, memainkan peran kritis dalam merespon sesuatu. Sikap-sikap seseorang mempengaruhi kesediaan berpartisipasi dalam kegiatan tertentu, dan cara merespon orang-orang, objek, atau situasi di lingkungannya. Kesediaan ikut serta mengambil bagian, merupakan unsur penting dari belajar efektif. Sikap mental seseorang dapat terbentuk melalui intensitas pengalaman proses belajar, termasuk belajar berwirausaha.

Agar proses pembelajaran berlangsung interaktif, sikap-sikap dan kualitas pribadi warga belajar, seperti: ingin tahu, patuh, toleran, kritis, tabah, kreatif, terbuka, sensitif kepada lingkungan kehidupan dan alam, kooperatif dengan orang lain, perlu terus dikembangkan. Rasa ingin tahu merupakan suatu unsur penting untuk belajar, karena dapat membantu seseorang memperoleh pengalaman baru dan mengeksplorasi sesuatu di lingkungannya, memungkinkan dirinya memetik manfaat peluang yang ada. Rasa ingin tahu seseorang dapat dibangkitkan dan dikembangkan dengan memberi peluang bertanya, memberi semangat dan dorongan yang memungkinkan mau mengungkapkan rasa ingin tahunya dan pengalamannya. Kepatuhan bertalian dengan kemampuan memperoleh informasi atau gagasan baru. Hasrat ingin tahu memberikan basis dan kesediaan menerima gagasan sebagai suatu sikap fleksibel dan gagasan yang diterima berkembang sejalan dengan perkembangan pengalaman baru yang diterimanya. Kesediaan menerima ide merupakan suatu sikap terbuka dan konsisten. Refleksi kritis dapat meningkatkan *learning potentials* dari pengalaman, *abstrak thinking*, *critical review*, dengan memahami berbagai alternatif.

Menurut Zimmerman (1993), sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan adalah sebagai berikut: (a) berminat dan menanggapi gejala disekitar kehidupannya yang didalamnya individu-individu berperilaku secara sistemik, (b) kemampuan seseorang yang bekerja dengan

penuh imajinasi, (c) mempunyai keyakinan dan teguh pada penilaian dan pendirian, (d) memiliki kepuasan dalam menghadapi persoalan, (e) memiliki rasa tanggung jawab untuk berprestasi, dan (f) penuh daya imajinasi dan memiliki kecerdasan.

Supaya berhasil dalam usahanya, seorang wirausaha pemula, perlu: (a) mengidentifikasi tujuan yang akan dicapai, (b) mempersiapkan diri mengatasi resiko yang mungkin dihadapi, seperti: keuangan, waktu, dan lainnya, (h) meyakinkan dirinya mampu membuat rencana, mengorganisasi, mengkoordinasi, dan mengimplementasikannya, (d) berpegang teguh pada prinsip kerja keras sepanjang waktu dan memandang keberhasilan usahanya sebagai sesuatu yang penting dan berharga, (e) berkreasi dan berinovasi akan kehidupan kewirausahaannya, (g) bersedia menerima tantangan, bekerja mandiri dan penuh tanggung jawab atas berhasil tidaknya usaha yang dijalankan, (h) berusaha memindahkan sumber-sumber daya yang produktivitas dan hasilnya rendah ke daerah yang produktivitas dan hasilnya tinggi, dan (i) memadukan kemampuan, pengetahuan, keterampilan, peluang, keuangan, dengan sumber-sumber daya yang ada di lingkungannya untuk meraih sesuatu yang berguna.

C. Prinsip-prinsip Pendidikan Berbasis Potensi Lokal

Prinsip-prinsip pendidikan berbasis potensi lokal adalah:

1. Pendekatan kemanusiaan, yaitu bahwa warga belajar sebagai subyek dalam pembelajaran, sehingga warga belajar mempunyai kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Warga belajar tidak lagi dipandang sebagai individu yang kosong, tidak tahu dan tidak terampil apa-apa, tetapi warga belajar merupakan sosok individu yang memiliki kemampuan untuk dikembangkan lebih lanjut
2. Kemitraan dalam mengembangkan berbagai potensi yang ada di desa/daerah perlu dilaksanakan antara berbagai pihak yang terkait. Dengan adanya kemitraan, maka akan terjalin kerjasama yang harmonis untuk saling mendukung dalam hal pemanfaatan potensi yang ada untuk dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan pembelajaran
3. Pendekatan edukatif dan partisipasi dalam menggali potensi yang ada di daerah dapat meningkatkan peran serta setiap pihak untuk

mengembangkannya, sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembelajaran.

4. Berkelanjutan, melalui pendekatan ini diharapkan semua potensi yang dimiliki terus tergali, sehingga pemanfaatannya dapat digunakan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan.
5. Pendekatan sosial, budaya dan agama merupakan salah satu cara dalam menggali potensi yang ada di masyarakat. Budaya masyarakat banyak sekali jenisnya, tergantung dari daerah masing-masing, sehingga dengan keragaman budaya tersebut dapat merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan dan dikembangkan untuk kegiatan pembelajaran.

D. Mekanisme

Mekanisme yang ditempuh dalam pendidikan berbasis potensi lokal, ditempuh melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Perencanaan

Penyusunan perencanaan pendidikan berbasis potensi lokal harus melibatkan pengelola, tutor dan warga belajar. Komponen yang direncanakan menyangkut cara mengidentifikasi kebutuhan belajar dan potensi, cara perumusan tujuan, cara menentukan bahan/materi pembelajaran, cara penggalan sumber dana, cara penetapan metode, cara penggunaan media/alat bantu, cara penentuan waktu.

Cara mengidentifikasi kebutuhan belajar dapat dilakukan dengan cara: wawancara, observasi, diskusi kelompok, kartu SKBM. Wawancara dilakukan untuk menghimpun pendapat dari setiap warga belajar tentang kebutuhan belajarnya. Observasi dilakukan untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga dapat dijadikan sumber dalam pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar yang diungkapkan oleh warga belajar. Kart SKBM digunakan untuk menghimpun kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat.

Setelah mereka menentukan kebutuhan belajarnya, dilanjutkan dengan diskusi untuk menentukan prioritas kebutuhan belajar yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan potensi lokal yang ada.

Potensi lokal yang harus diidentifikasi menyangkut: potensi manusia, alam, budaya, teknologi, pasar, lembaga keuangan, kemitraan.

Cara perumusan tujuan pembelajaran harus melibatkan pengelola, tutor, dan warga belajar disesuaikan dengan materi yang akan dipelajari. Tujuan program dinyatakan dalam suatu rumusan mengenai tingkah laku warga belajar setelah menerima program tersebut. Keseluruhan proses pembelajaran yang terdiri dari berbagai komponen diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Tujuan pembelajaran merupakan komponen utama yang harus dirumuskan secara operasional tentang pencapaian kemampuan warga belajar yang diharapkan.

Cara penetapan metode harus dibicarakan bersama antara pengelola, tutor, dan warga belajar. Metode yang digunakan adalah metode yang lebih banyak melibatkan warga belajar, karena dalam pembelajaran lebih menitikberatkan pada *student centered*. Indikator dari *student centered* adalah: a) menitikberatkan pada keaktifan peserta didik, b) kegiatan pembelajaran dilakukan secara kritis dan analitik, c) pendidik berperan sebagai fasilitator.

Cara penentuan waktu ditentukan secara bersama antara pengelola, tutor, dan warga belajar, dengan didasari oleh kesiapan warga belajar.

Cara penggunaan alat bantu/media dibicarakan bersama antara pengelola, tutor, dan warga belajar, dengan beberapa indikator: kepraktisan dalam penggunaan, ketahanan dalam penggunaan, kemudahan dalam perolehannya, relatif murah sehingga dapat dijangkau oleh seluruh warga belajar. Penggunaan alat bantu/media memiliki nilai praktis dalam pembelajaran, hal ini mengacu pada pendapat Abdulhak (1995) adalah: a) media dapat mengatasi keterbatasan pengalaman warga belajar, b) media dapat mengatasi batas ruang kelas, c) media dapat memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara peserta dengan lingkungan, d) media dapat menghasilkan keseragaman pengamatan, e) media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, nyata, dan tepat, f) media dapat membangkitkan motivasi dan merangsang peserta untuk belajar dengan baik, g) media dapat membangkitkan keinginan dan minat baru, h) media dapat mengontrol kecepatan belajar peserta, i) media dapat memberikan pengalaman yang menyeluruh dari hal-hal yang kongkrit sampai abstrak.

Cara pelaksanaan evaluasi dibicarakan antara pengelola, tutor, dan warga belajar, sehingga diharapkan warga belajar mengetahui pencapaian keberhasilan belajar dirinya, serta mengetahui pencapaian program yang sudah dilaksanakan.

Komponen yang dievaluasi menyangkut program kegiatan serta hasil dan proses belajar yang sudah dicapai oleh warga belajar. Aspek-aspek yang perlu dinilai dalam suatu program secara garis besarnya adalah: a) persiapan program, b) kemungkinan tindak lanjut, c) kemungkinan modifikasi program, d) temuan tentang dukungan program dari masyarakat, e) temuan tentang hambatan program dari masyarakat, f) temuan yang berkaitan dengan keilmuan dan teknologi.

Efektifitas dan efisiensi perencanaan pembelajaran akan tercapai apabila warga belajar dilibatkan secara penuh. Perencanaan pembelajaran berbasis potensi lokal harus disusun dengan berdasarkan pada prinsip: a) kebutuhan, b) konsistensi, c) berdaya guna dan berhasil guna, d) menyeluruh.

Secara garis besar tahapan yang harus dilakukan dalam perencanaan pembelajaran berbasis potensi lokal adalah:

- a. mengidentifikasi berbagai potensi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran
- b. Mengembangkan program pembelajaran sesuai dengan prioritas kebutuhan belajar, yang terdiri dari: (1) perumusan tujuan yang akan dicapai, (2) penentuan tutor, (3) penentuan strategi dan metode yang akan digunakan, (4) penentuan media yang akan digunakan, (5) penentuan waktu kegiatan pembelajaran, (6) penentuan sarana, (7) penentuan tempat kegiatan, (h) penentuan pelaksanaan evaluasi.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Dalam proses pembelajaran diperlukan situasi dan kondisi interaktif edukatif antara tutor dengan warga belajar dan diantara warga belajar dalam iklim yang kondusif untuk saling membelajarkan dan suasana demokratis.

Dalam proses pembelajaran, warga belajar menjadi subyek pembelajaran, sehingga dalam pembelajaran lebih berorientasi pada *learner centered*. Pembelajaran yang berpusat pada warga belajar memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga belajar untuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, sehingga tutor berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi warga belajar dalam melakukan kegiatan

pembelajaran. Pembelajaran yang berorientasi kepada *student centered* akan menumbuhkan kreativitas warga belajar, karena warga belajar diberi kesempatan untuk mengembangkan gagasan sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

Strategi yang tepat digunakan untuk melibatkan warga belajar adalah pembelajaran partisipatif. Indikator pembelajaran partisipatif dengan mengacu pada pokok fikran Sudjana (2000) adalah: (a) tutor menempatkan diri pada kedudukan yang tidak serba mengetahui terhadap semua bahan belajar. Ia memandang warga belajar sebagai sumber yang mempunyai nilai yang bermanfaat dalam kegiatan pembelajaran, (b) tutor memainkan peran untuk membantu warga belajar dalam melakukan kegiatan pembelajaran, (c) tutor melakukan motivasi terhadap warga belajar supaya berpartisipasi dalam menyusun tujuan belajar, bahan belajar dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam kegiatan pembelajaran, (d) tutor sekaligus menempatkan dirinya sebagai warga belajar selama kegiatan pembelajaran, (e) tutor bersama warga belajar melakukan kegiatan saling belajar dengan cara bertukar pikiran mengenai: isi, proses, dan hasil kegiatan pembelajaran, serta cara-cara dan langkah-langkah pengembangan belajar untuk masa berikutnya, (f) tutor berperan untuk membantu warga belajar dalam menciptakan situasi yang kondusif untuk belajar, mengembangkan semangat belajar bersama dan saling tukar pikiran serta pengalaman, (g) tutor mendorong warga belajar untuk meningkatkan semangat berprestasi, semangat berkompetisi, dan berorientasi pada kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, (h) tutor mendorong dan membantu warga belajar untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah yang diangkat dari kehidupan warga belajar, sehingga mereka mampu berfikir dan bertindak terhadap dan di dalam dunia kehidupannya.

Selanjutnya berkaitan dengan metode yang akan digunakan dalam pembelajaran harus memperhatikan ketepatannya, karena dapat menumbuhkan dan memelihara minat serta motivasi warga belajar. Dengan penggunaan metode yang tepat, warga belajar akan mampu melakukan kegiatan belajar dalam suasana yang menyenangkan. Mengacu pada pendapat Abdulhak (2000), kedudukan metode tidak saja hanya untuk menyampaikan bahan belajar, tetapi mempunyai cakupan yang luas. Hal ini terjadi karena tutor tidak berkedudukan untuk menyampaikan bahan belajar, tetapi termasuk juga mengelola kegiatan pembelajaran, sehingga warga belajar dapat belajar untuk mencapai tujuan

belajar secara tepat. Berdasarkan hal tersebut, kedudukan metode dalam pembelajaran memunyai ruang lingkup sebagai cara dalam: (a) pemberian dorongan, (b) pengungkap tumbuhnya minat belajar, (c) penyampaian bahan belajar, (d) pencipta iklim belajar yang kondusif, (e) energi untuk melahirkan kreativitas, (f) pendorong untuk penilaian diri dalam proses dan hasil belajar, (g) pendorong dalam melengkapi kelemahan hasil belajar.

Selanjutnya berhubungan dengan materi pembelajaran diungkapkan oleh Srinivasan (1977), bahwa ada tujuh prnsip yang perlu diperhatikan dalam proses pembelajaran, yaitu: (a) tujuan harus yang jelas, spesifik, dapat diukur dalam perilaku, (b) tugas pembelajaran yang diberikan harus disusun dan berkaitan dengan perilaku yang diharapkan dapat dicapai, (c) isi pelajaran (*content*) harus terinci menjadi tahapan-tahapan yang lebih spesifik agar dapat meningkatkan motivasi dan mudah untuk dilakukan, (d) bahan ajar harus memberikan *feedback* kepada warga belajar segera, sehingga mereka dapat mengetahui dan menyadari hasil belajarnya, yang akhirnya dapat merangsang kemajuan belajar, (e) bahan ajar dan aktifitas belajar disusun secara berurutan dari yang mudah ke yang lebih sulit, (f) warga belajar diberi *reward* sebagai pendorong keberhasilan setiap tahapan kegiatan belajar, (g) waktu dan tempat pembelajaran dipilih secara fleksibel, instrumen pembelajaran yang digunakan yang tersedia dilingkungan warga belajar dan telah dikenalnya.

Berdasarkan konsep yang sudah diuraikan, pelaksanaan pembelajaran berbasis potensi lokal dilaksanakan dengan berdasarkan pada indikator sebagai berikut:

- a. program belajar disusun berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal yang didasarkan pada analisis profit, efisiensi dan kualitas;
- b. proses pembelajaran lebih bersifat *student centered*, dengan indikator: (1) pembelajaran menitikberatkan pada keaktifan siswa, (2) kegiatan belajar dilakukan secara kritis dan analitk, (3) tutor berperan sebaga fasilitator;
- c. Strategi yang digunakan, menitikberatkan pada keaktifan warga belajar, dengan menggunakan pembelajaran partisipatif;
- d. Potensi lokal yang dimanfaatkan dalam pembelajaran adalah: lingkungan alam, sosial, budaya, teknologi, pasar, lembaga keuangan, kemitraan;
- e. Tutor dipilih dari masyaraat setempat, memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugasnya, diakui keberadaannya oleh masyarakat.

3. Evaluasi

Kegiatan evaluasi dilaksanakan sebelum, selama, dan setelah pembelajaran berlangsung. Hal ini sesuai dengan makna evaluasi yang diungkapkan Mappa (1984), yaitu: "penilaian program sebagai kegiatan untuk merespon suatu program, yang dilakukan setelah, sedang, dan yang akan dilaksanakan, yang berorientasi langsung pada kegiatan program dan merespon pihak yang membutuhkan informasi".

Penilaian dilakukan terhadap seluruh komponen program, dengan tujuan untuk: (a) memberi masukan untuk perencanaan program, (b) memberi masukan untuk keputusan tentang kelanjutan, perluasan, dan penghentian program, (c) memberi masukan untuk keputusan tentang modifikasi program, (d) memperoleh informasi tentang pendukung dan penghambat. Evaluasi yang dilakukan adalah evaluasi proses dan hasil pembelajaran serta evaluasi program secara keseluruhan. Evaluasi terhadap hasil belajar adalah menyangkut evaluasi terhadap hasil yang dicapai warga belajar setelah mengikuti pembelajaran, sedangkan evaluasi proses belajar menyangkut evaluasi terhadap berbagai komponen yang saling berkaitan dalam berlangsungnya proses pembelajaran.

Aspek-aspek yang perlu dinilai dalam pembelajarn berbasis potensi lokal, yaitu: (a) persiapan program yang terdiri atas kebutuhan, konsep program, perkiraan biaya, kelayakan pelaksanaan, dan proyeksi tentang tuntutan baru dan daya dukung program, (b) kemungkinan tindak lanjut, perluasan dan penghentian program yang menyangkut kebutuhan selanjutnya, efektivitas dalam pemenuhan kebutuhan, perkiraan tentang akibat sampingan dari program, (c) kemungkinan modifikasi program, seperti: tujuan, isi, konteks program, kebijakan dan pendayagunaan tenaga, d) temuan tentang dukungan program dari masyarakat, sumber biaya, (e) temuan tentang hambatan program dari masyarakat, kekuatan politik, sumber biaya, (f) temuan yang berkaitan dengan keilmuan dan teknologi yang mendasari program.

BAB IV

STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BERBASIS AGAMA

A. Rasional

Basis agama yang dimaksud dalam konteks pengembangan pendidikan ini dipandang sebagai salah satu kekuatan intrinsik yang dapat menggerakkan perilaku masyarakat khususnya dalam mengikuti dan memperoleh pendidikan yang layak dan setara. Kelayakan memperoleh pendidikan ini akan dicapai melalui partisipasi masyarakat atas dasar kesadaran yang tumbuh untuk mengikuti pendidikan. Berkenaan dengan ikhtiar meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, agama dapat memerankan fungsi sosialnya sebagai kekuatan pendorong dalam melakukan sesuatu tindakan, baik individual maupun kolektif.

Berkenaan dengan perilaku pendidikan, hingga saat ini tampak masih rendahnya angka partisipasi masyarakat. Program wajib belajar 9 tahun yang telah dicanangkan sejak tahun 1970-an, misalnya, hingga saat ini masih menyisakan masalah yang tidak sederhana. Pertumbuhannya sangat lamban, seolah-olah tidak memiliki gairah yang memadai untuk mengikuti pendidikan, baik pada tingkat dasar, menengah maupun tinggi. Di beberapa daerah di Jawa Barat, malah masih terlihat kecenderungan untuk memilih bekerja sejak usia dini ketimbang mengikuti pendidikan.

Ada beberapa alasan yang sering muncul mengapa masyarakat tidak mampu bertahan mengikuti pendidikannya hingga minimal 9 tahun. Faktor ekonomi sering menjadi alasan yang kuat mengemuka. Misalnya, kemiskinan sering merupakan faktor dominan terhambatnya masyarakat dalam mengikuti pendidikan. Faktor ini berkorelasi pula secara positif dengan semakin tingginya harga pendidikan, padahal kemampuan daya beli masyarakat masih sangat rendah. Alasan ini bisa dipahami, khususnya ketika masyarakat Jawa Barat -- dan masyarakat Indonesia pada umumnya -- menghadapi krisis yang hampir sulit diselesaikan.

Selain faktor ekonomi, keterbatasan sarana pendidikan juga masih menjadi kendala partisipasi masyarakat dalam mengikuti pendidikan. Selain di beberapa daerah secara kuantitatif masih kurang, secara kualitatif, lebih dari

50% fasilitas pendidikan dinilai tidak layak pakai. Bahkan, bagi sebagian masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil (*remote areas*), masih menghadapi kendala jarak tempuh yang sulit dijangkau. Meskipun, diakui bahwa saat ini hampir semua kecamatan di Jawa Barat telah memiliki fasilitas pendidikan dasar, baik SD/MI maupun SMP/MTs.

Di beberapa kecamatan, jumlahnya mencapai angka belasan, meskipun di beberapa kecamatan lainnya, dengan rasio penduduk usia sekolah, masih ada yang kurang dari mencukupi. Di Kecamatan Indramayu, misalnya, saat ini terdapat 9 SMP/MTs baik negeri maupun swasta, sementara di Kecamatan Karawang Barat jumlahnya mencapai 16 SMP/MTs. Ada kecamatan yang jumlah sekolahnya masih rendah. Di Kecamatan Rengasdengklok, misalnya, hanya terdapat 4 buah SMP baik negeri maupun swasta, dan tidak terdapat MTs.

Selain dua faktor yang disebutkan di atas, faktor kultur, termasuk cara pandang masyarakat tentang arti penting pendidikan, sebetulnya merupakan problem yang paling sulit diselesaikan. Dukungan kultural yang masih belum memadai ini telah berakibat pada rendahnya angka partisipasi sesuai yang diharapkan. Karena faktor kultur ini pula, banyak masyarakat yang tidak miskin dan mudah mengakses lembaga pendidikan tetapi tidak mengirimkan putra-putrinya ke sekolah.

Problem kultural yang terjadi pada masyarakat beragama sebagiannya berakar pada faktor keyakinan agama yang dianutnya. Pandangan yang salah tentang agama, dalam hal ini, dapat berimplikasi pada proses pengambilan keputusan, apakah pendidikan dipandang penting atau tidak. Bahkan, karena kesalahan cara pandang tentang nilai-nilai ajaran ini pula, agama bisa menjadi penghambat partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Dengan demikian, masalah pokok Wajib Belajar selain terletak pada sekolah, sarana dan prasarana pendidikan, juga terletak pada aspek sosial psikologis kultural masyarakat, dan bahkan bukan semata-mata pada aspek teknis didaktis. Soal yang harus dipecahkan ialah bagaimana menjamin arus anak usia SLTP/MTs masuk sekolah secara ajeg (kontinue) sesuai jadwal pengajaran, dan memberantas (atau mengurangi secara drastis angka) putus sekolah. Karena banyak faktor, terutama faktor di luar sekolah, yang mesti diperhitungkan dan dikelola, maka mutlak diperlukan adanya koordinasi, integrasi dan kooperasi.

Atas dasar latar belakang dan pokok masalah di atas, pedoman implementasi ini dirumuskan dengan mendasarkan pada satu pertanyaan, mengapa target Wajar Dikdas 9 Tahun di Jawa Barat belum tercapai. Lalu, untuk menemukan solusi atas pertanyaan tersebut, dapatkah, salah satunya, agama menjadi basis sosial yang digunakan? Bagaimana implementasinya? Dengan kata lain, pedoman ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memberikan guideline implementasi agenda pencapaian target wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dengan menggunakan pendekatan agama.

B. Konsep Dasar

Konsep pendidikan bermasis masyarakat ini didasarkan pada satu asumsi bahwa masyarakat merupakan subyek aktif yang melakukan berbagai upaya dalam proses pencapaian pemerataan pendidikan. Karena itu, konsep dasar pengembangan pendidikan berbasis masyarakat tertumpu pada kekuatan partisipasi dalam menggerakkan suatu perubahan menuju masyarakat berpendidikan.

Dalam konteks perubahan, salah satu potensi sosial sebagai penggerak perubahan yang tumbuh di masyarakat adalah nilai-nilai yang dianut, khususnya nilai-nilai yang berakar pada agama dan kepercayaan tertentu. Agama, dalam hal ini, bukan saja merupakan sistem ritual yang mengikat setiap individu, tapi juga sistem nilai yang ikut menggerakkan perubahan masyarakat. Secara sosiologis, agama, dengan demikian, merupakan kekuatan kultural yang melekat pada kehidupan sekaligus mengikat perilaku setiap individu di dalam masyarakat.

Seorang sosiolog Prancis, Raymond Boundon, dalam *Education, Opportunity and Social Inequality*, menekankan pentingnya faktor kultural dalam pengembangan pendidikan, khususnya dalam membangun kesempatan pendidikan yang sama bagi seluruh lapisan sosial. Posisi faktor kultural ini, di satu sisi, dapat menjadi kekuatan pendorong partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan di sisi lain, dapat pula menjadi penghambat partisipasi. Dengan demikian, penguatan faktor kultural untuk mendukung pendidikan dapat dilakukan dengan tetap memerhatikan potensi lokal, baik yang bersumber pada nilai-nilai budaya maupun agama.

Karena itu, salah satu faktor kultural pengembangan pendidikan dapat dianalisis pada faktor agama dan keyakinan masyarakatnya. Agama, dalam hal

ini, bukan semata-mata serangkaian nilai transendental yang hanya mengatur relasi teologis antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga nilai-nilai sosial yang dapat menggerakkan perilaku profan dalam kaitannya dengan upaya pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya. Dalam konteks sosiologis, agama merupakan faktor perubahan melalui serangkaian aktivitas sosial yang bersumber pada nilai-nilai transendental. Di sinilah semangat agama dapat didisain untuk sesuatu tujuan perubahan.

Sebagai salah satu sumber tata nilai, agama dapat berfungsi sebagai kekuatan penggerak perilaku manusia. Proses partisipasi, misalnya, akan muncul melalui pendekatan agama dengan memberikan dorongan untuk berbuat sesuatu sesuai pesan moral yang dikandung sesuatu ajaran, dan relevan dengan kebutuhan. Jika yang diinginkan adalah munculnya partisipasi pendidikan, maka nilai-nilai ajaran agama yang berkaitan dengan arti penting pendidikan dapat diinternalisasikan pada masyarakat untuk mendorong tumbuhnya partisipasi dimaksud. Melalui pendekatan seperti ini angka partisipasi pendidikan masyarakat diharapkan naik.

Dalam konteks kehidupan masyarakat di Jawa Barat, agama merupakan salah satu potensi yang tidak bisa diabaikan. Agama hadir dalam semua aspek kehidupan, mulai dari persoalan keluarga, sosial, ekonomi, pendidikan, dan bahkan politik sekalipun. Agama dengan demikian dapat tumbuh dan berfungsi sebagai penggerak sosial untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah ditetapkan, termasuk untuk menumbuhkan motivasi masyarakat dalam pendidikan.

Beberapa temuan bahkan memperlihatkan kaitan erat antara nilai-nilai budaya Sunda (etnik terbesar Jawa Barat) dengan nilai ajaran Islam. Masyarakat Sunda cenderung memerankan perilaku islami, atau sekurang-kurangnya mencerminkan kultur yang religius. Anggapan bahwa Islam itu *nyunda* dan Sunda itu *ngislam*, mengisyaratkan telah berlangsungnya pergumulan produktif antara budaya Sunda dan ajaran Islam dalam jangka waktu yang cukup lama.

Berkenaan dengan hal tersebut, sekurang-kurangnya ada tiga konsep dasar yang dapat diadaptasi jika agama digunakan sebagai fasilitas sosial pembentukan kultur belajar masyarakat.

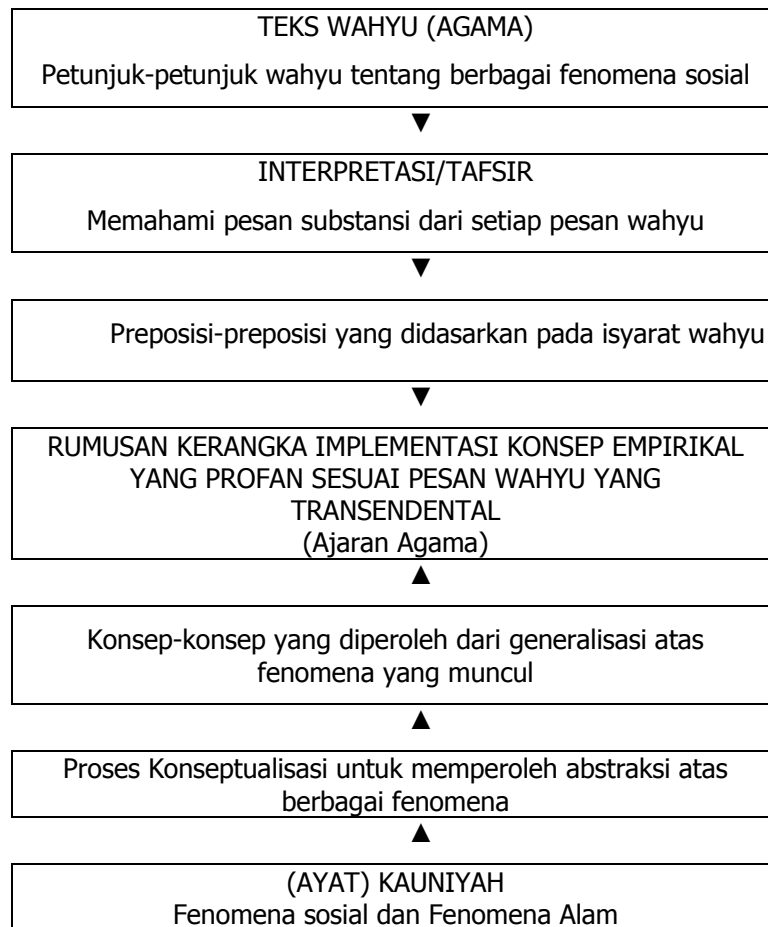
1. Nilai-nilai ajaran pada dasarnya dapat diterjemahkan ke dalam bahasa budaya masyarakat setempat. Rumusan baru ajaran agama ini akan menjadi kekayaan yang melekat pada kehidupan sesuai dengan norma sosial yang

dianutnya. Ia tidak lagi merupakan tata nilai ajaran yang abstrak tapi telah berubah menjadi tata nilai yang inheren dalam cara-cara berpikir, bersikap, dan berperilaku, baik individu maupun kelompok.

2. Ajaran agama yang mewajibkan para pemeluknya untuk tetap belajar pada dasarnya merupakan kekuatan pendorong perilaku belajar masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Bagi umat beragama, khususnya para pemeluk Islam, sebetulnya tidak ada alasan untuk tidak belajar. Belajar merupakan tuntutan ajaran, dan melaksanakannya dinilai sebagai ibadah.
3. Adanya keterkaitan fungsional antara nilai-nilai ajaran dengan budaya lokal untuk mendukung implementasi wajib belajar. Pergumulan agama dan budaya setempat sebetulnya sudah berlangsung cukup lama, sehingga saat ini satu sama lain saling melengkapi. Bukan hanya berkaitan dengan perilaku belajar, tapi juga perilaku sosial lainnya dari kehidupan manusia. Keterkaitan fungsional antara agama dan budaya ini pada gilirannya dapat menjadi fasilitas untuk meningkatkan kesadaran belajar masyarakat.

Namun demikian, untuk memelihara nilai-nilai ajaran dalam proses menemukan maknanya yang relevan dengan kebutuhan empirik, perlu dirumuskan kerangka berpikir yang dapat mempertemukan dua sumber konsep yang saling melengkapi. Dari konsep yang saling melengkapi ini selanjutnya dapat dirumuskan pedoman aplikasi nilai-nilai ajaran dalam kehidupan masyarakat. Di bawah ini adalah kerangka berpikir aplikasi nilai-nilai agama.

Kerangka Aplikasi Nilai-nilai Agama



Keterangan: ▼ = proses deduktif, ▲ = proses induktif

Kerangka aplikasi nilai-nilai agama ini berkaitan dengan analisis interdisiplin, khususnya antara disiplin ilmu agama dengan ilmu-ilmu bantu lainnya. Kerangka normatif deduktif perlu diturunkan untuk merumuskan kerangka operasional dengan bantuan konsep-konsep sosiologis yang umumnya dirumuskan secara empirik induktif.

Penurunan pesan-pesan wahyu yang hanya sampai pada proses penafsiran dengan hanya melibatkan teks yang sama, masih harus diturunkan hingga menyentuh batas wawasan dan pengalaman masyarakatnya. Pada tahap inilah diperlukan tafsir sosial untuk membaca maksud pragmatis dari sesuatu pesan agama.

C. Prinsip-prinsip Dasar

Mengapa berbasis agama? Jika tujuannya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dapatkah agama memberikan kontribusi secara signifikan? Selain masyarakat Jawa Barat dikenal religius dengan 90% beragama Islam (sekitar 39 juta orang), secara sosiologis, agama juga merupakan sumber motivasi dan penggerak perilaku sosial. Agama apapun. Lebih-lebih pada kondisi masyarakat yang kebergantungannya pada hal-hal bersifat supernatural masih tinggi. Para pemeluk agama dalam hal ini terikat pada klaim kebenaran (*truth claim*), yang secara psikologis mendorong sikap dan perilaku.

Klaim kebenaran inilah yang kemudian tumbuh menjadi kekuatan individu dan masyarakat dalam melakukan berbagai jenis aktivitas sosial dalam nuansa religius. Dalam konteks masyarakat Jawa Barat, ia tampak pada fenomena semakin kuatnya semangat keberagamaan, baik karena dorongan internal (*intrinsik*) individu ataupun karena pengaruh faktor eksternal (*ekstrinsik*) sosial lainnya.

Semangat keberagamaan yang terus meningkat dengan potensi individual yang sangat memadai ini dapat "direkayasa" menjadi kekuatan intrinsik untuk melakukan berbagai bentuk transformasi sosial sesuai dengan tuntutan lingkungannya. Jika partisipasi pendidikan masih memperlihatkan gejala yang kurang menguntungkan, misalnya, maka salah satunya, dapat didekati melalui kesadaran keberagamaan dari agama atau kepercayaan yang dianutnya.

Pada sisi yang lain, agama juga berfungsi sebagai perekat kolektifitas sosial untuk meningkatkan partisipasi. Kolektifitas sosial ini diperlukan untuk membentuk semacam gerakan sosial yang lebih luas. Kesadaran individu akan mengikat kesadaran kolektif lainnya, sehingga tumbuh dalam bentuk partisipasi sosial untuk melakukan aktivitas yang lebih luas.

Karena itu, ketidakmungkinan statistis bahwa Jawa Barat akan mencapai angka rata-rata lama sekolah 9,0 pada 2010, sebetulnya dapat dipercepat dengan meningkatnya angka partisipasi melalui pendekatan-pendekatan di luar problem didaktis-metodis. Di sinilah salah satu fungsi agama dapat diperankan untuk mendorong motivasi masyarakat dalam hal pendidikan. Tetapi, variabel agama ini tidak berdiri sendiri. Ia akan selalu saling membutuhkan dengan variabel lainnya, seperti variabel lingkungan sosial, daya dukung sarana dan

prasarana pendidikan, serta perangkat lainnya termasuk kurikulum yang memungkinkan masyarakat terikat dengan dunia pendidikan.

Kenyataan hingga saat ini memang masih memperlihatkan tingkat ketercapaian yang relatif rendah. Program nasional pembangunan SD-INPRES untuk memperluas kesempatan belajar bagi anak usia 7-12 tahun yang telah dimulai sejak tahun 1974, juga belum menyentuh faktor kultural untuk membentuk budaya belajar yang memadai. Meskipun demikian, fakta juga memperlihatkan bahwa hingga tahun 1990-an, upaya besar yang komprehensif ini dipandang berhasil dengan tercapainya angka partisipasi (AP) dari sekitar 65% pada awal program, kemudian melonjak menjadi lebih dari 95% pada sekitar 1994. Perolehan AP yang kurang lebih 30% ini telah dicapai dalam tempo sekitar 20 tahun. Sukses ini telah menarik para pejabat UNESCO dan sesama negara berkembang sejak akhir decade 70-an, dan pasti ikut memberikan kontribusi, betapapun kecilnya, bagi naiknya angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Mulai tahun 1994, atau kira-kira 20 tahun kemudian sejak dicanangkan Program Wajar Dikdas 9 Tahun, pemerintah telah mengumumkan tekadnya untuk menutup jurang keterlantaran sekolah (*non schooling gap*) yang mencekam remaja usia sekolah tingkat SLTP/MTs secara tuntas dalam tempo 10 tahun. Pendekatan perencanaan pendidikan yang diterapkan saat itu diperkirakan sama dengan yang dianut dalam perluasan kesempatan belajar bagi anak usia SD.

Namun kepentingan remaja SLPT/MTs, dan tuntutan lingkungan hidupnya berbeda jauh dari kepentingan anak usia 7-12 tahun. Perbedaan-perbedaan ini menuntut sejumlah persyaratan yang mau tidak mau harus diperhatikan secara serius. Misalnya, kurikulum harus lebih mendekati persyaratan relevansi, mutu, dan realitas sosial; guru harus lebih bermutu dan berdedikasi secara profesional dan kreatif-inovatif; murid perlu disalurkan secara lebih sensitif dan selektif dan perlu dijaga perimbangan gender; sarana dan prasarna sedapat mungkin diserasikan dengan kepentingan peningkatan mutu dan relevansi serta perkembangan mental dan sosial dari murid yang mulai menginjak ambang dewasa-muda. Demikian pula masukan lingkungan (*environmental input*), termasuk iklim belajar yang lebih dinamis dan demokratis. Hal ini semua perlu

dikelola secara lebih cermat, dan harus menjadi bagian integral atau komplementer dari pengembangan total kurikulum yang komprehensif.

Koordinasi, Integrasi, dan Kooperasi

Hal lain yang perlu dipertimbangkan dalam upaya memaksimalkan fungsi sosial agama dalam masyarakat adalah peluang terjadinya interaksi dan partisipasi. Partisipasi sosial sendiri perlu ditata dengan melibatkan aspek-aspek koordinasi, integrasi dan kooperasi. Inti pengertian koordinasi adalah mengayomi, mengemong, membina untuk mengatur kerjasama antar unit. Jadi bukan implementasi. Sebab implementasi merujuk pada aktivitas secara langsung yang melibatkan pelanggan (*clients*), atau pengguna akhir (*final users*) dari program Wajib Belajar, yaitu anak usia sekolah, dan sampai pada tingkat tertentu, orang tua mereka sendiri.

Jadi jelaslah, bahwa pemeran penting dalam proses sosialisasi dan internalisasi ini adalah para pemuka masyarakat, dan yang lebih sensitif lagi para pemuka agama. Mereka umumnya memiliki kedekatan dengan masyarakat, khususnya pada tingkat masyarakat bawah. Namun karena pelaksanaan program Wajib Belajar ini menyangkut aspek sosial psikologis kultural, dan bahkan aspek ekonomis finansial, maka diperlukan keterlibatan aspek kelembagaan, seperti organisasi sosial, agama, dan lain sebagainya. Dalam hubungan inilah sangat diperlukan integrasi antar kelembagaan sosial dan agama, yang secara operasional berarti mengumpulkan, menggabung atau memadu setiap potensi yang tersedia.

Pada praktiknya, integrasi tidak berlangsung sepihak, tapi dalam bentuk relasi yang saling membutuhkan. Karena alasan kesepakatan untuk saling membantu inilah, akan tumbuh interaksi timbal balik antar lembaga sosial yang ada, dan integrasi tidak berarti hanya melibatkan lembaga lain di luar kelembagaan pendidikan, tetapi juga sebaliknya harus ada *reverse integration*. Instansi penyelenggara formal pendidikan juga perlu melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial keagamaan, seperti Ormas-ormas keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, Persis, Majelis Ulama, atau sejumlah kelompok primordial keagamaan lainnya.

D. Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan

Bagaimana agama dapat secara maksimal mendorong tumbuhnya partisipasi pendidikan, secara praktis perlu dirumuskan mekanisme serta prosedur pelaksanaannya. Ia sekurang-kurangnya akan melibatkan fungsi-fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

1. Perencanaan

Fungsi perencanaan dalam pengelolaan agenda wajib belajar dengan menggunakan pendekatan agama akan melibatkan faktor-faktor lain di luar substansi nilai-nilai agama. Agama sendiri harus dilihat bukan saja pada sisi nilai ajarannya, tapi juga fungsi sosialnya, yang dalam implementasinya akan berkaitan dengan faktor psiko-sosio-kultural masyarakatnya.

Untuk menangani bidang sosial psikologis kultural itu, para perencana dan pengelola agenda wajib belajar harus pula memperhatikan aspek koordinasi dan integrasi serta kerjasama tugas-tugas penting di antara berbagai pemuka dan lembaga agama dan sosial dalam masyarakat, yang akan melakukan fungsi-fungsi strategis seperti:

- a. Merumuskan pesan-pesan agama secara operasional, sehingga tidak lagi kaku dalam terminologi agama yang sering tidak mudah dipahami masyarakat. Rumusan ini dapat dijadikan pedoman teknis bagi para pemuka agama atau aktor sosial lainnya, sehingga agama bukan lagi milik para pemuka agama, tapi juga kalangan profesi lainnya yang ada dan tersebar di masyarakat.
- b. Melalui nilai-nilai ajaran dari sesuatu agama, memotivasi orang tua dan masyarakat umumnya supaya setiap anak usia sekolah dapat masuk sekolah pada usia yang tepat sesuai program persekolahan yang tersedia. Di sini agama berfungsi sebagai kekuatan motivator dalam menumbuhkan sikap dan perilaku belajar masyarakat.
- c. Masih dalam fungsinya sebagai motivator, para pemuka agama dapat memotivasi anak-anak yang tengah menempuh pendidikan sesuai dengan jenjang yang ditempuhnya masing-masing, supaya tetap mampu mempertahankan pendidikannya secara teratur sampai tamat dan bahkan terus melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya.

- d. Dengan menggunakan bahasa dan pendekatan agama, para pemuka agama dapat menciptakan jaringan sosial yang kuat dan mantap di setiap masyarakat akar bawah (desa dan dusun) untuk menyebarkan informasi tentang wajib belajar dan menghidupkan semangat kerja, serta memantapkan koordinasi dan integrasi.
- e. Melalui lembaga-lembaga sosial dan agama, dapat menggalakkan aktivitas sosial dan pendidikan luar sekolah dan pelatihan dalam masyarakat, termasuk aktivitas lain yang sudah ada dan yang ada kaitannya dengan dan dapat mendukung agenda wajib belajar. Pendidikan saat ini tidak terbatas hanya pada lembaga formal seperti sekolah dan madrasah, tapi juga pusat-pusat kegiatan belajar masyarakat, termasuk pondok-pondok pesantren.
- f. Bekerjasama, dan membantu badan-badan dan tokoh legislatif untuk menciptakan peraturan-perundangn dalam rangka pelembagaan dukungan masyarakat kepada program wajib belajar.
- g. Bekerjasama dan membantu badan dan tokoh pemerintah untuk menggalang *team work* dan kerjasama antar sektoral demi berhasilnya program wajib belajar. Para pemuka agama sering berhasil memediasi kerja sama tersebut, khususnya berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
- h. Bekerjasama dan membantu badan dan tokoh media massa, untuk menetapkan bentuk-bentuk kegiatan bersama yang bagaimana yang dapat membantu wajib belajar.
- i. Bekerjasama dan membantu badan dan tokoh pendidikan non formal dan agama, seperti kiai, ustadz, pengusaha, tokoh seni budaya, olahraga, pemuda, wanita LSM profesi dan bisnis untuk menetapkan cara-cara apa yang terbaik dan mungkin ditangani bersama-sama untuk mensukseskan wajib belajar.
- j. Bekerjasama dan membantu badan dan petugas penelitian untuk menyelenggarakan berbagai survei atau studi guna memahami masalah-masalah, dan menyempurnakan pelaksanaan agenda wajib belajar.
- k. Mendinamisasi sistem kerjasama dan koordinasi aktif yang bisa menjamin lancarnya pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Hal ini dapat dilakukan, bukan saja melalui pendekatan dan bahasa agama, tapi juga dengan memanfaatkan **kelembagaan agama yang tersedia** di masyarakat.

2. Pelaksanaan

Untuk melakukan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan, program WAJAR seharusnya menjadi "Gerakan Sosial", yang bukan saja melibatkan tokoh dan para pemuka masyarakat, tapi juga menjadi gerakan bersama seluruh lapisan masyarakat. Hal inilah yang diasumsikan bahwa basis agama akan menjadi jembatan yang berfungsi mendinamisasi sosial secara lebih produktif. Lebih-lebih pada masyarakat religius di mana agama merupakan inti kekuatan penggerak perilaku sosial masyarakat.

Suatu kegiatan, baik pemerintah ataupun non-pemerintah, secara umum dapat dilihat sebagai: (1) program, (2) proses, atau juga (3) gerakan. Pendekatan-pendekatan yang dapat mendukungnya pun masing-masing berbeda-beda. Jika program Wajar benar-benar akan dijadikan suatu gerakan, maka perlu tekad dan cara-cara penanganan yang khas. Istilah gerakan sendiri sesungguhnya diambil dari konsep sosiologi, *social movement*. Suatu kegiatan bisa tumbuh dan berkembang menjadi satu gerakan sosial yang mantap dan sustainable, berdasarkan berbagai pengalaman, jika memenuhi sejumlah persyaratan. Beberapa persyaratan Wajib Belajar sebagai gerakan sosial antara lain meliputi:

- a. Masyarakat luas harus memiliki pengetahuan dan persepsi yang benar tentang apa itu WAJAR, mengapa perlu WAJAR, apa kewajiban dan wewenang masing-masing anggota masyarakat, kapan dan di mana masing-masing harus melakukan amal perannya sesuai dengan tujuan;
- b. Masyarakat merasakan WAJAR benar-benar sebagai kebutuhannya sendiri, sebagai kebutuhan yang diperkirakan akan datang (*expected need*), dan bagi pimpinan masyarakat WAJAR benar-benar dirasakan sebagai suatu krisis yang sangat mendesak meskipun masyarakat awam belum menyadarinya;
- c. Masyarakat sebagian besar sudah termotivasi, bahkan mendemonstrasikan kemauan kerasnya untuk mensukseskan program WAJAR, seperti dengan memprioritaskan kepentingan pendidikan di atas kepentingan lainnya;
- d. Masyarakat, khususnya para pemimpin dan pemuka agama, memiliki komitmen yang tinggi dan terus-menerus untuk melakukan agenda ini, dan bukan panas-panas tahi ayam. Komitmen itu harus proaktif, aktif dan terbuka (*open/public commitment*). Komitmen pimpinan tingkat atas (pusat dan provinsi) bersifat sebagai perancang bangun (*designers*) secara politis

konsepsional. Komitmen pimpinan tingkat menengah (kabupaten, kotamadya) bersifat sebagai pendorong (*pusher*) untuk memberikan kesempatan sarana dan kemampuan (*facilitating & enabling*). Sedangkan komitmen pimpinan tingkat bawah seperti para pemuka dan tokoh agama bersifat sebagai pelaksana (*implementers*) untuk menjamin tumbuhnya partisipasi masyarakat khususnya dalam bidang pendidikan;

- e. Adanya jaringan sosial yang mantap, hidup, dinamis. Kita boleh-boleh saja merancang misi, visi, , strategi, struktur organisasi dan fungsi-fungsi manajemen yang bagus dan rapih di atas kertas. Namun batu ujiannya adalah apakah bisa ditumbuhkan suatu jaringan sosial (*social net*) yang benar-benar hidup. Tumbuhnya jaringan sosial yang demikian itu merupakan pengejawantahan dari pengetahuan, persepsi, kebutuhan nyata, dan komitmen tinggi yang dibangun secara tekun dan lama.
- f. Sudah terjadi pelebagaan (*institutionalization*) program WAJAR dalam sistem masyarakat. Pelebagaan berarti internalisasi sistem, kegiatan dan praktek atau kebiasaan oleh suatu organisasi (dalam hal WAJAR). Suatu program sudah terlembagkan manakala sistem, kegiatan dan praktek atau kebiasaan tetap terus beroperasi secara berkelanjutan, meskipun:
 - 1) Ada perubahan gairah, gaya dan personil pimpinan;
 - 2) Pemutusan bantuan atau input dari luar.

Pelaksanaan agenda wajib belajar seperti disebutkan di atas dengan menumbuhkan partisipasi masyarakat sebesar-besarnya salah satunya dapat dipetakan dalam model berikut:

Model Pengembangan Pendidikan Berbasis Agama



Dari model di atas dapat dilihat beberapa langkah operasional untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat seperti berikut:

- 1) Agama mengandung sejumlah nilai, tetapi masih berada pada tataran abstrak yang sering hanya melibatkan aktivitas ritual dan tidak menyentuh aspek sosial. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya meliputi semua aspek kehidupan, termasuk pendidikan.
- 2) Berkaitan dengan aspek pelaksanaan wajib belajar, diperlukan rumusan aktualisasi nilai-nilai tersebut secara lebih spesifik dan relevan dengan kebutuhan serta tuntutan masyarakat. Rumusan ini dibuat secara lebih operasional sesuai dengan tingkat pengetahuan dan budaya masyarakat. Misalnya dapat dibuat pedoman tersendiri bagi para pemuka agama (seperti da'i) dalam penyebaran pesan-pesan agama dengan memasukkan muatan pentingnya pendidikan bagi masyarakat.
- 3) Untuk kepentingan sosialisasi dan bahkan internalisasi, diperlukan kelompok penerjemah, atau mediator, yang akan menjembatani antara bahasa wahyu dan bahasa masyarakat. Dalam hal ini, para pemuka agama merupakan kelompok strategis karena kedekatannya dengan masyarakat serta penguasaannya tentang rumusan nilai-nilai sosial yang terkandung dan ajaran agama.

- 4) Proses sosialisasi nilai-nilai ajaran agama berkaitan dengan pendidikan dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan (*stake holders*). Berbagai aktivitas dan lingkungan sosial yang bernuansa keagamaan dapat menjadi saluran strategis yang dilakukan oleh para pemuka agama.
- 5) Melalui proses ini diharapkan terjadi transformasi sosial sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam peningkatan partisipasi pendidikan. Transformasi ini akan berlangsung sesuai alur informasi yang diterima dan mempengaruhi cara pandang dan perilaku sosial yang diperankan masyarakat.
- 6) Jika proses ini berlangsung sesuai tujuan, maka pada gilirannya akan terjadi perubahan pandangan dan perilaku yang berimplikasi pada peningkatan partisipasi pendidikan yang lebih tinggi.

3. Monitoring Evaluasi

Prinsip pengawasan dilakukan secara terus menerus dengan standar keberhasilan tertentu. Pengawasan dan evaluasi dapat dilakukan dengan memfungsikan lembaga-lembaga keagamaan. Para pemimpin agama yang biasanya menjadi salah satu dinamisor kelembagaan tersebut, secara sosiologis dapat berperan sebagai mediator yang menjembatani berbagai kepentingan di masyarakat.

Hal yang perlu dilakukan dalam pengawasan dan evaluasi adalah menyangkut keteraturan atau konsistensi. Ada derajat keteraturan yang tinggi (*high degree of regularity*) di kalangan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan WAJAR ini. Pertemuan-pertemuan untuk mempersiapkan kegiatan-kegiatan penting sesuai jadwal tahunan, misalnya kegiatan pengumpulan informasi, monitoring kegiatan, penerimaan murid baru, upacara pelepasan lulusan. Salah satu kegiatan rutin tetapi maha penting adalah pertemuan koordinasi, yang untuk kepentingan program WAJAR mungkin perlu diselenggarakan dengan sangat teratur dan disiplin tinggi, misalnya 4 bulan sekali.

Pada pertengahan tahun ajaran perlu ada pertemuan khusus, dengan melibatkan berbagai *stakeholders*. Kegiatan dimaksud untuk mereview kerja enam bulan yang lampau dan merancang persiapan penerimaan murid pada tahun ajaran berikutnya dalam rangka meningkatkan angka partisipasi.

Berkaitan dengan aspek pengawasan dan evaluasi, pertemuan bisa saja perlu dibatasi agendanya, dan yang paling penting adalah: (1) mereview kegiatan periode sebelumnya, (2) menganalisis dan memecahkan masalah, kesulitan, serta kendala-kendala lainnya; (3) merencanakan langkah-langkah periode berikutnya. Sesungguhnya, acara tersembunyi (*hidden agenda*) dan tujuan latent (*intangible objective*) dari pertemuan tersebut ialah melakukan pembaharuan komitmen dan pemberdayaan institusi-institusi dari para pemuka agama dan masyarakat.

BAB V
STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BERBASIS
BAHASA DAN SASTRA DAERAH

A. Rasional

Bahasa Sunda pada umumnya masih digunakan oleh sebagian besar masyarakat Jawa Barat untuk berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Frekuensi pemakaian bahasa Sunda di pedesaan cukup tinggi. Orang Sunda sebagai penutur asli bahasa itu telah berusaha untuk memelihara dan mengembangkan secara sungguh-sungguh. Hal ini sangat penting, karena bahasa Sunda merupakan bagian dari kebudayaan Sunda yang berfungsi sebagai alat atau wahana untuk mengembangkan kebudayaan Sunda.

Hasil Seminar Politik Bahasa Daerah menyebutkan bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Sunda sebagai bahasa daerah dilindungi oleh Undang-Undang. Hal ini sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Daerah, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup (P4 & UUD 1945:34).

Rumusan mengenai fungsi dan kedudukan bahasa daerah dalam Politik Bahasa Nasional I menekankan bahwa :

- 1) kelangsungan hidup dan pembinaan bahasa-bahasa daerah yang terus dipelihara oleh masyarakat pemakainya dan merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup, dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- 2) bahasa-bahasa daerah adalah kekayaan budaya yang dapat dimanfaatkan bukan saja untuk kepentingan pengembangan dan pembakuan bahasa nasional kita, tetapi juga untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan bahasa-bahasa daerah itu sendiri, dan oleh karena itu perlu dipelihara;
- 3) bahasa-bahasa daerah adalah lambang nilai sosial budaya yang mencerminkan dan terikat pada kebudayaan yang hidup di kalangan masyarakat pemakainya;
- 4) bahasa-bahasa daerah berbeda-beda bukan saja di dalam struktur kebahasaannya, tetapi juga di dalam jumlah penutur aslinya;
- 5) bahasa-bahasa daerah tertentu dipakai alat sebagai alat perhitungan, baik secara lisan maupun secara tertulis, sedangkan bahasa-bahasa daerah lainnya hanya dipakai secara lisan; dan

- 6) di dalam pertumbuhan dan perkembangannya, bahasa-bahasa mempengaruhi, dan pada waktu yang sama, dipengaruhi oleh bahasa nasional, bahasa-bahasa daerah lain dan bahasa-bahasa asing tertentu sebagai akibat meningkatnya penyebaran pemakai bahasa Indonesia bertambah lancarnya hubungan antar daerah, dan meningkatnya arus perpindahan penduduk serta jumlah perkawinan antarsuku (*Politik Bahasa Nasional*, 1981:22).

Dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa Sunda memiliki fungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, (3) alat komunikasi di lingkungan keluarga dan masyarakat daerah, (4) pendukung bahasa nasional, (5) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan; dan (6) alat pengembangan serta pendukung kebudayaan daerah (*Politik Bahasa Nasional 2*, 1978:46).

Berdasarkan uraian di atas, maka jelaslah bahwa kedudukan dan fungsi bahasa Sunda (Daerah) dipelihara dan dikembangkan oleh pemerintah; karena dijamin oleh UUD 1945.

Dalam era globalisasi ini, batas-batas nasional tampak semakin kabur dan pertukaran informasi serta perpindahan manusia menjadi semakin padat. Teknologi komunikasi dan transportasi telah mampu mengakomodasi fenomena ini. Akan tetapi, dampak dari hal itu akan menimbulkan pengurangan frekuensi penggunaan bahasa daerah di masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan oleh berbagai ahli bahasa dan tokoh masyarakat Jawa Barat menganggap bahwa dewasa ini ada penurunan dan penyempitan pemakaian bahasa Sunda oleh kalangan masyarakat Jawa Barat. Pembukaan zona perdagangan bebas di beberapa kawasan membuat orang-orang harus berkomunikasi satu sama lain dalam bahasa asing. Bahasa Inggris sebagai salah satu bahasa asing bagi sejumlah bangsa di dunia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan komunikasi, karena masih ada beberapa bahasa asing lain yang dapat digunakan dalam komunikasi internasional. Hal inilah yang menyebabkan kedudukan dan fungsi bahasa daerah (Daerah) semakin merosot.

Secara formal kehidupan bahasa, sastra, dan aksara daerah (Sunda, Cierbon, dan Indramayu) telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra dan Aksara Daerah. Kebijakan ini sejalan dengan jiwa UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang bersumber dari UUD 1945 yang menyangkut Pendidikan dan Kebudayaan. Di

samping itu, sejalan pula dengan Rekomendasi UNESCO tahun 1999 tentang "pemeliharaan bahasa-bahasa ibu".

Secara kondisional bahasa Sunda berkedudukan sebagai bahasa daerah atau dengan kata lain sebagai bahasa kedua setelah bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional; bahasa Sunda, Cirebon, dan Indramayu merupakan bahasa ibu di sebagian besar masyarakat Jawa Barat. Karena kenyataan ini, pembelajaran bahasa Sunda di kelas-kelas awal SD harus disesuaikan dengan prinsip pembelajaran bahasa kesatu sebagai kelanjutan dari hasil pembelajaran di lingkungan keluarga siswa; Bahasa Daerah, Cirebon, dan Indramayu sudah banyak berubah bila dibandingkan dengan kondisi bahasa itu sebelum kemerdekaan.

Sebagai alat komunikasi, bahasa Sunda, Cirebon, dan Indramayu digunakan untuk bertukar pesan (pikiran, perasaan, dan keinginan), baik lisan maupun tulis, menyertai berbagai segi kehidupan masyarakat penuturnya. Dalam fungsinya untuk mengungkapkan imajinasi dan kreativitas, bahasa Sunda juga telah menghasilkan aneka ragam bentuk dan jenis karya sastra dalam tradisi yang telah bersejarah. Oleh karena itu, bahasa Daerah (Sunda, Cirebon, dan Indramayu) dapat dijadikan bahasa pengantar dalam pendidikan. Selain itu, pendidikan di Jawa Barat harus berdasarkan muatan-muatan lokal, termasuk bahasa daerah.

B. Konsep Dasar

1. Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah

Perubahan kurikulum merupakan hal yang wajar sesuai dengan perubahan atau perkembangan masyarakat, ilmu pengetahuan, dan kebijakan pemerintah. Semua praktisi pendidikan telah mengikuti perubahan kurikulum yang satu ke kurikulum lain. Kurikulum 1967 diganti dengan Kurikulum 1975 yang ditandai dengan pedoman pengembangan sistem instruksional (PPSI) yang mengacu pada prinsip bahwa pada pengelolaan pembelajaran di sekolah, pendidik harus menetapkan dahulu tujuan, baik tujuan instruksional umum maupun khusus. Kurikulum itu kemudian diganti oleh Kurikulum 1984 yang sebenarnya kelanjutan dari Kurikulum 1975 dengan format baru, sehingga pendidik dengan mudah membuat tujuan pembelajaran, bahan pembelajaran, metode, penilaian, dan sebagainya. Kurikulum ini akhirnya dianggap terlalu

menyamarkan kondisi sekolah sehingga menimbulkan keseragaman; padahal kondisi sekolah yang satu berbeda dengan yang lainnya.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mengandung beberapa ketentuan khusus sebagai hal baru dalam perkulikuluman di Indonesia. KTSP merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai murid, penilaian, kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah.

Hal baru yang ditentukan pada batasan tersebut di atas ialah "pemberdayaan sumber daya pendidikan" dan "pengembangan kurikulum sekolah". Ketentuan ini sangat berhubungan dengan jiwa otonomi daerah yang tercantum pada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada Bab IV tentang Kewenangan Daerah, Pasal 11 ayat (2) tertera: Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, *pendidikan*, dan *kebudayaan*, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah dijabarkan di Provinsi Jawa Barat berupa Matrik Kewenangan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pada bidang pendidikan dasar dan menengah dijelaskan bahwa kewenangan Provinsi lintas kabupaten/kota ialah penetapan kebijakan kurikulum muatan lokal, sedangkan kewenangan pemerintah kabupaten/kota ialah penerapan kurikulum muatan lokal.

Sebutan atau istilah *kurikulum muatan lokal*, seperti telah diketahui kalangan pendidikan, terdapat pada kurikulum terdahulu. Pada rancangan Standar Isi dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP), khusus dalam struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan secara jelas disebutkan kurikulum muatan lokal (yang menurut Kurikulum 1994 alokasi waktunya ditetapkan antara 2 s.d. 7 jam pertemuan di SD dan 6 jam pertemuan di SMP), akan tetapi pada Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Struktur Program Kurikulum ada keterangan yang berbunyi adalah mata pelajaran muatan lokal dengan jumlah jam 2 jam pelajaran dan diajarkan dari TK sampai SMA..

Pada struktur kurikulum ditetapkan 2 jam pelajaran untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda karena memperhatikan isi Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (antara lain bahasa Daerah) yang di antaranya berbunyi:

- (1) Bab II Tujuan dan Sasatar, Pasal 3a: terwujudnya kurikulum pendidikan bahasa, sastra dan aksara Sunda di sekolah dan kurikulum pendidikan di luar sekolah.
- (2) Bab IV Upaya dan Ruang Lingkup Pemeliharaan, Pasal 2a: Penyelenggaraan Pendidikan di sekolah dan pendidikan di luar sekolah.
- (3) Bab VI Strategi, Pasal 9a: dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah, mata pelajaran bahasa daerah mempunyai kedudukan dan perlakuan yang setara dengan mata pelajaran lainnya.

Bab dan pasal pada peraturan daerah yang dicuplik di atas menunjukkan kepedulian DPRD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap upaya pelestarian bahasa dan sastra Sunda dalam bidang pendidikan atau persekolahan. Hal ini berlaku pula pada bahasa dan sastra daerah lainnya yang secara nyata berada di Provinsi Jawa Barat seperti bahasa Cirebon/Indramayu.

Selain itu, Gubernur Jawa Barat telah mengeluarkan surat keputusan Nomo. 243-5/Diskdik/2006 tentang Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda. Dhubungkan dengan kewenangan Provinsi dan kabupaten/kota seperti telah dikemukakan di atas, sudah barang tentu upaya ke arah itu harus dilaksanakan bersama. Hal ini sudah menjadi kemauan politik darikedua pemerintahan tersebut sehingga menjadi acuan bagi sekolah yang juga mempunyai kewenangan dalam hal menentukan kurikulum sekolah, terutama penyusunan silabus berdasarkan KTSP. Hal ini sesuai dengan konsep dasar Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang sudah diketahui pihak sekolah, terutama mengenai tahap penyusunan rencana yaitu (a) menentukan tujuan sekolah, (b) menilai situasi, (c) mengidentifikasi bidang program, dan (f) merancang struktur program yang kesemuanya tercantum pada perencanaan sekolah.

2. Perihal Bahasa dan Sastra Daerah di Jawa Barat

Bahasa Daerah di Jawa Barat merupakan salah satu bahasa daerah, di samping bahasa Cirebon/Indramayu dan bahasa Melayu Jakarta. Bahasa Cirebon/Indramayu sudah diajarkan sejak lama, termasuk pada masa berlakunya Kurikulum 1994 yang secara resmi menetapkan pelajaran Bahasa Daerah sebagai

mata pelajaran muatan lokal wajib di daerah administrasi Provinsi Jawa Barat (yang saat itu termasuk Provinsi Jawa Barat sekarang).

Hanya bahasa Melayu Jakarta yang sejauh ini belum dimasukkan ke dalam pelajaran di sekolah, baik di SD maupun di SMP. Saat berlakunya Kurikulum 1994 pun bahasa daerah ini belum dijadikan bahan pelajaran. Adapun alasan yang dikemukakan oleh pihak Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Dinas Pendidikan) Jawa barat ialah kekhawatiran terjadinya kerancuan dengan pelajaran bahasa Indonesia (standar), karena bahasa Melayu Jakarta yang lazim disebut bahasa Betawi pada awalnya merupakan sebuah logat atau dialek bahasa Melayu (yang saat ini, setelah melalui perkembangan, menjadi bahasa Indonesia).

Anggapan yang berupa kekhawatiran tersebut mungkin akan berubah sekarang atau di kemudian hari. Oleh karena itu, tidaklah tertutup kemungkinan bahasa Jakarta itu diajarkan pula di sekolah, terutama di kota Depok dan Kabupaten/Kota Bekasi. Lebih-lebih pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No. 5 tahun 2002, pasal 1 (7) berbunyi: Bahasa Daerah adalah bahasa Daerah, Cirebon, dan Melayu Betawi yang tumbuh dan berkembang di Wilayah Jawa Barat.

a. Bahasa Sunda sebagai Bahasa Daerah

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan sebaik-baiknya (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Seminar Politik Bahasa Nasional 1975 menyimpulkan hal yang berhubungan dengan bahasa daerah sebagai berikut:

Kedudukan: Di dalam hubungannya dengan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa seperti bahasa Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis, Makasar, dan Batak, yang terdapat di wilayah Republik Indonesia, berkedudukan sebagai bahasa daerah. Kedudukan ini berdasarkan kenyataan bahwa bahasa daerah itu adalah satu unsur kebudayaan nasional yang dilindungi oleh negara, sesuai dengan penjelasan Pasal 36, Bab XV, Undang-Undang Dasar 1945.

Fungsi: Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa-bahasa seperti bahasa Sunda, Jawa, Bali, Madura, Bugis, Makasar, dan Batak berfungsi

sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah-sekolah dasar di daerah tertentu pada tingkat permulaan untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (3) pengembangan serta pendukung kebudayaan nasional.

b. Bahasa Sunda *Lulugu*

Kedudukan bahasa Sunda sebelum Indonesia merdeka adalah sebagai bahasa *pribumi*, sama seperti bahasa daerah lainnya, termasuk bahasa Melayu. Bahasa yang disebut terakhir memang ada lebinya, karena saat itu pun bahasa Melayu sudah diajarkan di sekolah-sekolah seluruh Indonesia, berbeda dengan bahasa pribumi lain yang di beberapa Provinsi dijadikan mata pelajaran di sekolah pribumi (sejak tahun 1860). Bahkan di sekolah dasar dijadikan pula bahasa pengantar secara keseluruhan, artinya bukan pengantar untuk mata pelajaran bahasa daerah saja.

Setelah kota keresidenan Priangan dipindahkan dari Cianjur ke Bandung pada tahun 1864, peranan kota Bandung dalam perkembangan budaya Daerah semakin meningkat. Bahasa Daerah dialek Bandung seakan-akan menata diri menjadi bahasa yang lebih menonjol sejalan dengan kedudukan Bandung sebagai Ibu Kota Keresidenan. Itulah sebabnya pada *Staatsblad* (Lembaran Negara) No. 125 Tahun 1893, Ayat 6, ditetapkan bahwa "bahasa pribumi yang harus diajarkan di sekolah ialah bahasa pribumi yang dianggap paling bersih, seperti untuk sekolah-sekolah di Jawa Barat harus bahasa Daerah Bandung." Dengan peraturan itu timbullah sebutan *bahasa Daerah*. Artinya bahasa yang diajarkan di sekolah untuk bahasa Daerah dialek Bandung. Kemudian, sebutan *basa sakola* berubah menjadi *basa lulugu* "bahasa standar" atau *basa Sunda lulugu*.

Uraian singkat di atas menjelaskan proses terjadinya *basa Sunda lulugu* di Provinsi Jawa Barat (termasuk Provinsi Jawa Barat/DKI sekarang), yang menjadi acuan untuk dijadikan bahan ajar di sekolah-sekolah. Hal ini sama seperti bahasa Melayu tinggi di Riau dijadikan bahasa standar zaman kolonial serta bahasa Indonesia baku untuk saat ini.

Setiap bahasa berkedudukan tinggi dalam peradaban dunia selalu memiliki bahasa standar yang disepakati bersama oleh pemakainya. Bahasa standar atau *basa lulugu* tersebut terbentuk dari ancangan tertentu serta melalui proses yang relatif panjang.

Adapun kegunaan *basa lulugu* banyak berkait dengan hal-hal yang resmi, seperti dalam tulisan (buku, surat menyurat, majalah, dsb.) atau tuturan pada kegiatan-kegiatan yang menurut etika dan kepatutan, bila menggunakan bahasa nonstandar dirasakan tidak pada tempatnya (pidato, pengantar upacara adat, dsb.). Di samping itu, bahasa standar dapat pula berfungsi sebagai "pemersatu" penutur suatu bahasa yang memiliki bermacam-macam dialek (*basa werwengkon*), seperti dalam bahasa Daerah terdapat *basa werwengkon* Ciamis, Majalengka, Sumedang, Cianjur, Jampang.

Dengan memperhatikan usaha di atas, pembelajaran *basa* Daerah *lulugu* itu harus dianggap penting dan menjadi pegangan semua sekolah di daerah yang berbahasa Daerah. Tentu saja dengan catatan bahwa *basa werwengkon* pun harus menjadi perhatian sekolah sesuai dengan konsep dasar Manajemen Berbasis Sekolah, terutama dalam hal menilai situasi (sekolah dan lingkungannya), mengidentifikasi kebutuhan (peserta didik), serta merancang struktur program. Hal ini sudah dilaksanakan pada penerapan kurikulum 1994, yakni dengan dimungkinkannya sebuah sekolah dalam pembelajaran bahasa Daerah berada pada Kategori B yakni mengajarkan bahasa Daerah di lingkungan masyarakat yang mencapai *basa* Daerah *werwengkon*. Di sekolah berkategori ini, *basa werwengkon* dijadikan ancang-ancang untuk mempelajari *basa* Daerah *lulugu*.

c. Bahasa Daerah sebagai Bahasa Ibu

Bahasa ibu atau *basa indung* ialah bahasa pertama yang diperoleh anak dari ibunya atau keluarga batih melalui pembelajaran informal sejak anak itu mulai belajar berbicara. Saat ini bahasa Daerah masih menjadi bahasa ibu di kebanyakan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Barat, ditambah di beberapa kabupaten yang berada di bagian barat Provinsi Jawa Tengah.

Namun, diketahui pula ada keluarga yang tidak seperti itu, terutama di kota besar atau di lingkungan tertentu. Di keluarga tersebut, ibu atau ayah tidak berbicara bahasa Daerah, tetapi bahasa lain, kebanyakan bahasa Indonesia,

walau diketahuinya bahwa mereka berada di daerah yang masyarakatnya berbahasa Daerah.

Dalam kasus seperti dikemukakan terakhir ini, bahasa Daerah yang diajarkan di sekolah bukannya menjadi bahasa pertama bagi anak yang bersangkutan, tetapi menjadi bahasa kedua. Kasus inilah yang menjadi catatan "masalah" bagi pendidik mata pelajaran bahasa Daerah dan pihak lain yang amat peduli dengan kelangsungan hidup bahasa Daerah di kemudian hari.

Masalah bahasa ibu saat ini menjadi perhatian dunia, sehingga UNESCO, sebuah badan dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada bulan November 1999 menetapkan tanggal 21 Februari sebagai Hari Bahasa Ibu. Ketetapan itu disebabkan timbulnya kesadaran bahwa keberadaan bahasa, termasuk bahasa ibu, bukan hanya merupakan bagian kebudayaan yang harus dipelihara, akan tetapi merupakan alat berekspresi manusia dalam keberagaman. Selanjutnya, disadari pula bahwa keberadaan bahasa ibu saat ini berada pada suasana multibahasa, sehingga ada kemungkinan bahasa akan lenyap begitu saja. Itulah sebabnya warga dunia dianjurkan agar ikut memperhatikan bahasa ibu yang sekarang berada dalam suasana masyarakat multibahasa itu.

Masyarakat Daerah pun saat ini berada dalam kondisi multibahasa, paling tidak dwibahasa, yakni berdampingan dengan bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa nasional. Suasana inilah yang harus dicermati oleh pihak yang ingin melestarikan bahasa Sunda, termasuk para pendidik yang diberi tugas mengajar mata pelajaran bahasa Sunda.

Dalam pada itu semua pihak, termasuk pendidik yang bersangkutan sudah mengetahui bahwa bahasa Sunda itu berubah sehingga sudah jauh berbeda dengan bahasa Sunda sebelum Perang Dunia II. Hal ini disebabkan, antara lain, karena suasana multibahasa itu. Atau paling tidak, karena bahasa Sunda berhadapan dengan bahasa Indonesia yang berkedudukan lebih tinggi sehingga mengakibatkan adanya persaingan bahasa serta mau tidak mau bahasa yang berkedudukan lebih tinggi itu lebih banyak mengalahkan bahasa Sunda.

Begitulah kenyataannya, sehingga pendidik mata pelajaran Bahasa Sunda secara aktif harus bertindak sebagai pihak yang (a) mengenalkan bahasa Indonesia dengan bahasa Sunda, terutama di kelas-kelas awal sekolah, (b) mengenalkan unsur-unsur bahasa Sunda dalam pembelajaran bahasa Indonesia,

(c) mengadakan korelasi positif antara pembelajaran bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia yang dapat dilakukan dengan cara berkoordinasi yang dipandu kepala sekolah atau pihak pengelola kurikulum, dan (d) menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar berdampingan dengan bahasa Indonesia. Cara-cara seperti itu dapat dijalankan secara bergantian serempak menurut keperluan.

Akan tetapi, keempat cara di atas tidak boleh diberlakukan di semua sekolah (di Jawa Barat dan Jawa Barat), karena pada umumnya anak-anak berusia 6-7 tahun sudah mengenal bahasa Sunda sebagai bahasa ibu. Mereka masuk ke sekolah dengan bekal kemahiran berbahasa Sunda dalam tahap dasar yang harus dikembangkan lebih lanjut di sekolah.

Di beberapa sekolah dasar yang berada di kota, keempat cara itu perlu dijalankan, dengan alasan kondisi muridnya heterogen sehubungan dengan banyak pendatang dari luar daerah. Selain itu, dapat dilaksanakan pula di daerah perbatasan dua bahasa seperti di Kota Depok dan Kabupaten Bekasi yang murid-muridnya berbicara dalam bahasa Jakarta (Melayu dialek Jakarta). Sedangkan di tempat yang dihuni masyarakat berbahasa Indramayu atau Cirebon (bahasa Jawa dialek Indramayu dan Cirebon), menurut Peraturan Daerah No. 5/2002 tidak diharuskan belajar bahasa Daerah, karena daerah itu mempunyai bahasa daerah sendiri.

d. Bahasa dan Sastra Sunda sebagai Bahan Pelajaran

Setelah diketahui hal-hal objektif tentang bahasa dan sastra Sunda seperti yang dikemukakan di atas, sekarang patut diperbincangkan bagaimana bahasa tersebut dijadikan bahan pelajaran di sekolah.

Bahasa daerah di Indonesia dapat diajarkan di sekolah dengan syarat (a) tersedia tenaga pengajarnya, (b) ada perangkat kurikulumnya, dan (c) memadai sarana pendukungnya. Ketiga syarat tersebut pada umumnya sudah ada di sekolah (TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MAN) yang sejak lama mengajarkan bahasa Sunda. Sejak Kurikulum 1994 pelajaran bahasa daerah itu termasuk pelajaran muatan lokal. Kurikulum pun dibuat oleh instansi pendidikan yang saat itu bernama Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat bersama-sama dengan instansi bawahannya di tingkat kabupaten/kota.

Dalam pada itu, pendidik mata pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda menyadari benar bahwa peranan bahasa daerah sekarang jauh amat kurang bila

dibandingkan dengan bahasa Indonesia, karena kedudukan dan fungsinya berbeda seperti yang telah dikemukakan di atas. Kemudian, karena itu pulalah jumlah jam pelajaran bahasa Indonesia lebih banyak (6 jam) bila dibandingkan dengan jam pelajaran bahasa daerah (2 jam). Belum lagi ditambah dengan ketentuan bahwa bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di sekolah serta kenyataan bahwa media cetak dan elektronik hampir semua menggunakan bahasa Indonesia. Maka karena itu, keterampilan peserta didik berbahasa Indonesia jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan bahasa daerah. Akhirnya, para pendidik bahasa Sunda tentu akan sampai pada kesimpulan bahwa kompetensi peserta didik dalam berbahasa Indonesia pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan berbahasa daerah. Hal ini perlu dicatat untuk dicari pemecahannya, agar pendidik bahasa Sunda tidak selalu dikecam atau dijadikan *paneumbleuhan* rendahnya mutu pelajaran bahasa Sunda. Antara lain dengan cara memberi rangsangan kepada siswa agar gemar dan banyak membaca tulisan berbahasa Sunda. Tidak berlebihan bila dalam suasana berbahasa seperti sekarang, saat bahasa daerah berhadapan dengan bahasa Indonesia yang demikian dominan, sekolah mengambil langkah strategis dalam pembelajaran bahasa Sunda ialah dengan cara "lebih mengutamakan" keterampilan membaca pada siswanya. Keterampilan lainnya, mendengarkan, berbicara, dan menulis, diharapkan menyusul kemudian, dengan cara dipacu oleh pendidik atau bahkan terpacu sendiri pada diri siswa saat berada di sekolah dan di luar sekolah. Dipacu pendidik atau terpacu sendiri pada diri murid berawal dari minat murid itu sendiri terhadap bahasa dan sastra Sunda akibat banyak membaca, begitulah logikanya.

Bila logika itu benar, salah satu syarat yang harus menyertainya adalah tersedianya bacaan berbahasa Sunda di sekolah atau dengan cara lain yang terlaksana berkat kreativitas pendidik sendiri.

Sementara itu, ada kasus yang seharusnya tidak terjadi. Kasus sekolah yang nyata-nyata berada di tengah-tengah masyarakat berbahasa Sunda tetapi tidak mengajarkan bahasa Sunda karena berbagai pertimbangan, antara lain dianggap tidak ada manfaatnya bagi kehidupan peserta didiknya. Ini terjadi di kota besar, terutama di lingkungan tertentu yang murid-muridnya heterogen, sehingga budaya daerah setempat dirasakan mereka begitu asing. Dalam hal ini, sekolah--sesuai dengan kewenangannya berdasarkan manajemen berbasis

sekolah -- memutuskan tidak mencantumkan bahasa Sunda sebagai mata pelajaran.

Di sinilah "kenyataan" di sekolah itu berhadapan dengan idelaisme yang didukung oleh perundang-undangan yang berlaku (UUD 1945, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 5 Tahun 2002, bahkan dengan prinsip KBK sendiri yang antara lain menekankan bahwa KBK ditujukan untuk menciptakan tamatan yang kompeten dan cerdas dalam membangun identitas budaya dan bangsanya). Di samping itu fungsi sekolah yang sejak lama dijalankan, yakni sekolah sebagai koservator (pelestari) dan pengembang nilai budaya, terabaikan adanya.

3. Sikap Berbahasa

a. Sikap dan Sikap Bahasa

Berkenaan dengan sikap bahasa, Ramirez (1985) menjelaskan bahwa sikap bahasa merupakan reaksi evaluatif atau perasaan yang ditujukan kepada sebuah bahasa. Misalnya, anggapan bahwa bahasa Perancis lebih enak didengar daripada bahasa Jerman yang terasa "kasar" merupakan sikap bahasa. Contoh lainnya yang termasuk ke dalam sikap bahasa adalah reaksi-reaksi yang ditujukan kepada variasi bahasa yang digunakan dalam sebuah lingkungan atau keadaan, sikap-sikap yang ditujukan terhadap sebuah bahasa yang ada kaitannya dengan satu golongan (Misalnya, bahasa Rusia dipakai oleh Kaum Komunis).

Garvin dan Mathoit (1956) membedakan tiga kategori sikap bahasa, yakni (1) kesetiaan bahasa, yang mendorong satu masyarakat bahasa untuk memelihara bahasanya, dan jika perlu, mencegah masuknya pengaruh asing; (2) kebanggaan bahasa, yang mendorong masyarakat mengembangkan bahasanya serta menggunakannya sebagai lambing identitas dan ketunggalan masyarakat; dan (3) kesadaran terhadap adanya norma bahasa, yang mendorong masyarakat menggunakan bahasa dengan tertib dan sopan.

b. Hubungan Sikap Bahasa dan Prilaku Berbahasa

Oppenheim (1976) menjelaskan bahwa kita belum tentu dapat menentukan satu prilaku berdasarkan sikap; sikap tidak dapat langsung disimpulkan berdasarkan prilaku dengan benar, juga prilaku tidak merupakan ekspresi langsung yang lebih benar daripada ujaran atau ucapan tentang sikap tersebut. Hubungan sikap dan prilaku merupakan hal yang kompleks.

Berkaitan dengan hubungan sikap dan perilaku, perlu dijelaskan bahwa karena sikap itu merupakan keadaan mental atau tata keyakinan, kita menghadapi kenyataan bahwa sikap itu tidak dapat diamati secara langsung. Perlu ditambahkan bahwa penafsiran mengenai sikap seseorang terhadap sesuatu hal atau keadaan berdasarkan apa-apa yang diucapkannya mengenai sikapnya pada hal tersebut atau berdasarkan perilaku yang berkaitan dengan hal itu, tidak selamanya benar. Ucapan atau ujaran seseorang mengenai sikapnya belum tentu merupakan manifestasi atau ekspresi sikap yang sebenarnya. Misalnya saja, seseorang yang memiliki sikap negatif terhadap lukisan karya temannya mungkin saja dia berpura-pura suka dan mengamatinya karena ingin menyenangkan temannya atau takut dikatakan "buta seni". Dengan demikian, biasa dikatakan bahwa ucapan atau perilaku seseorang tidak selamanya mencerminkan sikap mengenai satu hal atau keadaan. Juga tidak selamanya sikap terhadap satu hal atau keadaan menjadi penyebab lahirnya satu perilaku yang berkaitan dengan hal atau keadaan tersebut. Meskipun begitu, sikap dan perilaku merupakan dua hal yang saling mempengaruhi.

c. Perubahan dan Pembentukan Sikap Bahasa

Sikap seseorang dapat dimiliki karena pengalaman sekilas yang tidak disengaja. Sikap dibentuk tanpa bimbingan dan tujuan yang direncanakan terlebih dahulu. Namun, sikap juga dapat dimiliki dengan cara dibentuk tahap demi tahap dalam kurun waktu bertahun-tahun, berdasarkan rencana yang telak dari seseorang atau sekelompok orang yang berkeinginan untuk membentuknya. Begitu juga perubahan sikap seseorang dapat berupa hasil pengalaman sekilas atau tidak disengaja, dapat juga berupa hasil pembentukan atau perubahan yang sengaja berdasarkan rencana tertentu. Berkaitan dengan perubahan dan pembentukan sikap, terdapat dua faktor utama yang menentukan, yakni faktor psikologis dan faktor kultural. Kedua faktor ini selamanya saling mempengaruhi dalam menumbuhkan, memelihara, dan mengubah sikap. Faktor psikologis seperti motivasi, emosi, kebutuhan, pikiran, kekuasaan, dan ketaatan merupakan faktor yang berperan penting dalam menumbuhkan dan mengubah sikap seseorang. Sedangkan faktor kultural seperti status, lingkungan keluarga dan pendidikan merupakan faktor yang besar artinya dalam menentukan sikap manusia.

d. Meningkatkan Sikap Bahasa

Berdasarkan pandangan Koentjaraningrat, Moeliono (1988) menjelaskan bahwa akibat dari masa pascarevolusi dan proses dekolonisasi yang cukup lama, pada masyarakat kita tumbuh sikap batiniah yang tidak sesuai dengan jiwa pembangunan yang kita butuhkan, Oleh karena itu, tidak mengherankan jika lahir sikap-sikap berikut ini.

- (1) Sikap menyepelkan nilai, yang menyebabkan seseorang puas dengan hasil kerja yang asal jadi, kurang berkembangnya kemauan untuk menjaga nilai.
- (2) Sikap suka menerobos, yang menyebabkan seseorang suka "memotong jalan atau jalan pintas" (mau gampang saja), setiap masalah dapat "diatur" sehingga tujuan mudah dicapai.
- (3) Sikap tuna harga diri, yang menyebabkan seseorang beranggapan bahwa hasil kerja orang lain atau bangsa lain lebih baik dan tinggi nilainya.
- (4) Sikap menjauhi disiplin, yang melahirkan anggapan bahwa segala macam aturan dapat direka-reka atau dipermainkan, yang dikatakannya sebagai "kebijaksanaan".
- (5) Sikap tak mau bertanggungjawab, yang lahir dalam ucapan-ucapan seperti, "Itu bukan urusan saya", atau "Itu merupakan keputusan dari atasan, saya hanya menjalankan tugas".
- (6) Sikap latah, suka mengekor, yang cenderung mengikuti orang lain tanpa daya kritik dan daya cipta.

C. Prinsip-prinsip Dasar

Prinsip dasar dalam pengembangan pendidikan berbasis bahasa dan sastra Sunda adalah dari pemakaian bahasa dan sastra Sunda itu sendiri. Pemakaian bahasa dan sastra Sunda dapat dijadikan sumber atau dasar pendidikan apabila dilakukan kegiatan-kegiatan: (a) pembinaan dan pengembangan, (b) pengembangan mutu pembelajaran, (c) bahasa Sunda sebagai bahasa pengantar, dan (d) pembakuan bahasa.

1. Pembinaan dan Pengembangan

Pembinaan dan pemeliharaan bahasa dan sastra daerah, termasuk bahasa dan sastra Sunda merupakan bagian dari perencanaan bahasa seperti yang sudah direncanakan bagi bahasa daerah yang telah dirumuskan dalam Seminar Politik Bahasa Nasional 1975.

Sejalan dengan Penjelasan Pasal 36, Bab XV Undang-Undang Dasar 1945, maka bahasa-bahasa daerah yang dipakai di wilayah Negara Republik Indonesia perlu dipelihara dan dikembangkan. Usaha-usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Sunda meliputi kegiatan-kegiatan (1) inventarisasi dan (2) peningkatan mutu pemakaian.

a. Inventarisasi

Kegiatan inventarisasi bahasa Sunda dalam segala aspeknya, termasuk pengajarannya, perlu untuk penelitian, perencanaan, pembinaan, dan pengembangan bahasa Sunda. Kegiatan inventarisasi akan berjalan dengan baik dan lancar jika (a) dilaksanakan melalui kerjasama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan lembaga-lembaga (seperti: Lembaga Bahasa Bandung, Lembaga Basas jeung Sastra Sunda, dan lain-lain), badan-badan atau perseorangan yang berkriprah dalam bidang bahasa dan sastra Sunda; tersedianya tenaga-tenaga yang cukup, cakap, dan terlatih dalam bidang penelitian bahasa dan sastra Sunda.

b. Peningkatan mutu pemakaian

Dalam rangka mempercepat pembangunan yang merata di seluruh pelosok tanah air, bahasa daerah merupakan alat komunikasi (lisan) yang praktis digunakan di daerah pedesaan. Sehubungan dengan hal itu, perlu disusun suatu program penataran dan pelatihan di bidang bahasa daerah bagi (1) para pejabat dari mulai ketua RT sampai gubernur, (2) para wartawan yang berkecimpung dalam pers daerah, (3) para pengusaha yang bergerak dalam dunia ekonomi.

Dalam rangka usaha memelihara warisan kebudayaan daerah dan usaha membina kebudayaan nasional, bentuk-bentuk kebudayaan yang ditulis dalam bahasa daerah perlu ditulis kembali baik dalam bentuk bahasa daerah atau dalam bentuk saduran atau terjemahan ke dalam bahasa Indonesia untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang lebih luas.

Dalam rangka usaha mendorong dan merangsang penulisan dan penerbitan bahasa Sunda, demi mengakrabkan warisan kebudayaan yang ditulis dalam bahasa daerah, pemerintah perlu (a) menyediakan buku-buku berbahasa daerah ke perpustakaan-perpustakaan (sekolah, desa, pemda kota/kabupaten, dan provinsi), (b) menyebarluaskan media masa, seperti majalah dan surat kabar yang ditulis dalam bahasa daerah disebarkan ke sekolah-sekolah dan kepada

masyarakat secara menyeluruh, serta (c) menyediakan hadiah atau anugerah kepada pengarang-pengarang yang menulis dalam bahasa daerah.

2. Peningkatan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Sunda

Alokasi waktu untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda 2 (dua) jam per minggu. Ketetapan seperti itu merupakan salah satu karakteristik mata pelajaran bahasa dan sastra Sunda dan harus menjadi perhatian pendidik dalam mempertautkan jumlah jam pelajaran per kelas per tahun serta jumlah minggu efektifnya.

Karena memang jauh lebih terbatas bila dibandingkan dengan alokasi waktu untuk mata pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda, pendidik harus benar-benar dapat memilih kompetensi apa saja yang harus dikuasai murid dikaitkan dengan konsep bahasa dan sastra Sunda secara proporsional (disesuaikan dengan kondisi kebahasaan dan kesastraan serta kebutuhan murid saat ini).

Dapat saja secara sengaja mengkorelasikan bahan pelajaran yang menjadi tugasnya dengan bahan pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, mengingat keduanya relatif banyak persamaannya. Cara seperti itu sebenarnya dimungkinkan, baik secara pribadi pendidik maupun secara sengaja mengadakan koordinasi dengan pendidik mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia.

Karakteristik lain ialah kehidupan bahasa dan sastra Sunda dewasa ini telah diulas sekilas di atas. Kondisi bahasa dan sastra daerah di Indonesia sekarang sudah berubah, tidak sama dengan kondisi pada saat lalu. Perbedaan itu sesuai dengan fitrahnya sejalan dengan perubahan zaman, termasuk pengaruh dari bahasa luar, terutama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara yang banyak digunakan di masyarakat, termasuk di sekolah sebagai bahasa pengantar pelajaran.

Oleh karena itu, pendidikan hendaknya tidak mementingkan pelajaran bahasa dan sastra Sunda tempo dulu, seperti *ngaran rupa-rupa kekembangan, sasatoan, babagian waktu, babagian jamparing jeung gondewa*, dan seterusnya sehingga menjadi hafalan murid dengan maksud agar terasa ada kesulitan seperti mata pelajaran lainnya, karenabahan seperti itu sudah tidak sesuai dengan keperluan kompetensi murid zaman sekarang.

Pengembangan mata pelajaran Bahasa dan Sastra Sunda harus memperhatikan hakikat bahasa dan sastra sebagai sarana komunikasi dan

ekspresi serta pendekatan pembelajaran yang digunakan. Pada suatu saat bahasa merupakan sarana komunikasi dan sastra merupakan salah satu hasil budaya yang menggunakan bahasa. Pendekatan pembelajaran bahasa menekankan aspek kinerja atau kemahiran berbahasa dan fungsi bahasa adalah pendekatan komunikatif. Sementara itu, pada sisi lain pendekatan pembelajaran sastra menekankan pada apresiasi sastra (pendekatan apresiatif).

Pandangan tersebut di atas membawa konsekuensi: (a) pembelajaran bahasa haruslah lebih menekankan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi daripada pembelajaran tentang sistem bahasa. Sebagai pelaksanaan dari pandangan itu, dalam penyusunan silabus harus menekankan pada standar kompetensi dan materi yang berupa performansi, artinya realisasi dari pengetahuan tentang bahasa atau kemahiran berbahasa secara nyata.

Adapun sastra adalah salah satu bentuk sistem karya seni dengan media bahasa. Sastra hadir untuk dibaca dan dinikmati serta selanjutnya dimanfaatkan, antara lain untuk mengembangkan kehidupan kemanusiaan. Jadi, pembelajaran sastra harus beranjak dari kenyataan bahwa sastra merupakan salah satu bentuk seni yang dapat diapresiasi. Oleh karena itu, materi pembelajarannya serta teknik, tujuan dan arah pembelajaran dalam silabus harus lebih menekankan kegiatan yang bersifat apresiatif: dihayati dan dinikmati yang berbeda pada ranah afektif.

Pengembangan pengajaran bahasa daerah bertujuan untuk meningkatkan mutu pengajaran bahasa daerah sedemikian rupa sehingga penuturnya memiliki (a) keterampilan berbahasa daerah, (b) pengetahuan yang baik tentang bahasa daerah, dan (c) sikap positif terhadap bahasa dan sastra daerah.

Pembelajaran bahasa dan sastra Sunda bertitik tolak dari pandangan bahwa bahasa Sunda merupakan alat komunikasi bagi masyarakat pendukungnya. Komunikasi bahasa diwujudkan melalui kegiatan berbahasa lisan (menyimak-berbicara) dan kegiatan berbahasa tulis (membaca-menulis). Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Sunda dipusatkan untuk meningkatkan keterampilan berbahasa dan bersastra Sunda, kemampuan berfikir dan bernalar, serta kemampuan memperluas wawasan budaya Sunda. Juga diarahkan untuk mempertajam perasaan murid. Murid tidak hanya mahir berbahasa Sunda, pandai bernalar, tetapi juga memiliki kepekaan dalam berhubungan satu sama lain, dan dapat menghargai perbedaan yang berlatar belakang budaya Sunda.

Murid tidak hanya diharapkan mampu memahami informasi yang lugas dan tersurat, melainkan juga yang kias dan tersirat.

Agar murid mampu berkomunikasi, pembelajaran bahasa Sunda diarahkan pada kegiatan untuk membekali murid terampil berbahasa lisan dan berbahasa tulis. Murid dilatih lebih banyak menggunakan bahasa daripada pengetahuan tentang bahasa. Juga pembelajaran sastra Sunda diarahkan agar murid beroleh pengalaman apresiasi dan ekspresi sastra, bukan kepada pengetahuan sastra. Dalam sastra terkandung pengalaman manusia, yang meliputi pengalaman pengindraan, perasaan hati, kahyal, dan perenungan, yang secara terpadu diwujudkan dalam penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun secara tertulis. Melalui sastra murid diajak untuk memahami, menikmati, dan menghayati karya sastra. Pengetahuan tentang sastra hanyalah sebagai penunjang dalam mengapresiasi karya sastra. Dengan demikian, fungsi utama sastra sebagai penghalus budi, peningkatan kepekaan, rasa kemanusiaan, dan kepedulian sosial, penumbuhan apresiasi budaya, serta penyaluran gagasan dan imajinasi secara kreatif dapat tercapai dan tersalurkan.

Pemakaian bahasa Sunda yang nyata dipengaruhi berbagai konteks, antara lain, siapa penyapa dan pesapa, pada situasi bagaimana, di mana tempatnya, kapan waktunya, media apa yang digunakan, dan apa isi pembicaraannya. Untuk keperluan itu, dalam pembelajaran bahasa dan sastra Sunda dapat digunakan berbagai pendekatan, antara lain, pendekatan kompetensi komunikatif dan pendekatan kontekstual dengan berbagai media dan sumber belajar.

Murid adalah peserta yang aktif atau sebagai pelajar. Berkaitan dengan pembelajaran bahasa dan sastra Sunda, murid harus diberi kesempatan yang sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya untuk beroleh pengalaman berbahasa dan bersastra Sunda, melalui kegiatan reseptif (menyimak, membaca) dan kegiatan produktif (berbicara, menulis). Hal itu disampaikan dalam aspek kebahasaan, berupa kata, kalimaht, paragraf, dengan mempertimbangkan ejaan dan tanda baca dalam bahasa tulis serta unsur-unsur prosodi (intonasi, nada, irama, tekanan, tempo) dalam bahasa lisan.

3. Bahasa Sunda sebagai Bahasa Pengantar

Bahasa pengantar yang digunakan dalam pembelajaran ialah bahasa Sunda. Di sekolah-sekolah atau daerah yang mengalami kesulitan dengan pengantar bahasa Sunda, dapat digunakan bahasa Indonesia, baik sebagian maupun sepenuhnya. Tetapi, selalu disertai usaha untuk secara berangsur-angsur bisa memahami petunjuk dalam bahasa Sunda. Di daerah-daerah yang memiliki *basa wewengkon*, kata-kata dialek dapat difungsikan untuk mempercepat atau meningkatkan kualitas pembelajaran.

4. Sikap terhadap Pendidikan Bahasa dan Sastra Sunda

Sikap masyarakat dalam pemakaian bahasa dan sastra Sunda dan pembelajaran bahasa dan sastra Sunda di sekolah perlu ditingkatkan melalui kegiatan-kegiatan berikut ini.

- (1) Masyarakat yang ada di Jawa Barat sebaiknya harus bersahabat dengan bahasa dan sastra Sunda.
- (2) Di dalam kehidupan keseharian di rumah proses pendidikan budi pekerti melalui bercerita (*ngadongeng*) dari orang tua kepada anaknya perlu digalakkan kembali dengan metode yang sesuai dengan kondisi kehidupan sekarang.
- (3) Perlu menghilangkan sikap masyarakat menganggap bahwa bahasa dan sastra Sunda itu susah atau sulit.
- (4) Sikap (*katineung*) masyarakat Sunda terhadap bahasanya sendiri perlu ditingkatkan melalui media cetak dan media masa yang berbahasa Sunda.
- (5) Dengan gencarnya arus teknologi dan komunikasi (media cetak dan elektronik) sebaiknya dijadikan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berbahasa dan bersastra Sunda baik di sekolah maupun di masyarakat.
- (6) Dengan adanya perubahan paradigma ekonomi (perdagangan tradisional) pun akan mempersempit posisi pemakaian bahasa dan sastra Sunda. Oleh karena itu, pemerintah perlu mewaspadaikan pengembangan pembangunan kota dengan memperhatikan kearifan budaya lokal, di antaranya kehidupan bahasa dan sastra Sunda.
- (7) Para pejabat (di Jawa Barat) mulai dari Ketua RT sampai gubernur sudah mulai berbicara atau berpidato dengan menggunakan bahasa Sunda.

- (8) Dengan adanya migrasi, maka penduduk Jawa Barat lebih heterogen dan akan berdampak negatif terhadap perkembangan dan pelestarian bahasa dan sastra Sunda. Untuk itu, penduduk Jawa Barat pendatang harus menyesuaikan diri dengan kondisi lokal daerahnya.
- (9) Pembelajaran bahasa dan sastra Sunda di sekolah perlu dioptimalkan melalui (a) pengesahan kurikulum agar bahasa dan sastra Sunda diajarkan di sekolah-sekolah yang berada di Jawa Barat, (b) pengangkatan guru bahasa dan sastra Sunda dari mulai guru TK sampai SMA, (c) meresposisi kedudukan mata pelajaran bahasa dan sastra Sunda yang sejajar dengan mata pelajaran lainnya.
- (10) Pemerintah pusat perlu memiliki perhatian yang serius terhadap pembelajaran bahasa dan sastra Sunda, yang diutamakan adalah mata pelajaran muatan nasional, apalagi mata pelajaran yang diujikan secara nasional.
- (11) Mata pelajaran bahasa dan sastra Sunda dapat dijadikan sebuah persyaratan untuk kenaikan atau kelulusan atau ketuntasan yang akabitanya tidak diujikan dalam ujian akhir sekolah.
- (12) Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Jawa Barat perlu memfasilitasi peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan bahasa dan sastra Sunda.
- (13) Pendidikan Luar Sekolah (PLS) harus menyentuh sumber-sumber budaya lokal yang berpotensi untuk dijadikan sumber pendidikan, terutama pendidikan usia dini (PAUD).

D. Mekanisme Pelaksanaan

Pada prinsipnya, mekanisme kegiatan Pendidikan Berbasis Bahasa dan sastra daerah (Sunda) dilakukan melalui dua tahapan berikut ini.

1. Dinas Pendidikan Propinsi, terutama Balai Pengembangan Bahasa Daerah (BPBD) bersama Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten membentuk tim yang bertugas mengembangkan Program Pendidikan Berbasis Bahasa dan sastra daerah (Sunda) untuk memandu kegiatan pengembangan secara keseluruhan agar berjalan secara terfokus pada tujuan. Tim ini dapat disebut tim inti, yaitu dari para pakar bahasa dan sastra Sunda, guru-guru, pengawas, sastrawan, dan para pengarang.

2. Tim inti membentuk beberapa kelompok yang direkrut dari BPBD Disdik Propinsi, Disdik Kota/Kabupaten, Jurusan Pendidikan Bahasa Daerah FPBS, LBSS, PPSS, MGMP, guru, dan pengawas yang bertugas menyusun berbagai penyusunan Program Pendidikan Berbasis Bahasa dan sastra daerah (Sunda) seperti yang dikemukakan di atas. Tim ini dikukuhkan dengan Surat Keputusan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
3. Tim inti mereviu hasil kerja tim dan mendiskusikannya secara intensif, sehingga diperoleh draf final.
4. Semua panduan penyelenggaraan Program Pendidikan Berbasis Bahasa dan sastra daerah (Sunda) disosialisasikan kepada seluruh lembaga, instansi, termasuk guru, teknisi, laboran, dan tenaga administrasi agar mereka memahaminya dan memiliki kesiapan untuk mendukung program ini.
6. Tim yang ditetapkan tersebut melakukan evaluasi dan monitoring terhadap seluruh kegiatan yang terkait dengan Program Pendidikan Berbasis Bahasa dan sastra daerah (Sunda) dalam rangka peningkatan kualitas secara berkelanjutan.

BAB VI
STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN
MASYARAKAT BERBASIS NILAI BUDAYA DAN TRADISI DALAM
RANGKA PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DASAR
DI JAWA BARAT

A. Rasional

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung seumur hidup, dari sejak dalam kandungan, kemudian melalui seluruh proses dan siklus kehidupan manusia. Oleh karenanya secara hakiki pembangunan pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya pembangunan manusia. Upay-upaya pembangunan dibidang pendidikan pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia itu sendiri. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara pembangunan pendidikan merupakan wahana untuk mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan warga negara.

Karena pendidikan merupakan hak setiap warga negara, maka didalamnya mengandung makna bahwa pemberian layanan pendidikan kepada individu, masyarakat, dan warga negara adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga. Karena itu manajemen sistim pembangunan pendidikan harus didesain dan dilaksanakan secara terpadu dan diarahkan pada peningkatan akses pelayanan yang seluas luasnya bagi warga masyarakat, bermutu, efektif dan efisien dari persepektif manajemen.

Pembangunan pendidikan merupakan salah satu bagian yang sangat vital dan fundamental untuk mendukung upaya-upaya pembangunan dibidang lainnya. Pembangunan pendidikan dikatakan dasar bagi pembangunan lainnya mengingat secara hakiki upaya pembangunan pendidikan adalah untuk membangun potensi manusianya yang kelak akan menjadi pelaku pembangunan di berbagai bidang pembangunan lainnya.

Dalam setiap upaya pembangunan, maka penting untuk senantiasa mempertimbangkan karakteristik dan potensi setempat. Dalam konteks ini, setiap wilayah, setiap komunitas masyarakat memiliki potensi, budaya dan karakteristik tersendiri.

Upaya pembangunan pendidikan dasar telah menjadi landasan komitmen internasional sebagai visi bersama berbagai negara di dunia yang secara internasional melalui kesepakatan yang dikenal dengan kesepakatan *Dakkar-Sinegal* Tahun 2000. Kesepakatan Dakkar yang diimplementasikan dalam kesepakatan *Education For All* (EFA) yang meliputi komponen penting dalam upaya pendidikan-pendidikan di berbagai negara. Komponen tersebut adalah : (1) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); (2) Pendidikan Dasar (3) Pendidikan Keaksaraan; (3) Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill); dan (4) Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang mencakup program 6 tahun di SD dan program 3 tahun di SLTP atau yang sederajat. Oleh karena itu SLTP merupakan bagian dari jenjang pendidikan dasar yang tidak terpisahkan dari pendidikan SD.

Sejak dikeluarkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan dalam BAB IV pasal 6 ayat 1 bahwa “ setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar”, maka program pendidikan dasar bagi warga negara Indonesia seharusnya ditingkatkan dari universal basic education menjadi compulsory education. Ini berarti konsekuensinya adalah perlu adanya sanksi bagi yang tidak mau melaksanakan tanggungjawabnya baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua maupun peserta didik.

Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar 9 tahun) menjadi gerakan nasional pertama kali dicanangkan oleh Presiden Soeharto tanggal 2 Mei 1994 dengan target tuntas pada tahun 2005. Namun karena terjadinya krisis ekonomi yang menimpa bangsa Indonesia, maka target tersebut diperpanjang sampai dengan tahun 2008/2009 yang kemudian dipertegas dengan Inpres Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajar Dikdas Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA) dengan target meningkatnya APM SD/MI/Pendidikan yang sederajat (peserta didik usia 7-12 tahun) dan APK SMP/M.Ts/Pendidikan yang sederajat sekurang-kurangnya 95 % pada tahun 2008. Untuk mencapai target tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Mendiknas Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan GNP-PWB/PBA dengan strategi pelaksanaan antaralain lain : (1) memperluas dan meratakan layanan pendidikan bagi anak usia wajar dikdas

termasuk anak-anak dengan kebutuhan khusus terutama di daerah terpencil, terisolasi dan tertinggal (3 T) dan (2) mengembangkan dan mengimplementasikan model-model pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif/inovatif, efektif, menyenangkan, kontekstual, aktual, kongkrit dan bermakna bagi pengembangan siswa.

Untuk mencapai APK 95 % tahun 2008/2009 secara nasional pada tahun 2005 dihadapkan kepada kenyataan bahwa terdapat 133 kabupaten di Indonesia yang APKnya masih dibawah 75 % dan angka absolut yang tinggi. Khusus Propinsi Jawa Barat secara nasional pencapaian APK SMPnya tahun 2005 sebesar 80,39 % menduduki urutan ke 18 dari 33 propinsi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun paling banyak di Indonesia, yaitu sebesar 2.208.203 orang dan angka absolutnya yang belum terlayani sebanyak 432.958 anak. Angka absolut ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan Propinsi Sulawesi Barat sebagai propinsi terendah APK SMPnya, yaitu sebesar 60,25 % namun angka absolutnya hanya sebesar 28.422 anak yang belum terlayani. Berdasarkan kondisi ini Propinsi Jawa Barat sebagai salah satu propinsi dari empat propinsi yang termasuk kategori Tuntas Pratama (80 % - 84 %) (Depdiknas, Edisi I, 2006).

Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya di Jawa Barat, terdapat empat faktor utama sebagai penyebab rendahnya pencapaian APK dan APM SLTP yakni; **Pertama**, rendahnya jumlah anak tidak/belum sekolah dari keluarga tidak mampu, **Kedua**, rendahnya angka melanjutkan sekolah (SD/MI ke SMP/MTs = 61,97%), **Ketiga**, tingginya angka DO siswa (terancam DO=1.139.476, DO=50.661) dan, **Keempat**, rendahnya daya tampung sekolah (kerusakan SMP/MTs=3.151 ruang) (*Laporan Disdik Jabar,2005*).

Keempat faktor tersebut disebabkan oleh beberapa kondisi baik yang menyangkut aspek fisik maupun non fisik, yaitu: (1) Faktor Ekonomi, masih banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai buruh petani dan buruh serabutan lainnya dengan tingkat pendapatan yang rendah, sehingga tidak mampu membiayai sekolah anak-anaknya. (2) Faktor Geografis, masih banyak penduduk usia SLTP yang merasa kesulitan untuk sekolah ke SLTP, karena letak SLTP jauh dari rumah dengan sarana transportasi serta kondisi jalan terbatas dan (3) Faktor Sosial Budaya, seperti: budaya kawin muda, patuh tradisi dan taat kepada tokoh, pesantren minded, berorientasi kepada uang, pendidikan dianggap kurang penting, malas dan kurang motivasi untuk maju serta merubah nasib.

Oleh karena itu salah satu faktor yang harus diperhatikan untuk memperluas akses dan mutu pendidikan dasar di Jawa Barat adalah faktor sosial budaya masyarakat terutama masyarakat yang patuh tradisi dengan berbagai variasinya yang memandang bahwa pendidikan tidak penting. Masyarakat patuh tradisi ini adalah sekelompok masyarakat yang masih kuat mematuhi tradisi yang berlaku di lingkungannya dengan simbol tokoh (tokoh agama/adat) sebagai kuncinya.

B. Konsep Dasar

1. Arti dan Makna Pendidikan

Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna pendidikan diartikan sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan, baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan. Usaha-usaha yang dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma tersebut serta mewariskannya kepada generasi berikutnya untuk dikembangkan dalam hidup dan kehidupan yang terjadi dalam suatu proses pendidikan (Djumransjah, 2006:22). Menurut Sukmadinata (2006:58-59) ada tiga sifat penting dari pendidikan, yaitu: *pertama* pendidikan mengandung nilai dan memberikan pertimbangan nilai. Hal itu disebabkan karena pendidikan diarahkan pada pengembangan pribadi anak agar sesuai dengan nilai-nilai yang ada dan diharapkan masyarakat. Karena tujuan pendidikan mengandung nilai, maka isi pendidikan harus memuat nilai. Proses pendidikannya juga harus bersifat membina dan mengembangkan nilai. *Kedua*, pendidikan diarahkan pada kehidupan dalam masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan, tetapi menyiapkan anak untuk kehidupan anak dalam masyarakat. Generasi muda perlu mengenal dan memahami apa yang ada dalam masyarakat, memiliki kecakapan-kecakapan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat, baik sebagai warga maupun sebagai karyawan. *Ketiga*, pelaksanaan pendidikan dipengaruhi dan didukung oleh lingkungan masyarakat tempat pendidikan itu berlangsung. Kehidupan masyarakat berpengaruh terhadap proses pendidikan, karena pendidikan sangat melekat dengan kehidupan masyarakat. Proses pendidikan merupakan bagian dari proses kehidupan masyarakat. Pelaksanaan pendidikan membutuhkan dukungan dari lingkungan masyarakat,

penyediaan fasilitas, personalia, sistem sosial budaya, politik, keamanan dan lain-lain.

Konsep pendidikan yang dikemukakan oleh Freeman Butt dalam bukunya yang terkenal *Cultural History of Western Education*, bahwa (1) Pendidikan adalah kegiatan menerima dan memberikan pengetahuan sehingga kebudayaan dapat diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya; (2) Pendidikan adalah suatu proses. Melalui proses ini individu diajarkan kesetiaan dan kesediaan untuk mengikuti aturan. Melalui cara ini pikiran manusia dilatih dan dikembangkan; (3) Pendidikan adalah suatu proses pertumbuhan. Dalam proses ini individu dibantu mengembangkan kekuatan, bakat, kesanggupan dan minatnya; (4) Pendidikan adalah rekonstruksi dan reorganisasi pengalaman yang menambah arti serta kesanggupan untuk memberikan arah bagi pengalaman selanjutnya; (5) Pendidikan adalah suatu proses. Melalui proses ini seseorang menyesuaikan diri dengan unsur-unsur pengalamannya yang menjadi kepribadian kehidupan modern sehingga dalam mempersiapkan diri bagi kehidupan masa dewasa yang berhasil.

Menurut Djumransyah (2006:28) berdasarkan beberapa pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa ciri atau unsur umum dalam pendidikan, yaitu: (1) Pendidikan mengandung tujuan yang ingin dicapai, yaitu individu yang kemampuan-kemampuan dirinya berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidupnya baik sebagai seorang individu maupun sebagai warga negara atau warga masyarakat. (2) Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan perlu melakukan usaha yang disengaja dan terencana untuk memilih isi (bahan materi), strategi kegiatan dan teknik penilaian yang sesuai. (3) Kegiatan tersebut dapat diberikan di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat, berupa pendidikan jalur sekolah (formal) dan pendidikan jalur luar sekolah (informal dan non formal).

2. Arti dan Makna Kebudayaan

Berbicara tentang kebudayaan, maka akan langsung tertuju kepada konsep dan pengertian dari istilahnya itu. Banyak berbagai definisi telah dikemukakan oleh para ahli bidang sosial budaya seluruh dunia dan telah menghasilkan berbagai macam definisi kebudayaan baik secara sempit maupun

secara luas sesuai dengan hakikat kebudayaan itu yang kompleks dan universal. Definisi yang sering dijadikan pijakan oleh para ahli adalah yang dikemukakan oleh E.B Tylor (Soerjono Soekanto, 2002 : 172) yang menyatakan bahwa kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat-istiadat dan lain kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Secara formal budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama, waktu, peranan, hubungan ruang, konsep alam semesta, objek-objek materi dan milik yang diperoleh sekelompok besar orang dari generasi ke generasi melalui usaha individu dan kelompok (Dedy Mulyana, 2000 : 18). Definisi Tylor tersebut amat luas dan mencakup seluruh aspek dari kebudayaan itu, namun secara ringkas inti pengertian kebudayaan dapat dimaknai bahwa: (1) kebudayaan itu sangat beragam, (2) kebudayaan itu di dapat dan diteruskan secara sosial melalui pendidikan, (3) kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologis, psikologis, dan sosiologis dari eksistensi manusia, (4) kebudayaan itu berstruktur, (5) kebudayaan itu dinamis dan (6) kebudayaan itu relatif.

Namun demikian menurut Haryati Soebadio (1987 : 20) terdapat definisi kerja tentang kebudayaan yang jauh lebih singkat dan sanggup mencakup penjabaran pengertiannya secara praktis, yaitu bahwa kebudayaan merupakan sistem nilai dan gagasan utama (vital) yang dihayati oleh suatu kelompok masyarakat dalam kurun waktu tertentu, sehingga mendominasi keseluruhan kehidupan masyarakat itu dalam arti mengarahkan tingkah laku, memberi pola, memberi seperangkat model untuk bertingkah laku.

Sistem nilai dan gagasan utama sebagai hakekat kebudayaan terwujud dalam tiga sistem budaya secara lebih terperinci, yaitu sistem ideologi, sistem sosial dan sistem teknologi. **Sistem ideologi**, meliputi etika, norma, adat-istiadat, peraturan dan hukum yang berfungsi sebagai pengarah untuk sistem sosial dan berupa interpretasi, operasionalisasi dari sistem nilai dan gagasan utama yang berlaku dalam suatu masyarakat. **Sistem sosial**, meliputi hubungan dan kegiatan sosial di dalam masyarakat, baik yang terjalin dalam lingkungan kerabat, maupun yang terjadi dengan masyarakat lebih luas serta dengan pemimpin-pemimpinnya. Pengendalian masyarakat dan pemimpin berkembang sesuai dengan nilai budaya dan gagasan utama yang berlaku. **Sistem**

teknologi, meliputi segala peralatan serta cara penggunaannya sesuai dengan nilai budaya yang berlaku. Dalam kebudayaan yang agraris misalnya, dengan sendirinya sistem teknologinya sesuai dengan keperluan pertanian.

Menurut para ahli sosiologi-antropologi budaya, isu pengkajian dan penelitian budaya - khususnya adat istiadat, dapat dilacak dari dua dimensi. *Pertama*, merujuk kepada hasil kajian pustaka yang bersangkutan paut dengan keberadaan masyarakat (Susanto, 1998). *Kedua*, kajian lapangan (*field work*) para peneliti beserta referensinya tentang adat istiadat masyarakat beserta kebudayaannya (Suwarsih Warnaen, 1998; Yudhistira K. Gharna, 1990). Para sarjana antropologi mengungkapkan bahwa dalam kebudayaan manusia itu ada unsur-unsur yang universal, artinya unsur-unsur kebudayaan yang bisa didapat dalam semua kebudayaan di manapun di dunia. Unsur-unsur ini disebut *cultural universals*. Sedangkan G.P. Murdock (1945: 123-142) menyebut unsur-unsur itu *common domination of culture*. Mengenai apakah yang dapat disebut *cultural universals* itu, ada beberapa pandangan di antara para sarjana antropologi. Pandangan yang berbeda-beda itu serta alasan-alasannya diuraikan oleh C. Kluckhohn dalam sebuah karangan bernama *Universal Categories of Culture* (1953). Dengan mengambil inti dari berbagai macam skema tentang *cultural universals* yang disusun oleh berbagai orang sarjana itu, maka kita dapat menganggap tujuh unsur kebudayaan sebagai kultural universals yang bisa didapatkan pada semua masyarakat di dunia, yaitu: (1) sistem peralatan dan perlengkapan hidup, (2) sistem mata pencaharian hidup, (3) sistem kemasyarakatan, (4) bahasa, (5) kesenian, (6) sistem pengetahuan, dan (7) sistem religi.

Unsur-unsur kebudayaan yang universal tersebut itu dapat dianggap juga sebagai isi dari kebudayaan manusia pada umumnya, dan dengan demikian dapat kita sebut pokok-pokok atau subjek-subjek dari etnologi. Memang kalau kita berikan sebagian besar dari kitab-kitab etnografi yang memberikan pelukisan tentang kebudayaan sesuatu suku bangsa, maka ketujuh unsur tersebut di atas itulah yang menjadi pokok-pokok pembicaraan. Sudah barang tentu pokok-pokok pembicaraan etnologi menjadi juga pokok-pokok pembicaraan antropologi sosial.

Tiap pokok khusus dari etnologi antropologi sosial tersebut dibagi ke dalam berbagai pokok khusus lagi. Pokok-pokok khusus yang merupakan itu lebih lanjut dari tiap dari ketujuh *cultural universals* tadi. Sistem peralatan dan

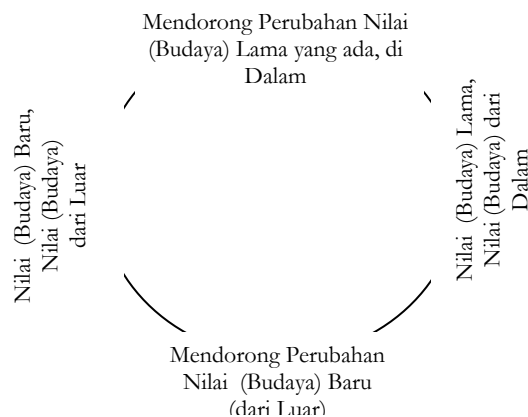
perlengkapan hidup manusia, terdiri dari alat-alat produktif, alat-alat distribusi dan transpor, wadah-wadah dan tempat-tempat untuk menaruh, makanan dan minuman, tempat berlindung dan perumahan, dan senjata. Sistem mata pencaharian hidup, terdiri dari atas berburu dan meramu, perikanan, bercocok tanam di ladang, bercocok tanam tidak tetap, peternakan, dan perdagangan. Sistem kemasyarakatan, terdiri atas sistem kekerabatan, sistem kesatuan hidup setempat, asosiasi dan perkumpulan-perkumpulan, sistem kenegaraan. Bahasa terdiri dari bahasa lisan dan bahasa tertulis. Kesenian terdiri atas seni patung, seni relief, seni lukis dan gambar, seni rias, seni vokal, seni instrumental, seni kesusasteraan, dan seni drama. Sistem pengetahuan, terdiri dari: pengetahuan tentang sekitaran alam, pengetahuan tentang alam flora, pengetahuan tentang alam fauna, pengetahuan tentang zat-zat dan bahan-bahan mentah, pengetahuan tentang tubuh manusia, pengetahuan tentang kelakuan sesama manusia, pengetahuan tentang ruang, waktu, dan bilangan. Sedangkan sistem religi dan kehidupan kerohanian, terdiri dari sistem kepercayaan, kesusasteraan suci, sistem upacara keagamaan, komunitas keagamaan, ilmu gaib, dan sistem nilai dan pandangan hidup.

Berkenaan dengan pola universal kebudayaan ini, Clark Wissler (Joseph S. Roucek & Ronald L. Warren, 1984) mengemukakan sembilan aspek, yaitu pertuturan, sifat kebendaan, kesenian, dongeng dan pengetahuan ilmiah, praktik-paraktik keagamaan, keluarga dan sistem sosial, harta, negara, dan peperangan. Lebih lanjut diungkapkan bahwa, dalam rangka analisis kebudayaan, peneliti dapat memusatkan kajiannya pada sifat, kompleks, kawasan, dan tema atau pola kebudayaan.

Nilai budaya dalam suatu masyarakat dapat berubah. Menurut Malinowski (Darusman, 2000) perubahan budaya itu merupakan evolusi bebas dan proses difusi. Perubahan nilai budaya melalui evolusi bebas terjadi karena didorong oleh faktor-faktor dominan secara serempak, sedangkan proses difusi merupakan hasil dari adanya hubungan dengan budaya lain. Kemajuan ilmu dan teknologi telah mendorong terjadinya proses evolusi. Perubahan budaya terjadi disebabkan adanya pengaruh dari budaya yang lebih tinggi atau budaya yang mempengaruhi terhadap budaya yang lebih rendah atau yang menerima. Perubahan budaya tersebut, dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti mengaburkan atau merusak yang ada, pengambilalihan atau penolakan,

pengambilan sebagian, dan penumbuhan institusi baru yang merupakan penyatuan dari budaya yang berbeda. Dalam proses perubahan budaya, agen perubahan sangat penting. Agen yang dimaksud di sini bisa berupa tokoh masyarakat, golongan terpelajar, mubaligh, dan banyak lagi.

Dalam perubahan budaya yang merupakan suatu difusi, terjadi pemindahan unsur budaya lama ke budaya lain yang cenderung berbeda. Malinowski (Darusman, 2000) mengemukakan bahwa proses difusi menunjukkan bukan proses mengambil tanpa memilih atau mengambil secara kebetulan, tetapi merupakan proses yang diarahkan oleh kekuatan dan tekanan tertentu baik dari pihak yang memberi atau penolakan yang menerima. Hasil difusi tersebut adalah terjadinya campuran budaya dari unsur yang sebagian berintegrasi dan hanya dapat dipahami melalui budaya induknya dan hanya dapat diketahui melalui masa lampau. Budaya bukan hanya percampuran semata, melainkan merupakan proses yang diubah dan disesuaikan dengan cara yang dinamik sesuai dengan kepentingan masyarakatnya. Secara skematik perubahan budaya itu dapat digambarkan seperti berikut.



Gambar 1. Model Perubahan Budaya menurut Ndraha (1997: 91)

Bergeraknya kebudayaan dilakukan dengan ritme triganda; yaitu membenarkan, menolak, dan mengintegrasikan (Bakker, 1992). Ketiganya itu berjalan dengan secara terintegrasi yang diwujudkan secara parsial dan suksesi. Ketika satu sektor diintegrasikan secara memuaskan, sektor lain sudah masuk taraf labil yang berakhir dengan status survival saja. Oleh karena itu, kebudayaan tidak dapat dipahami secara statis dan sinkronistik saja, melainkan juga secara diakronis, mengikuti proses perkembangan dalam peredaran zaman.

Proses pencampuran kebudayaan dari kebudayaan lama yang primitif, merupakan potensi besar yang apabila dibiarkan akan mengalami kelabilan. Efek yang paling besar adalah budaya tersebut akan roboh karena menghadapi tekanan dari budaya lain yang begitu tinggi. Struktur kebudayaan lama dan asli dapat berkembang, baik itu menurut polanya sendiri maupun dengan asimilasi unsur lain tanpa tenggelam oleh proses percampuran budaya lainnya. Leur (Bakker, 1992) mengemukakan "*in any discussion of the pre Hindu cultural situation in Indonesia---or at least on Java--- the term 'primitive' need to be discarded as suggesting a completely fallacious assumption and saying nothing*".

Pembinaan kebudayaan dapat berlangsung melalui proses-proses asasi. Proses asasi ini meliputi inkulturasi, akulturasi dan modernisasi. Ketiga proses ini merupakan satu kesatuan yang saling mengikat dan memiliki hubungan yang timbal balik dan berganti-ganti, sehingga diantara ketiganya dapat menjadi dan/atau merupakan penghalang atau pendorong diantara ketiganya. Darusman (2000) mengemukakan bahwa inkulturasi merupakan proses latihan dimana seseorang diintegrasikan ke dalam kebudayaan sezaman dan setempat. Saluran inkulturasi yang utama adalah pendidikan dari mulai kecil di dalam keluarga, masyarakat, sekolah, warga negara, dan penduduk dunia, untuk ikut serta dalam mendukung dan memajukan kebudayaan. Objek inkulturasi adalah aspirasi, intuisi, sikap keyakinan, harapan, perasaan dan penilaian yang merupakan komponen kepribadian dasar (*basic personality structure*). Jadi, yang menjadi objek dari inkulturasi adalah kepribadian dasar.

Pengertian akulturasi dikemukakan oleh panitia dari Social Science Research Council (Bakker, 1992) sebagai berikut: "acculturation comprehends those phenomena which result when group of individuals having different cultures come into continuous first-hand contact, with subsequent changes in the original cultural patterns of either or both groups". Untuk dapat berhasil baik, akulturasi perlu dipenuhi dengan beberapa syarat, yaitu persenyawaan, keseragaman, fungsi, dan seleksi. Akulturasi adalah proses midway antara konfrontasi dan difusi. Dalam konfrontasi belaka, dua pihak berhadapan satu sama lain dalam persaingan yang mungkin menimbulkan konflik. Ketegangan antara kedua pihak itu tidak diruncingkan, melainkan tanpa pinjam-meminjam diciptakan suasana koeksistensi. Kedua pihak saling menghormati, dapat mencapai saling pengertian, bahkan kerjasama dalam kepentingan yang terbatas.

3. Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan secara menyeluruh, pendidikan merupakan jalan, saluran untuk meneruskan kebudayaan, dalam arti pendidikan merupakan alat untuk menanamkan kemampuan bersikap, bertingkah laku disamping mengajarkan ketrampilan dan ilmu pengetahuan untuk bisa memainkan peranan sosial secara menyeluruh dan sesuai dengan tempat dan kedudukan individu dalam masyarakat (Haryati Soebadio, 1987 : 37). Dalam arti sempit seperti dikemukakan oleh Lodge dalam bukunya "Philosophy of Education adalah pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat istiadat (tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya.

Menurut Nursid Sumaatmadja (2002:40) hubungannya antara pendidikan dan kebudayaan paling tidak terdapat kata-kata kunci, yaitu: bahwa pendidikan itu merupakan proses kegiatan akulturasi (pembudayaan), proses institusionalisasi (pelembagaan), transfer (pengalihan), imparting (memberikan, menggambarkan), explain (menjelaskan), justify (menjelaskan), dan directing (mengarahkan).

Lebih jauh Nursid Sumaatmadja mengemukakan kerangka gagasan dasar tentang pendidikan (fundamental ideas of education) bahwa : (1) Manusia sebagai makhluk budaya, memiliki potensi dasar akal pikiran yang berkembang dan dapat dikembangkan (dididik), (2) Sebagai makhluk budaya, memiliki sejumlah kebutuhan mental yang meliputi kebutuhan-kebutuhan spiritual, sosial, emosional, pemahaman dan ketrampilan, hal itu semua dapat dipenuhi melalui pendidikan. (3) Aspek-aspek mental yang menjadi kebutuhan hidup manusia sebagai makhluk budaya, tercermin dan tampil pada prilakunya, (4) Prilaku manusia sebagai makhluk budaya, dalam kehidupan bermasyarakat, berpijak pada pembakuan nilai dan norma yang berlaku, dan (5) Melalui proses belajar, manusia sebagai peserta didik menjadi manusia yang manusiawi

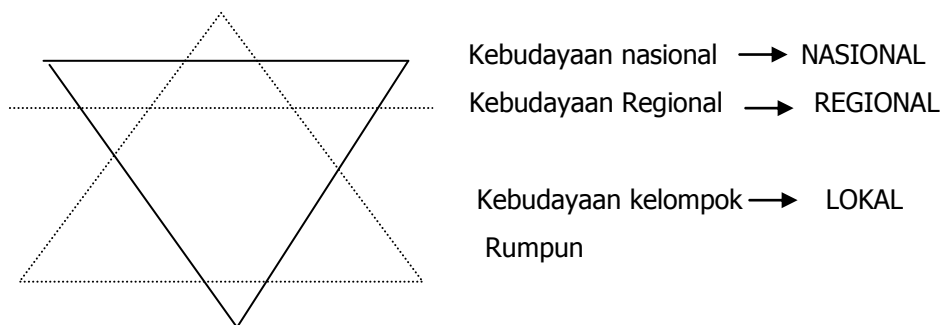
Hakekat pendidikan adalah suatu proses menumbuhkembangkan eksistensi peserta didik yang memasyarakat, membudaya dalam tata kehidupan yang berdimensi lokal, nasional, dan global. Menurut Tilaar (1999 : 28-29) hakekat pendidikan tersebut mengandung komponen-komponen : (1) Pendidikan

merupakan suatu proses berkesinambungan (2) Proses pendidikan berarti menumbuhkembangkan eksistensi manusia. (3) Eksistensi manusia yang memasyarakat. (4) Proses pendidikan dalam masyarakat yang membudaya, dan (5) Proses bermasyarakat dan membudaya mempunyai dimensi-dimensi waktu dan ruang.

Pendidikan dan kebudayaan memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan kebudayaan. Tanpa proses pendidikan tidak mungkin kebudayaan itu berlangsung dan berkembang. Proses pendidikan tidak lebih dari sebagai proses **transmisi kebudayaan**. Seperti dijelaskan oleh Fortes (dalam Tilaar, 1999 : 54) didalam transmisi tersebut adanya tiga unsur utama, yaitu: 1) **unsur-unsur yang ditransmisikan**, 2) **proses transmisi**, dan 3) **cara transmisi**. Dalam perspektif Antropologi, pendidikan merupakan **transformasi** sistem sosial budaya dari satu generasi ke generasi lainnya dalam suatu masyarakat.

Menurut Garna (1992 : 10) secara umum pendidikan ialah upaya **akulturasi** dari generasi tua kepada generasi muda. Dalam konteks kehidupan bernegara pendidikan dapat berfungsi membentuk suatu kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional. Pendidikan memiliki arti penting dalam pembangunan bangsa dan negara, baik dalam pembentukan integritas bangsa maupun untuk kemajuan bangsa dan negara.

Khusus fungsi pendidikan dalam pembentukan kebudayaan nasional dijelaskan oleh Garna (1992 : 15-16) ke dalam dua skema berikut ini.

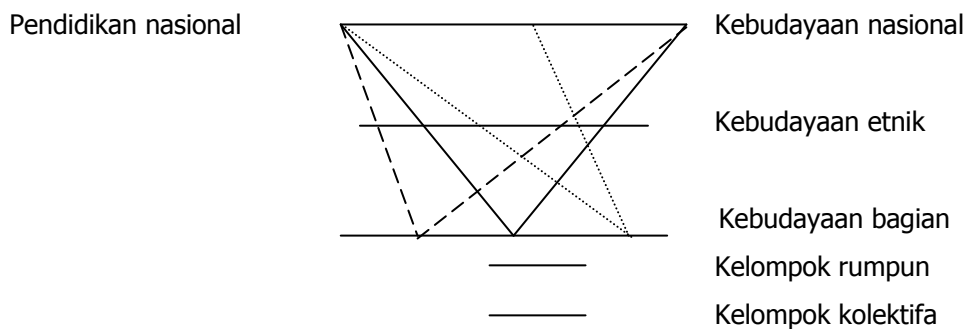


Gambar 2 : Kebudayaan nasional, regional, dan lokal

Alur dan mekanisme kebudayaan dalam masyarakat transformasinya mengandung proses pendidikan, akan merupakan alur pula untuk melihat bagaimana dan sejauhmana menurut posisi itu pendidikan berperan. **Gambar 2** memperlihatkan alur hirarkis kebudayaan lokal terhadap regional yang

melingkupi berbagai masyarakat dan budaya etnik, bagian etnik, kelompok rumpun ataupun kelompok kolektifa masyarakat, dan demikian pula gerak sebaliknya. Arah sejajar memperlihatkan lingkup yang luas menurut hirarkinya masing-masing, nasional, regional ataupun lokal, sedangkan di bawah lokal ialah kumpulan para individu pendukung kelompok budaya lokal tersebut. Pada setiap tahap ada dua kemungkinan bentukan, yaitu ***tahap nasional*** mungkin bentukan dari regional yang merupakan pengejewantahan dari tahapan di bawahnya; dan ***tahap regional*** dari lokal yang berurun memberikan unsur-unsur budayanya.

Pada ***gambar 3*** terlihat dari keseluruhan berasal pada tahap nasional, yang bergerak alur ke bawah. Paling tidak ada dua kemungkinan, yaitu konsep luas lingkungnya pada tahap nasional tetapi makin sempit di tahap lokal dengan isi yang terkristalisasi; atau sampai ke tahap lokal diterima secara sempit menurut unsur tertentu saja pada tahap lokal. Kedua alur gerak itu tetap melalui tahap regional.



Gambar 3. Peranan Pendidikan dan Alur Kebudayaan Nasional

Skema ini memberikan gambaran bahwa pendidikan sebagai rekayasa kebudayaan dapat mengikuti gerak alur skema bentukan kebudayaan lokal -> regional -> nasional, atau sebaliknya; karena itu konsep yang luas lingkungnya pada tahap nasional perlu ditajamkan dalam operasionalisasinya terhadap keberadaan lokal. Dengan demikian kemampuan menyerap tak terlepas dari keseluruhan lingkup konsep tersebut, sedangkan budaya regional menjadi antara dari dua alur itu. Gerak sebaliknya dari lokal ke atas, apabila arah kerucut dibalikkan, maka unsur tertentu saja yang menjadi orientasi lokal. Arah ini mungkin berlaku bagi mereka yang mencari kedalaman melalui pendidikan dengan tetap mendasarkan kepada keseluruhan budaya lokalnya.

4. Masyarakat dan Kebudayaan Sunda

Suku Sunda adalah masyarakat yang secara turun-temurun menggunakan bahasa Sunda beserta dialektisnya sebagai bahasa ibu dalam pergaulan sehari-hari serta berasal dan bertempat tinggal di Jawa Barat (Hartoyo dalam Koentjaraningrat, 1979). Secara antropologi budaya, masyarakat Sunda adalah masyarakat yang berasal dan bertempat tinggal di daerah Jawa Barat atau sering dikenal dengan Tanah Pasundan atau Tatar Sunda.

Kendati demikian, secara geografis, bumi Sunda itu dapat dibedakan menjadi tiga medan, yaitu: (1) dataran rendah pesisir utara yang sebaian besar terdiri atas sawah-sawah, (2) dataran tinggi pegunungan yang terbentang dari Barat ke Timur, dan (3) dataran-dataran tinggi yang terpusat di kota Bogor, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bandung, dan Tasikmalaya (Nashir dan Muttaqien dalam Najib *et al.*, 1996). Dilihat dari dimensi kultural dalam batas hirarkhi bahasa dan geografis, masyarakat Sunda di wilayah Banten dan Cirebon selain menggunakan Bahasa Sunda juga Bahasa Jawa sebagai pengaruh kedatangan Islam dari pesisir utara Jawa Tengah. Bahasa Sunda juga digunakan di berbagai daeral di luar Jawa Barat, seperti di Tegal, Brebes, Banyumas, dan di daerah transmigran Lampung Selatan.

Berdasarkan tingkat kehalusan bahasa yang digunakan, Najib *et al.* (1996) mengelompokkan budaya Pasundan ke dalam tiga wilayah kultural. *Pertama*, wilayah Priangan yang meliputi Cianjur, Sukabumi, Bandung, sumedang, Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis. Di wilayah Priangan ini dapat dikatalan lebih berbudaya Sunda dibandingkan dengan wilayah lainnya. *Kedua*, wilayah kultural Banten, Cirebon, Bogor, dan Karawang dengan penggunaan Bahasa Sunda yang dianggap tidak atau kurang halus. *Ketiga*, wilayah kultural yang menggunakan bahasa buhun atau kuno yakni orang Sunda di wilayah Baduy yang dikenal sebagai orang Pasundan Pedalaman.

Masyarakat Sunda atau suku Sunda memiliki adat-istiadat yang sudah lama turun temurun dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Adat istiadat ini menurut Suryadi (1974), Ahip Prawira Soeganda (1982), Hasan Mustafa (1991) dan Depatemen Pendidikan (1981) melingkupi seluruh kehidupan manusia sejak lahir hingga meninggal (*life cycle*). Adat-adat yang biasa dijumpai sepanjang kehidupan masyarakat Sunda adalah sebagai berikut:

- 1) Kelahiran. Sebelum lahir, bagi anak yang sedang diukandung ibunya dikenai upacara adat orang ngidam, adat menjaga orang hamil, hajat bangsal, tingkeban, mandi kembang, dan hajat bubur bodas. Setelah lahir, dikenal adanya indung beurang, pemeliharaan bayi dan ibunya, pemeliharaan tembuni, peringatan-peringatan untuk suami, penyerahan kembali istri yang baru bersalin kepada sang suami, mudun lemah, sawaha kepada indung beurang, ekah pada hari ketujuh, mahimun atau tasyakuran pada usia bayi 40 hari, lehinala (ngaleunggeuh, mandi kembang dan lain-lain), bacakan atau ulanmg tahun.
- 2) Perkawinan yang meliputi: (a) pertunangan; (b) perkawinannya sendiri, yang terdiri atas melamar (meminang), ngeuyeuk seureuh, nyawer, buka pintu, huap lingkup, dan numas.
- 3) Dalam kehidupan yang meliputi: (a) kerja, terutama difokuskan dalam bertani, diungkap mengenai ethos, mitos, dan teknosnya, seperti penanaman benih, nyalin (permulaan menuai), pembuatan ibro, cepil dan pengiring-pengiringnya, serta pengangkutan; (b) obat-obatan, sebagian besar diterangkan bumbu-bumbunya, cara membuatnya, dan cara memakainya, seperti balur haneut, bura beuweung, jamu empat puluh hari, galogor, pipilis, poho, pupuk, sasambahan, sasawahan, ubar haseum, wewejeh, dan pahinum; (c) dewa, dewi, dan wali yang dipertinggi seperti Nyai Mas Bumi Siti Pertiwi, Nyai Pohaci, Nyai Sri, Dewi Muni, Ratu Nawangwulan, Sanghyang Wenang, Batar Wiondubwana, Sanghyang Guru, Sanghyang Naga, Sanghyang Narada, Sulanjana, Sunan Kalijaga, Kian Santang, dan Prabu Siliwangi; (d) iblis, hantu, hewan yang ditakuti manusia seperti: Sang Idajil, Sang Kalabuat, Sapi Gumarang, Kunti Anak, Jurig Cai, Jurig Babi (Babi Kajajaden), Jurig Belukang, Koreak (Manuk Jurig); (e) pamali-pamali (larangan) untuk ayah-ibu, untuk anak sunat, dalam bulan Mulud-Rowah-Safar, untuk gadis yang sedang bertunangan, untuk wanita yang sedang mengandung, dalam memelihara beras-nasi-padi, untuk pengantin dalam tujuh hari; (f) falakiah-falakiah seperti untuik menghilangkan bahaya dari wanita yang sedang mengandung, orang yang meninggal hari Sabtu, orang sakit, supaya bayi cepat keluar, bayi lahir belum berupa, bayi lahir berupa hewan, ngarunghal, dan padi lelah; (g) hajatan-hajatan yang meliputi sedekah batin paturon, sedekah kain putih, nasi kuning, nyalin (sebelum

memotong padi) dan sedekah-sedekah kematian; (h) jampi-jampi (mantera) seperti bayi kena hantu, bayi sawan, sebelum meraba bayi, untuk menghilangkan burut, untuk orang meninggal, bayi tidak menangis, diucapkan sebelum menghanyutkan atau mengubur tembuni, dan supaya beras/padi tetap cukup; (i) sawer-sawer seperti sawer orok, sawer panganten, sawer budak sunat, buka pintu; (j) cerita rakyat (legenda) seperti sasakala tempat, seperti Bandung dengan Sangkuriangnya dan situ Bagendit, isu-isu dan gosip; (k) pakauman atau kelompok yang meliputi kelompok informal dan kegotongroyongan; (l) kekerabatan atau "dulur" atau "kindred", yang meliputi baraya deukeut, baraya jauh, bondoroyot, pacaduan-pacaduan (larangan-larangan), pantangan-pantangan, tabu, dan lain-lain. Yang biasa ada yang sampai 7 turunan, dan lain-lain; (m) keturunan, biasanya untuk 7 turunan ke atas dan ke bawah garis keturunan orang Sunda bilateral. Hal ini akan terjadi seperti panca kaki setiap pertama kali bertemu, hubungan kekeluargaan, yaitu menempatkan diri apa menjadi anak -- adik atau kakak, paman atau bibi, dan lain-lain, ditandai dengan sebutan ayi/adi, akang, emang, bapa, dan lain-lain. Anak laki-laki mengembala ternak dan memberi makan ternak (ngarit) anak perempuan membantu ibu di rumah; (n) perkumpulan, seperti organisasi politik, taruna karya, LSM – LSM, dan lain-lain.; (o) alam pemikiran dan sistem berpikir, mencakup waktu yang dimuliakan, perhitungan-perhitungan, perasaan-perasaan, lega, tata, titi, surti, arti, ati, ngaruat, dan lain-lain.; (p) permainan-permainan yang mencakup bebeuleungan, congkak, dogdog loyor, gatrik, kobak, ngadu muncang, oray-orayan, pal-palan, pangpung, surser, serok, susumputan/sasalimpetan, turik oncom, pacublek-cublek uang, ucing kalangkang, perepet jengkol, ucing peungpeun, ucing kuriling, galah Bandung, ecer (dialek) di Karawang, dan lain-lain.; (q) kesenian, mencakup nyanyi Cianjuran (tembang), kawih, degung, gamelan (kliningan), wayang, kacapi suling, macapet, pantun, lais, bajidoran, marhaba, tayuban, tari, ketuk tilu, banjet, silat, dan lain-lain.

- 4) Adat-adat dalam kematian, mencakup : (a) memandikan, (b) penguburan yang meliputi nyusur tanah, mengubur, dan lain-lain.; (c) sedekah, (d) penanaman kamboja, hanjuang, beringin, dan lain-lain.; (e) tahlilan, meliputi

tiluna (3 hari), tujuhna (7 hari), matang puluh (40 hari), natus (100 hari), mendak (ulang tahun kematian), newu (hari ke 1000).

5. Masyarakat Patuh Tradisi

Dalam kehidupan, masyarakat secara umum memiliki nilai-nilai budaya yang cenderung dapat mengendalikan tata kelakuan masyarakat itu sendiri. Di masyarakat pedesaan, mereka memiliki budaya yang cenderung saling ketergantungan yang tinggi, mampu mencegah terjadinya konflik, dan kuat memegang tradisi. Masyarakat seperti ini dan tinggal di pedesaan sering disebut sebagai masyarakat tradisional. Hal ini berbeda dengan masyarakat modern, dimana bagi masyarakat modern budaya ketergantungan kepada orang mulai pudar dan cenderung individual dan kerap kali menilai seseorang dari apa yang terlihat atau objeknya serta kurang memperhatikan rasa kebersamaan.

Dalam masyarakat Jawa Barat secara khusus masih terdapat masyarakat adat yang patuh tradisi seperti masyarakat Kampung Naga di Tasikmalaya, masyarakat cigugur di Kuningan, masyarakat Kampung Benda di Cirebon, dan kelompok masyarakat adat lainnya yang tersebar di Kabupaten Garut, Ciamis, Sumedang. Masyarakat adat ini merupakan masyarakat yang masih mempertahankan adat-istiadatnya secara turun-temurun dan masih dapat menjaga dari pengaruh-pengaruh budaya luar. Perubahan sosial dan budaya yang terjadi pada masyarakatnya cenderung lambat, hal itu karena keterbatasan akses terhadap sumber-sumber informasi. Keterbatasan akses terhadap sumber-sumber informasi tersebut baik karena faktor tradisi itu sendiri maupun karena kendala geografis dan minimnya sarana transportasi dan komunikasi.

Profil masyarakat adat yang patuh tradisi di Jawa Barat menunjukkan adanya perbedaan-perbedaan yang mendasar berdasarkan sifat dan karakteristik masyarakat itu, yaitu ada yang tertutup terhadap budaya luar termasuk terhadap program-program pembangunan dari pemerintah dan ada yang terbuka. Kemudian dilihat dari nilai-nilai budaya dan tradisi yang dianut terdapat masyarakat adat yang tradisinya di landasi oleh ajaran Agama Islam dan yang dilandasi oleh adat-tradisi semata atau oleh ajaran agama leluhur atau nenek moyang. Namun walaupun demikian terdapat persamaan-persamaan yang mendasar diantara masyarakat adat itu.

Persamaan – persamaan esensi nilai budaya dan tradisi masyarakat adat dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- (1) Banyak hal yang ditabukan atau yang menjadi pantangan
- (2) Penghormatan dan kepatuhan kepada tokoh (kepala adat/kyai/kuncen) sangat kuat
- (3) Menjungjung tinggi nilai-nilai gotong royong, kekeluargaan dan kebersamaan
- (4) Harmoni dengan lingkungan alam sekitarnya
- (5) Pewarisan nilai budaya dan tradisi melalui upacara adat dan pendidikan di keluarga
- (6) Mata pencaharian masyarakat umumnya pada bidang pertanian tradisional dan sebagai buruh tani atau buruh bangunan

6. Pendidikan Berbasis Nilai budaya dan Tradisi

Pendidikan berbasis nilai budaya dan tradisi dapat diartikan ke dalam dua pengertian, yaitu: *pertama*: teori dan praktek pendidikan yang terjadi dan ada dalam masyarakat adat yang patuh tradisi dan sudah melembaga menjadi pranata pendidikan dalam masyarakat. Pranata pendidikan yang terjadi hasil dari kreasi budaya mereka yang sangat mungkin berbeda dengan model-model pendidikan yang ada di luar masyarakatnya. *Kedua*; pendidikan yang diformulasikan dan berlandaskan atau menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi yang terdapat dalam masyarakat adat itu

Dalam konteks ini, maka pengertian yang digunakan adalah pengertian yang kedua. Oleh karena itu penyelenggaraan pendidikan berbasis nilai budaya dan tradisi untuk perluasan dan peningkatan mutu pendidikan dasar adalah model-model pendidikan atau pola satuan pendidikan pada tingkat SD dan SMP yang sudah dikembangkan atau yang belum dikembangkan dengan berlandaskan atau menyesuaikan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat setempat. sehingga masyarakat tanpa terasa atau tanpa disadari mau dan terlibat dalam program pendidikan tersebut.

7. Model-Model Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Nilai Budaya Dan Tradisi

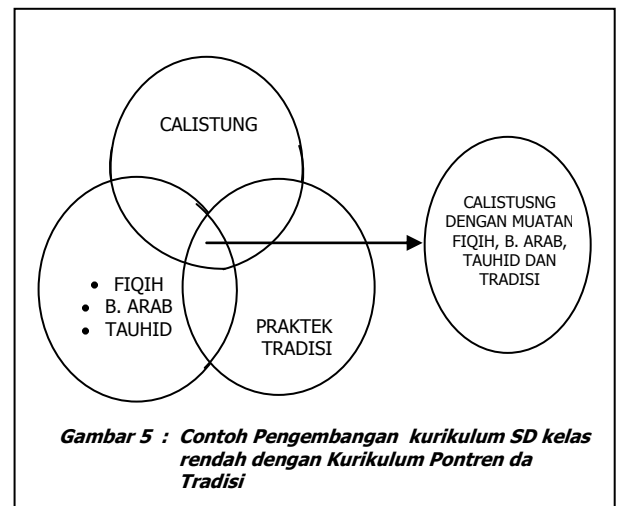
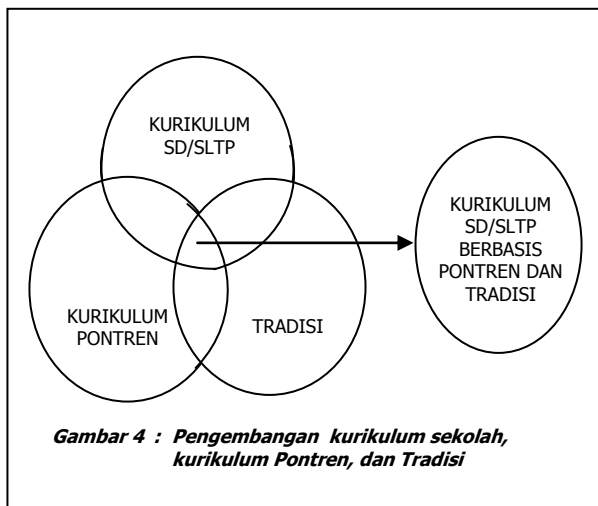
Pendidikan berbasis nilai budaya dan tradisi untuk memperluas dan meningkatkan mutu pendidikan dasar merupakan model-model pendidikan yang

memanfaatkan dan memberdayakan fungsi-fungsi tradisi yang dijadikan patokan oleh masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga tidak ada pranata atau lembaga pendidikan baru yang masuk kedalam masyarakat tersebut.

Model-model pendidikan atau pola-pola pendidikan yang dapat dikembangkan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan dasar pada masyarakat adat antara lain sebagai berikut:

a. Pendidikan Pondok Pesantren yang terintegrasi dengan pendidikan dasar

Menyelenggarakan program pendidikan dasar pada masyarakat yang patuh terhadap nilai-nilai Islam dan kyai harus dilakukan secara terintegratif dengan sistem pendidikan pondok pesantren yang sudah ada . Pola integratif ini adalah memadukan kurikulum sekolah (SD/SLTP) dengan kurikulum pondok pesantren, sehingga proses pembelajaran yang terjadi di pondok pesantren itu mengandung dua muatan, yaitu muatan mata-mata pelajaran sekolah dan materi pondok pesantren (agama). Pola integratif pengembangan kurikulum SD/SLTP tersebut secara skematik seperti terlihat sebagai berikut:



b. Pendidikan Dasar Berbasis Pendidikan Keluarga

Pada masyarakat adat keluarga merupakan basis pendidikan yang paling inti, karena semua pendidikan anak hanya dilakukan di lingkungan keluarga (umumnya anak-anak mereka tidak mengikuti pendidikan sekolah/formal),

sehingga anak-anak-anak mereka waktunya lebih banyak berada di lingkungan keluarga. Pola dan satuan pendidikan dasar yang sudah dikembangkan seperti Paket A, Paket B, SMP terbuka dan lain sebagainya dapat diselenggarakan di lingkungan rumah dengan memanfaatkan segala kondisi dan lingkungan yang ada di lingkungan keluarga.

c. Tokoh (kyai/kuncen) menjadi figur guru/tutor

Masyarakat adat merupakan masyarakat yang sangat patuh pada tradisi yang di simbolkan oleh tokoh. Masyarakat adat merupakan masyarakat yang patuh terhadap tokoh adat sebagai panutannya. Kedudukan dan peranan tokoh adat sangat kuat dalam masyarakat, karena tokoh adat dipandang masyarakat sebagai orang yang memiliki keunggulan ilmu dan pengetahuan, sehingga dapat menampilkan pribadi yang penuh ketauladanan, dianggap memiliki kekuatan supranatural atau memiliki kedudukan yang tak terjangkau terutama oleh kebanyakan orang awam.

Kepemimpinan tokoh adat secara tradisional mempunyai otoritas yang tidak tergoyahkan dan kharismatik. Otoritasnya ini terlihat dari pengaruhnya yang kuat, sedangkan kekharismaannya dapat terlihat dari kemampuannya untuk mengungguli orang lain dalam memahami apa yang paling dirasakan oleh masyarakat.

Pengaruh tokoh adat yang kuat itu telah menempatkan peranan tokoh adat sebagai patron masyarakat (Horikoshi, 1987:244). Tokoh adat sebagai patron memberikan bimbingan spiritual, moral dan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat. Atas perlindungan itu masyarakat menjadi merasa aman dan menempatkan dirinya sebagai klient di bawah bayang-bayang tokoh adat..

Dari gambaran tersebut terlihat bahwa dalam masyarakat adat terjadi kerjasama yang saling menguntungkan antara tokoh adat dengan masyarakat yang didasari dengan prinsip keikhlasan tanpa tekanan. Yang terjadi adalah keterikatan secara alamiah yang melahirkan bentuk hubungan patron-klien. Berdasarkan keadaan masyarakat adat yang seperti itu, maka untuk menyelenggarakan program pendidikan dasar harus menjadikan tokoh adat sebagai guru atau tutornya.

C. Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan

1. Relevansi

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun harus menggunakan pendekatan agama/religius, yaitu memberikan dasar-dasar pemahaman bahwa mengikuti program wajar sembilan tahun itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam (sesuai dengan al-Quran dan al-Hadits serta ajaran para ulama besar) atau kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tanpa harus menilai benar atau tidaknya agama atau kepercayaan itu. Semua mata pelajaran termasuk muatan materinya (pokok-pokok bahasannya) dalam kurikulum sekolah (tingkat SD dan SLTP) harus di landasi oleh ayat-ayat al-Quran dan al-Hadits atau dasar-dasar kepercayaannya.

Penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun harus sesuai dengan tradisi yang berlandaskan ajaran Islam atau tradisi yang berlandaskan kepercayaan-kepercayaan *karuhun/nenek moyang* yang sudah lama dijalankan oleh masyarakat. Misalnya tradisi yang terkait erat dengan kepercayaan dan ritual agama Islam dalam masyarakat yang sampai sekarang masih terus dilakukan setiap tahun adalah tradisi Syawalan, Haolan, dan Muludan, upacara adat dalam perkawinan, hajatan, kelahiran atau kematian. Atau tradisi yang terkait erat dengan kepercayaan karuhun/nenek moyang dalam segala aspek kehidupan. Prinsip relevansi dengan tradisi Islam atau kepercayaan ini juga dimaksudkan penyelenggaraan wajar sembilan tahun harus sesuai baik dengan waktu, materi dan esensi tradisi Islam atau kepercayaan, sehingga terjadi satu sama lain saling menguatkan atau tidak terjadi benturan antara pelaksanaan tradisi Islam atau kepercayaan dengan penyelenggaraan program wajib belajar sembilan tahun.

2. Integrasi

Sistem pendidikan di pondok pesantren terutama pesantren salafiyah, sekalipun tidak secara ketat menunjukkan jenjang dengan tingkat penguasaan materi yang berbeda, namun terdapat jenjang atau tingkatan seperti jenjang pendidikan paling dasar (setingkat Ibtidaiyah) diberikan materi dasar tentang fikih, tauhid, dan Bahasa Arab dengan acuan kitab untuk fikih (usuludin) memakai Kitab Sapinah, untuk tauhid memakai Kitab Tijanub Darori, dan untuk Bahasa Arab memakai Kitab Jurumiah. Lamanya belajar pada tingkat Ibtidaiyah

kurang lebih satu tahun. Santri yang dipandang menguasai pada tingkat ibtidaiyah ini kemudian dilanjutkan ke tingkat Tsanawiyah. Pada tingkat Tsanawiyah ini hanya diberikan dua pokok materi, yaitu Fikih dan Bahasa Arab. Oleh karena itu penyelenggaraan program wajar sembilan tahun baik untuk tingkat SD maupun SLTP harus diintegrasikan dengan penyelenggaraan pembelajaran di pondok pesantren.

Pada masyarakat patuh tradisi yang berlandaskan kepercayaan karuhun/nenek moyang tentu saja tidak terdapat pranata pendidikan dalam bentuk pondok pesantren, tetapi pranata pendidikan dalam bentuk yang lain, seperti proses pewarisan nilai-nilai budaya melalui praktek tradisi baik yang secara rutin dalam waktu harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Dalam kenyataannya masyarakat adat hampir setiap waktu dan tradisi berisi proses pewarisan nilai-nilai budaya kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu menyelenggarakan pendidikan dasar harus sesuai dan mengikuti praktek dari pranata pendidikan itu.

3. Pemberdayaan

Pintu utama untuk terjadinya perubahan pada masyarakat adat termasuk menerima dan terlibat dalam program wajar sembilan tahun adalah melalui tokoh adat. Selama tokoh adat belum bisa menerima program wajar sembilan tahun, maka akan sulit masuk dan diterima oleh masyarakat luas. Tokoh adat dapat menerima program wajar sembilan tahun, apabila program itu dinilai sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan ajaran agamanya atau kepercayaannya. Oleh karena itu pemahaman tokoh adat tentang makna dan hakekat pendidikan harus ditanamkan berdasarkan sudut pandang nilai-nilai budaya dan keyakinan agamanya atau kepercayaannya sesuai dengan pemahamannya yang dianut selama ini.

Dalam pelaksanaannya para tokoh adatlah yang sekaligus menjadi gurunya, oleh karena itu para tokoh adat harus diberdayakan dengan dipersiapkan untuk dapat mengajar mata-mata pelajaran kurikulum nasional SD atau SLTP.

4. Orientasi Hasil

Prinsip ini memberikan keleluasan dan fleksibilitas pelaksanaan pembelajaran baik dari segi waktu maupun tempat, yang dipentingkan adalah hasil belajar para santri atau masyarakat telah memenuhi standar kurikulum yang telah ditetapkan, sedangkan waktu, tempat atau metode pengajarannya sepenuhnya diserahkan kepada kondisi yang ada.

5. Ekonomi Masyarakat

Prinsip ini sangat penting untuk dikembangkan mengingat tingkat kesejahteraan dan pendapatan masyarakat adat umum masih tergolong rendah. Dengan terselenggaranya program wajib belajar sembilan tahun harus memiliki efek positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu pengorganisasian kurikulumnya harus bermuatan life skills berbobot pengembangan ekonomi. Prinsip ini juga akan menguatkan penyelenggaraan pendidikan dasar, karena masyarakat adat disamping akan merasakan efek jangka panjang juga akan merasakan efek langsung dari mengikuti pendidikan dasar.

D. Mekanisme Pelaksanaan

1. Perencanaan

- a. Dinas Pendidikan Kecamatan dan Departemen Agama tingkat Kecamatan (KAU) berkoordinasi dengan kepala desa dan tokoh adat untuk menyepakati pola satuan pendidikan dasar yang dikehendaki
- b. Hasil koordinasi pada poin a di atas disampaikan oleh Dinas Pendidikan Kecamatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten dan Departemen Agama Kabupaten.
- c. Dinas Pendidikan Kabupaten merancang dan menyiapkan aspek-aspek fisik dan non fisik yang berkenaan dengan pola satuan pendidikan yang telah disepakati
- d. Dibentuk tim yang akan melakukan tugas-tugas koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan. Tim ini hendaknya terdiri dari unsur dinas pendidikan kecamatan, pengawas, aparatur desa, aparatur kecamatan, tokoh adat dan dinas pendidikan kabupaten.

Apabila tersedia lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dapat berperan sebagai konsultan.

2. Pelaksanaan

a. Pengembangan Kurikulum

- 1) Untuk masyarakat dengan tradisi Islam dimana pondok pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan terlebih dahulu dilakukan langkah-langkah: (1) Analisis kurikulum SD dan SLTP dari aspek tujuan, materi, esensi dan alokasi waktu setiap mata pelajaran. (2) Analisis kurikulum pondok pesantren setingkat ibtdaiyah dan Tsanawiyah (tingkat wustha setara SMP-dengan mata pelajaran umum meliputi: Bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS dan Bahasa Inggris) dilihat dari aspek tujuan, materi, esensi dan alokasi waktu setiap mata ajar. (3) Mengintegrasikan dan mengembangkan kurikulum SD dan SLTP dengan kurikulum pondok pesantren setingkat SD dan SLTP dilihat dari aspek tujuan, materi, esensi dan alokasi waktu mata ajar. (4) mengintegrasikan dengan praktek tradisi baik yang harian, mingguan, bulanan, tahunan atau moment-moment aktivitas lainnya (5) Validasi dan sosialisasi kurikulum integratif dan (6) Standarisasi kurikulum integratif.
- 2) Untuk masyarakat patuh tradisi dengan dasar tradisi semata-mata atau kepercayaan karuhun/nenek moyang, pengembangan kurikulum disesuaikan dengan pola satuan pendidikan dasar yang dikehendaki. Pola satuan pendidikan dasar yang ditawarkan depdiknas seperti: Program Paket A, Paket B, SD-SMP satu atap, SMP terbuka dan program-program lainnya dapat dipilih sebagai salah satu pola satuan pendidikan dasar. Muatan kurikulum pola satuan pendidikan dasar yang terpilih harus disesuaikan dengan nilai-nilai budaya, tradisi dan lingkungan masyarakat yang bersangkutan, termasuk tempat dan waktu pelaksanaannya.

b. Penyusunan Bahan Ajar/Modul

Penyusunan bahan ajar sesuai dengan pengembangan kurikulum integratif yang memadukan kurikulum SD/SLTP, kurikulum pondok pesantren, dan praktek tradisi, maka bahan ajar disusun dengan memadukan

materi pokok bahasan SD kelas rendah (calistung), SD kelas tinggi (IPA, IPS, Matematika, Bahasa Indonesia), mata pelajaran SLTP (Bahasa Indonesia, PKN, IPA, IPS dan Bahasa Inggris), kurikulum pondok pesantren dengan diperkuat oleh praktek tradisi dan potensi lingkungan tempat tinggal atau lingkungan alam sekitar. Bahan ajar/modul yang dikembangkan hendaknya sarat dengan contoh-contoh yang berasal dari tradisi sehari-hari dan potensi geografi lingkungannya.

c. Ketenagaan

- 1) Tenaga pendidikan diutamakan berasal dari tokoh adat (kyai atau kuncen) yang memiliki pengaruh kuat terhadap masyarakat.
- 2) Tenaga pendidik dari tokoh adat tersebut harus disiapkan terlebih dahulu misalnya dengan mengikuti diklat penyetaraan tenaga pengajar yang sesuai dengan tugas mereka masing-masing yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan dalam UU Nomor 15 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3) Tenaga pendidik dari tokoh adat diupayakan mendapat honor mengajar dari pemkab setempat.
- 4) Disamping dari tokoh adat, juga dari tenaga pendidik yang selama ini telah menjadi guru (SD/SLTP) yang ditugaskan khusus untuk lokasi atau masyarakat tersebut yang mendapat honor tambahan selain gaji PNS. Guru ini nantinya akan menjadi pendamping bersama-sama dengan guru dari tokoh adat.
- 5) Secara periodik diadakan diklat peningkatan kompetensi untuk penyetaraan dan sertifikasi pendidik mata pelajaran umum terutama guru yang berasal dari tokoh adat yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 6) Tenaga pembina program yang langsung terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dasar di pondok pesantren dan atau masyarakat adat disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.
- 7) Tenaga supervisi (pengawas) yang langsung terkait dengan penyelenggaraan pendidikan dasar di pondok pesantren dan atau masyarakat adat disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.

d. Peserta Didik

- 1) Peserta didik yang berasal dari pondok pesantren adalah seluruh santri baik yang menginap maupun yang tidak (santri kalong) menjadi peserta didik
- 2) Peserta didik dari santri dikelompokkan sesuai dengan tingkatan usia dan atau latar belakang pendidikan yang pernah diikuti kedalam tingkat pendidikan SD (kelas 1 – 6) dan SLTP (kelas 1 – 3) atau disesuaikan dengan kondisi santri yang ada.
- 3) Peserta didik yang berasal dari masyarakat adalah seluruh penduduk yang berada di lingkungan masyarakat yang bersangkutan yang berusia 7 - 15 tahun atau di luar usia itu yang berminat mengikuti pendidikan dasar.

e. Pembiayaan

- 1) Pembiayaan yang dari pusat (sumber dana APBN) terutama yang relevan dengan pengembangan pola satuan pendidikan dasar dan program-program peningkatan akses dan mutu pendidikan dasar dari Direktorat TK/SD dan Direktorat Pembinaan SMP Depdiknas baik melalui dana dekon maupun DAK yang dalam pelaksanaannya baik yang dikoordinasikan dengan pemprov, dengan pemkab maupun langsung dari pusat seperti BOS dan lain-lain.
- 2) Sumber dana yang berasal dari APBD propinsi melalui Dinas Pendidikan Propinsi yang dikembangkan kedalam program-program bantuan dana beasiswa, RKB, USB, tunjangan guru terampil dan program-program lainnya.
- 3) Sumber dana yang berasal dari APBD kabupaten melalui Dinas Pendidikan kabupaten yang dikembangkan kedalam program-program bantuan dana beasiswa, RKB, USB, tunjangan guru terampil dan program-program lainnya sesuai dengan kemampuan pemkab setempat.
- 4) Sumber dana yang berasal dari partisipasi masyarakat

f. Fasilitas

- 1) Tempat dan fasilitas pembelajaran dengan memanfaatkan pondok pesantren dan mesjid yang selama ini dijadikan kegiatan belajar

mengajar oleh kyai dan santri dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lainnya seperti papan tulis, meubelair dan lain-lain yang diperlukan.

- 2) Tempat dan fasilitas pembelajaran dengan memanfaatkan tempat-tempat upacara adat (rumah adat/paseban dan sebagainya), rumah keluarga, atau lingkungan sekitar dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas lainnya yang diperlukan.
- 3) Sumber-sumber belajar yang ada di lingkungan masyarakat setempat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran yang PAKEM.
- 4) Penyediaan kebutuhan buku pelajaran dan alat-alat pelajaran IPA, IPS dan matematika disediakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten.

3. Monitoring Evaluasi (Monev)

a. Tujuan

Tujuan monev adalah untuk mengetahui keterlaksanaan aspek-aspek sebagai berikut:

- 1) Sejauhmana implementasi kurikulum integratif terlaksana ?
- 2) Bagaimana kompetensi guru (baik yang berasal dari tokoh adat maupun guru yang ditugaskan) dalam proses belajar-mengajar ?
- 3) Bagaimana ketersediaan dan pemanfaatan buku pelajaran dan alat-alat pelajaran ?
- 4) Bagaimana kelayakan tempat kegiatan pembelajaran ?
- 5) Bagaimana kesesuaian pelaksanaan pola satuan pendidikan dengan budaya, tradisi dan lingkungan sekitar ?
- 6) Bagaimana tingkat dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan pola satuan pendidikan yang diselenggarakan ?
- 7) Bagaimana motivasi dan tingkat penerimaan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran ?
- 8) Aspek-aspek apa saja yang dianggap telah baik dan harus ditingkatkan ?
- 9) Aspek-aspek apa saja yang dianggap masih kurang dan perlu perbaikan ?

b. Pelaksana

Pelaksana kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim yang dibentuk khusus yang terdiri dari unsur dinas pendidikan kecamatan, pengawas, aparatur desa, aparatur kecamatan, tokoh adat, dinas pendidikan

kabupaten dan Departemen Agama baik tingkat kabupaten maupun kecamatan. Apabila tersedia lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dapat berperan sebagai konsultan. Kegiatan monev dilapangan berada dibawah tanggung jawab pengawas dari dinas pendidikan dan departemen agama.

c. Pedoman dan Instrument

Pedoman monev beserta instrument-instrumentnya disusun oleh tim pelaksana monev berdasarkan standar-standar pendidikan dasar baik secara nasional, regional maupun lokal dan disepakati sebagai pedoman yang akan digunakan monev dalam kurun waktu tertentu, misalnya untuk jangka waktu 1 sampai 2 tahun. Pedoman monev ini harus terus-menerus disesuaikan dengan situasi, kondisi dan perkembangan yang terjadi di lokasi.

d. Waktu Pelaksanaan

Monev dilakukan secara periodik dan terjadwal mulai dari tahap perencanaan atau persiapan, tahap pelaksanaan yang dibagi kedalam beberapa periode sesuai dengan kebutuhan dan tahap akhir serta tahap pelaporan.

BAB VII

MODEL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT

MOHON DI BUATKAN DALAM BENTUK BAGAN DLLL.....

*CATATAN: MODEL BUATAN PA UDIN DI SEMPURNAKAN DENGAN MENCAKUP SELURUH BIDANG
KAJIAN*

*DENGAN MEMPOSISIKAN DALAM PELAKSANAANNYA MELALUI JALUR KELUARGA, SEKOLAH,
MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH.....PUNTEN NYA...*

BERTEMU FINAL DI HOTEL TOPAS JUMAT, TGL 15 JUNI 2007

DAFTAR LITERATUR

(Pendidikan berbasis budaya dan tradisi)

- Adiwidjaja, R. I. (1951) *Adegan Basa Sunda*. Djakarta: J. B. Wolters. Groningen,
- Alwasilah, Chaedar. 1985. *Sosiologi Bahasa*. Bandung: Angkasa.
- Berry, John W, dkk, (1999), *Psikologi Lintas Budaya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Bactiar, Harsya W, dkk. (1987), *Budaya dan Manusia Indonesia*, Yogyakarta: PT Hamindata
- Departemen Pendidikan Nasional (2003), *Petunjuk Pelaksanaan Sistem Pendidikan Nasional 2003*; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah, Jakarta : CV. Eko Jaya.
- Geertz, Clifford. (1992). *Politik Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius
- Hamijoyo, Santoso S. dan A. Iskandar, *Beberapa Catatan Tentang Partisipasi Masyarakat*, Jakarta: Departemen P dan K, Badan Pengembangan Pendidikan, 1974.
- Hamijoyo, Santoso, *Community Participation and the Role of Leaders (The Indonesian Experience)*, Jakarta/Beijing: NFPCB/BKKBN/ESCAP, 1992.
- Harsojo. (1986). *Pengantar Antropologi*. Bandung: Bina Cipta
- Jalal,F. & Supriadi, D. (2001). *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa.
- Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- [Http://www.hawaii.gov/scbm/fagscbm.htm](http://www.hawaii.gov/scbm/fagscbm.htm), (1989), *School Community Based Management (SCBM) Policy*.
- Koentjaraningrat, (1982), *Masalah-masalah Pembangunan*, Jakarta: LP3ES
- Liliweri, Alo (2003), *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya*, Yogyakarta: LKIS.
- Owens, R. Thomas, (1996), *Community-Based Learning : A Foundation for Meaningful Education Reform*, <http://www.nwer.org/scpd/sirs/10/t008.html>
- Ratnawati, P, (2004), *Mengukur Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Pendidikan ;* http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/43/p_ratnawati.htm.
- Suryadi, Ace dan HAR Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Sztompka, Piotr (2007), *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta : Prenada
- Tim Peneliti, *Analisis Pendidikan Berbasis Keagamaan (Laporan Penelitian)*, Bandung: Bina Program Dinas Pendidikan Jawa Barat, 2006.
- Tanpubolon, Mangatas, (2004), *Pendidikan: Pola Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan*

Otonomi Daerah ;
http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm.

----- (2004), *Paradigma Baru Pendidikan Bermutu Berdasarkan Sistem Board Based Education dan High Based Education Menghadapi Tantangan Abad ke 21 di Indonesia* ;
http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/34/paradigma_baru_pendidikan_bermutu.htm.

Tilaar, (1999), *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*, Bandung: Rosdakarya.

Victorino, D. (2004). *Global Responsibility and Local Knowledge System*. Conference held in Egypt.

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Dasar Hukum.....	2
	C. Tujuan.....	3
	a. Tujuan Umum.....	3
	b. Tujuan Khusus.....	3
	D. Hasil yang Diharapkan.....	3
	E. Prosedur Kegiatan.....	3
	F. Tim Penyusun.....	4
	G. Ruang Lingkup.....	5
	H. Waktu Kegiatan.....	5
	I. Pembiayaan.....	5
BAB II	STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BERBASIS KEWILAYAHAN.....	6
	A. Rasional.....	6
	B. Konsep Dasar.....	7
	C. Prinsip-prinsi Pelaksanaan.....	23
	D. Mekanisme Pelaksanaan.....	24
BAB III	STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BERBASIS EKONOMI KELUARGA.....	29
	A. Rasional.....	29
	B. Konsep Dasar.....	30
	C. Prinsip-prinsip Pelaksanaan.....	39
	D. Mekanisme Pelaksanaan.....	40
BAB IV	STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BERBASIS AGAMA.....	46
	A. Rasional.....	46
	B. Konsep Dasar.....	48
	C. Prinsip-prinsip Pelaksanaan.....	54
	D. Mekanisme Pelaksanaan.....	55
BAB V	STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BERBASIS BAHASA DAN SASTRA DAERAH.....	62
	A. Rasional.....	62
	B. Konsep Dasar.....	64
	C. Prinsip-prinsip Pelaksanaan.....	81
	D. Mekanisme Pelaksanaan.....	81
BAB VI	STRATEGI PELAKSANAAN PENDIDIKAN MASYARAKAT BERBASIS NILAI BUDAYA DAN TRADISI.....	83
	A. Rasional.....	83
	B. Konsep Dasar.....	86
	C. Prinsip-prinsip Pelaksanaan.....	103
	D. Mekanisme Pelaksanaan.....	105
BAHAN RUJUKAN		

DRAFT KEDUA

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT
DALAM RANGKA PEMERATAAN DAN PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN DASAR DI PROPINSI JAWA BARAT**

**Disusun Oleh :
TIM PELAKSANA**

Kerjasama
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**
Dengan
**DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2007**

DRAFT KEDUA

**PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT
DALAM RANGKA PERLUASAN AKSES, AKSELERASI
PENUNTASAN WAJAR DAN PENINGKATAN MUTU
PENDIDIKAN DASAR DI PROPINSI JAWA BARAT**

**Disusun Oleh :
TIM PELAKSANA**

Kerjasama
**LEMBAGA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**
Dengan
**DINAS PENDIDIKAN
PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
TAHUN 2007**

